Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dan kehidupan masyarakat. Kontribusi pariwisata bagi pembangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pariwisata saat ini sudah menjadi *leading sector* karena telah berhasil menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang devisa negara setelah kelapa sawit. Oleh karena itu pembangunan pariwisata harus ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan pariwisata tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Pemerintah tentu mempunyai keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, demi keberlangsungan pembangunan pariwisata, perlu melibatkan masyarakat dan swasta. Masyarakat adalah subjek dan objek pembangunan pariwisata. Sebagai subjek pembangunan pariwisata, masyarakat perlu diberdayakan dan ditingkatkan peran sertanya yang sering disebut dengan istilah *community based tourism*. Dengan *community based tourism* diharapkan akan terwujud sustainable tourism.

Sustainable tourism adalah salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable tourism* ditujukan selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sosial budaya, namun juga harus tetap menjaga dan melestarikan keberlangsungan lingkungan hidup. Pariwisata tidak boleh merusak lingkungan. Pariwisata harus berkelanjutan hingga dapat dinikmati oleh generasi di masa depan. Untuk tujuan itulah buku ini disusun yang berjudul "Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan".

USUpress

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Tamrin
Tulus
Erika Revida
Aldy Safruddin Rambe
Erna Frida

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara

Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Editor:
Tamrin
Tulus
Erika Revida
Aldy Safruddin Rambe
Erna Frida

USUpress
2023

USU Press
Art Design, Publishing & Printing
Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-527-3

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara: Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan/Editor: Tamrin [et.al] – Medan: USU Press, 2023.

ix, 197. ; ilus.: 25 cm

Bibliografi
ISBN: 978-602-465-527-3

Dicetak di Medan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb,

Segala hormat dan puji syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan hidayahNya, Buku Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang berjudul "*Sustainable Tourism* dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan" pada tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sustainable Tourism diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar masyarakat menjadi lebih berkembang, maju dan mandiri khususnya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. *Sustainable tourism* dipercaya merupakan salah satu terobosan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu dapat menciptakan lapangan kerja, mencegah urbanisasi, mencintai budaya local dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu *sustainable tourism* menjadi topik yang menarik untuk dituangkan dalam buku yang merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran para anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara tahun 2023.

Buku ini tidak akan selesai tanpa kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu patut disampaikan ucapak terima kasih setinggi tingginya kepada Rektor Universitas Sumatera Utara yaitu bapak Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, MSi dan jajarannya, yang telah memberikan memberikan restu dan alokasi dana untuk kelancaran penulisan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai penulis dalam buku ini.

Ada pepatah yang mengatakan "*Tak ada gading yang tak retak, kalau tidak retak bukanlah dinamakan gading*", maka penulis buku menyadari bahwa buku ni tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan buku ini dikemudian hari. Akhir kata diucapkan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Prof. Dr. Erika Revida, MS
Sekretaris Komisi I Dewan Guru Besar USU

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Interaksi yang dilakukan setiap manusia tidak hanya bagi sesamanya, tetapi alam memiliki fungsi yang sangat penting agar *balancing of live* terjaga dalam tubuh manusia. Terkadang, kita sering mengabaikan fungsi lingkungan yang berada di sekitar kita. Mulai dari batu kerikil, pepohonan, sungai, laut, danau, gunung, dan langit serta seluruh penghuni bumi ini memiliki nilai yang memberikan *balancing of live*. Semua berperan memberikan manfaat kolaboratif dan berdampak bagi kemajuan peradaban manusia. Sejak masa Yunani Kuno, kemajuan peradaban manusia diukur dengan beragam indikator, pertukaran barang dan jasa, serta proses *enlightment* dalam berbagai bentuk muncul mengikuti masanya. Peradaban dari satu bangsa selalu dilihat dari infrastruktur yang dibangunnya, terhubung dengan yang lain, memberikan ruang aktivitas manusia, berkelanjutan, dan meninggalkan kisah tersendiri. Saat kita melihat bentuk bangunan yang berdiri kokoh sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, kita akan tersadar itulah peradaban. Begitu juga, saat kita menikmati keindahan alam yang terkoneksi antara sungai, hutan, gunung, dan lautan dengan beragam jenisnya, maka secara sadar akan mengundang energi positif dari dalam tubuh manusia. Suasana itu akan tidak jauh berbeda, saat kita menikmati keindahan kota dengan penataan bangunan, pedestarian, air dan udara besih, serta keramahan warganya. Apalagi menikmati kuliner lokal yang sangat khas disajikan bagi setiap tamu yang berkunjung di negara itu. Secara sederhana, saya mengartikan suasana itu sebagai *sustainable tourism*.

Menikmati suasana alam dan manusia di satu negara atau dengan sebutan apapun, merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dan berkaitan satu sama lain di dalam negara maupun antar negara. Konektivitas dan keberlanjutan untuk kepentingan wisata merupakan keharusan yang tidak mungkin diabaikan. Beragam implikasi positif yang muncul dari penataan *sustainable tourism* lebih baik jika dibandingkan dengan bentuk usaha bisnis lainnya. Setiap kelompok masyarakat berbentuk adat, suku, marga, maupun sebutan lainnya pasti memiliki kebiasaan, nilai, dan sikap yang terus tumbuh untuk mengatur kehidupannya. Mekanisme internal dalam kelompok masyarakat itu akan dipegang teguh sebagai kebenaran yang memberikan manfaat bagi setiap anggotanya. Kearfian lokal yang menjadi ciri khas merupakan *capital based* yang sangat tinggi nilainya. Meskipun kearifan lokal

itu sangat bisa dikembangkan mengikuti kemajuan kehidupan peradaban yang modern dan berstandar internasional. Keindahan dan kenyamanan alam semesta, keramahan warga, nilai kebaikan, kuliner yang dimiliki, kemampuan mengolah alam sebagai sumber kehidupan, seni hiburan yang diciptakan, dan cara menyelesaikan masalah harus dikelola untuk memenuhi ukuran modernitas memajukan sektor pariwisata.

Kontektivitas dan integrasi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dan dikelola dalam tema *tourism*, akan memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Keuntungan konektivitas adalah mempercepat proses mobilisasi pengetahuan, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, mencegah urbanisasi, mencintai budaya sendiri dan melestarikan lingkungan menjadi ukuran bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Sustainable tourism* sangat mungkin dilakukan pemerintah, industri, masyarakat, dan perguruan tinggi secara kolaboratif dengan cara menyusun prioritas, mengerjakan penyelesaian masalah, dan melakukan pendampingan tanpa henti.

Buku "*Sustainable Tourism* dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan" yang Anda baca ini, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tentang pemikiran membangun *sustainable tourism* dari Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Tentu saja, buku ini diharapka dapat memberi inspirasi pembaca yang tertarik mengetahui, mendalami, dan bagi yang sedang mengerjakan penataan *tourism* di Indonesia.

Medan, September 2023

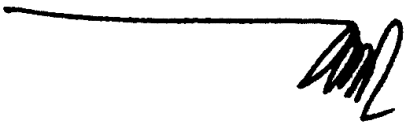

Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si.

SAMBUTAN Plt. KETUA DEWAN GURU BESAR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023 ini telah berhasil menerbitkan buku yang berisi tentang pemikiran para Guru Besar USU yang berjudul "*Sustainable Tourism* dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan".

Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah (pendapatan asli daerah) serta pendapatan nasional melalui devisa negara. Selain itu pariwisata dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi, meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan pariwisata berkelanjutan atau yang disebut dengan istilah *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* berorientasi pada selain peningkatan ekonomi, sosial budaya dan berbasis lingkungan. Pembangunan pariwisata yang memperhatikan masa depan bangsa dan tidak boleh merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu *sustainable tourism* telah menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Keberhasilan *sustainable tourism* sangat tergantung pada peran serta (partisipasi) masyarakat. Masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan pariwisata. Sebagai subjek pembangunan masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta dan berada di garda terdepan dalam mensukseskan pembangunan pariwisata yang pada gilirannya dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar lebih mandiri dan berperan dalam pembangunan pariwisata di daerah/desanya.

Buku ini merupakan salah satu wadah bagi para guru besar USU untuk menyumbangkan pemikirannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan *sustainable tourism.* Semoga buku ini dapat menjadi mendorong para guru besar USU untuk lebih rajin lagi menulis karya ilmiah.

Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Rektor USU dan jajarannya yang telah memberikan dana dalam penerbitan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para guru besar USU yang telah berpartisipasi dalam menulis buku ini. Akhirnya saya ucapkan semoga Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, September 2023
Plt Ketua DGB USU

Prof. Dr. Tamrin, MSc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA iv
SAMBUTAN Plt. KETUA DEWAN GURU BESAR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA vi
DAFTAR ISI viii

1. Pengembangan Objek Wisata Alternatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba
   Abdul Rauf 1

2. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Blondina Marpaung 9

3. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Elmeida Effendy 17

4. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Erika Revida 24

5. *Sustainable Tourism* dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Evawany Y. Aritonang 33

6. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan
   Harry Agusnar 40

7. *Sustainable Tourism* dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Irnawati Marsaulina 53

8. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia dan Upaya Bangkit Kembali Pasca Pandemi
   Iskandar Muda Damanik 62

9. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Tourism untuk Mengentaskan Kemiskinan
   Juliati Br. Tarigan 71

10. Kompetensi Komunikasi dalam Pemasaran Coffee Shop di Era Digital
    Lusiana Andriani Lubis 80

11. Tantangan dan Prospek Sustainable Ecotourism di Hutan Mangrove Sumatera Utara dalam Mengentaskan Kemiskinan
Mohammad Basyuni 90

12. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
Muhammad Fidel Ganis Siregar 95

13. Strategi Destinasi Wisata Danau Toba dengan Pemberdayaan Masyarakat
Noverita Sprinse Vinolina 108

14. Sustainable Development Pembangunan Pariwisata dalam Pengentasan Kemiskinan : Pengembangan Potensi Budaya Wisata Kuliner Pasar Kamu (Pekan Sarapan Karya Anak Muda) Desa Denai Lama, Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
Pujiati 116

15. Sustainable Tourism: Suatu Pemikiran untuk Pengelolaan Wisata Danau Toba
Rahmawaty 132

16. Disain Pengembangan Potensi Usaha Kecil Menengah dalam Mengwujudkan Daerah Wisata Foods Halal di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Ramli 146

17. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
Sarma Nursani L. Raja 155

18. Sutainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengetaskan Kemiskinan (Perspektif Komunikasi)
Suwardi Lubis 167

19. Pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan
T. Silvana Sinar 174

20. Landak River Wisata Sungai dan Alam Berbasis Mitos dan Pelerai Konflik
Wan Syaifuddin 183

21. Pembangunan Berkelanjutan Parawita Pesisir Pantai Timur Sumatera dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan
Zulkifli Nasution 191

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALTERNATIF BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH TANGKAPAN AIR (DTA) DANAU TOBA

Abdul Rauf
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba merupakan daerah yang mempunyai potensi keindahan alam dan sumber daya manusianya. Keindahan alam dan panorama kawasan Danau Toba, kekayaan seni budaya asli merupakan potensi keindahan alam dan dikembangkan dalam upaya pengembangan kepariwisataan di tanah air. Potensi alam tersebut diantaranya adalah luasnya lahan kosong yang dapat diolah menjadi areal pertanian, peternakan, perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, perlu secara berkesinambungan perlu mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah. Sejalan dengan itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat; Pengembangan kapabilitas lembaga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mendukung pembangunan daerah; Peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja; serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, DTA Danau Toba yang selama ini memiliki potensi wisata pemandangan (Danau Toba), dapat dikembangkan objek wisata ke dalam wisata akademik (penelitian) berupa pendataan kerusakan alam, wisata konservasi (reboisasi lahan kritis) serta wisata pendidikan (pengembangan sumberdaya masyarakat). Wisata pemandangan di wilayah ini dimungkinkan dengan lokasinya yang berada di seputar Danau Toba, disertai pemandangan alam pegunungan. Banyak desa yang dapat melihat pemandangan alam Danau Toba. Wisata penelitian, dimungkinkan dengan banyaknya daerah yang tergolong mengalami kerusakan berupa lahan kritis, sehingga perlu kajian pendataan secara spasial tentang luas, posisi, penyebab dan dampaknya. Wisata penelitian yang menarik adalah pendataan tentang tanaman endemik seperti kemenyan dan andaliman, baik speciesnya, habitatnya maupun teknik budidayanya.

Wisata konservasi dan pendidikan diberikan dengan membuat gamabaran pengelolaan berbagai kondisi lahan (kemiringan dan kesbiuran) dengan berbagai teknik konservasi, baik secara fisik, vegetasi maupun

pemberian amandemen. Konservasi kehidupan masyarakat Toba yang kental dengan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehingga ekowisata ini berbasis pada ketiga unsur ini yang merupakan kebiasaan masyarakt setempat. Daerah ekowisata konservasi dan pendidikan, seyogyanya merupakan bagian kecil dari sub DAS yang ada, sehingga pengelolaannya merupakan perpaduan komplek kondisi lahan dan tindakan pengelolaan lahan dalam upaya mengkonservasi tanah dan air. Semakin beragam kondisi lahan, akan semakin baik bagi ruang pendidikan dan objek ekowisata. Dengan kondisi perekonomian, kondisi wilayah dan lahan, maka ekowisata yang layak dilaksanakan di daerah studi adalah, ekowisata yang bernilai, konservasi, pendidikan dan wisata alam.

2. Masalah

Permasalahan dalam pengembangan objek wisata alternatif di DTA Danau Toba diantaranya: belum tumbuhnya kultur masyarakat sadar wisata; keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yg kompeten dan professional di bidang industri jasa wisata alam atau wisata non-pemandangan; keterbatasan dukungan pembiayaan dari pemerintah; serta kurangnya infrastruktur pendukung.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Mengembangkan potensi pariwisata bersifat ekowisata dengan dukungan perguruan tinggi; Membangun industri ekowisata sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan; Memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam pengembangan, memperkenalkan dan promosi ekowisata; Membangun ekowisata yang khas, unik, genuine sesuai kekhasan daerah dengan budaya nya yang tinggi didukung inovasi yang terus dilakukan; Membangun SDM yang kompeten bagi aparatur maupun masyarakat yang sadar wisata; Membuat roadmap yang jelas pengembangan ekowisata untuk mem peroleh dukungan pembiayaan dari pusat dan dukungan dan sinergitas dari SKPD lainnya; Mendorong dukungan pemerintah dalam pengaadaan infrastruktur pendukung bagi pengembangan industri ekowisata serta insentif yang menarik kepada investor.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Setiap wilayah di DTA Danau Toba memiliki potensi untuk dikembangkan potensi wisata alternatif, terutama dalam pengembangan desa ekowisata. Hal ini sangat tergantung pada kreativitas manusianya. Untuk itu, dalam pengembangan desa ekowisata adalah melakukan identikasi potensi. Pengembangan objek wisata alternatif memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa

aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, dan tingkat resistensi komunitas lokal.

Proses memetakan potensi wilayah dilakukan melalui rembug warga/musyawarah seluruh komponen desa dari berbagai kalangan, baik itu perangkat desa, kelompok perempuan, kelompok pemuda, maupun kelompok lainnya. Beberapa kelompok potensi yang dapat dipetakan. Di antaranya adalah; apa yang bisa dilihat (something to see), apa yang bisa dilakukan (something to do), apa yang bisa dimakan (something to eat) , dan apa yang bisa dibeli (something to buy).

Pengembangan potensi ekowisata layak melibatkan profesional atau konsultan/perguruan tinggi untuk menyusun masterplan, memberikan pelatihan, maupun melakukan pendampingan. Karena itu perlu juga memetakan kampus-kampus yang potensial di sekitar desa wisata untuk dapat dilibatkan dalam program penelitian maupun pemberdayaan masyarakat. Proses konsultasi juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil. Derah tangkapan air Danau Toba dengan kondisi lahan beragam baik dari segi bentuk relief lahan, kekiritisan lahan, kemiringan lereng dan penutupan lahan memerlukan kajian yang seksama guna menetapkan lokasi ekowisata yang dapat mendampingi wisata pemandangan indah Danau Toba.

5. Rencana Tindak Lanjut

Konsep objek wisata alternatif yang dapat didesain bukan merupakan wisata massal tetapi lebih menekankan pada aspek pendidikan dan kebudayaan. Salah satu dari sekian banyak objek wisata alternatif adalah agroekowisata. Dalam objek wisata ini wisatawan akan menjalani perjalanan melalui jalur-jalur dan melakukan interpretasi lingkungan secara mandiri maupun dibimbing oleh pemandu. Masyarakat yang mendatangi lokasi ini akan diajak berkeliling untuk menikmati relasi antara hutan dan kebun, terutama kebun kopi. Rangkaian wisata pendidikan yang dapat dibangun diantaranya: (1) pengolahan biji kopi (tradisional dan modern), (2) budiaya kebun kopi dan hutan, (3) hutan (arboretum) pola pohon asuh, (4) menikmati seduhan kopi tradisional Toba dengan pemandangan Danau Toba.

1. Pengolahan Biji Kopi

Bagi sebagian orang, pengolahan biji kopi merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi obyek wisata pendidikan. Pengunjung tidak hanya menyaksikan, tetapi menjadi pelaku dan dapt menikmati hasil pekerjaannya. Di lokasi project akan dibangun atau memanfaatkan bangunan yang sudah ada sebagai tempat untuk pengolahan biji kopi. Pengunjung memasuki area pengolahan biji kopi, dan secara langsung dapat mengerjakan tahapan-tahapan pengolahan biji kopi. Pengolahan biji kopi yang ditawarkan adalah

secara tradisional maupun secara modern sampai biji kopi siap dipasarkan. Pengunjung bisa membawa hasil olahannya untuk dibawa pulang.

Gambar 1. Pengolahan biji kopi secara tradisional menarik sebagai bahan pembelajaran

2. Budidaya Kebun Kopi dan Pohon

Setelah mengetahui dan mempraktekkan pengolahan biji kopi, pengunjung tentu penasaran ingin tahu bagaimana memanen atau memetik langsung biji kopi. Pengunjung akan dibawa ke lokasi kebun kopi dimana kebun kopi ini dibudidayakan dengan system agroforestry. Pengunjung akan ditunjukkan fungsi dan peranan pohon terhadap budidaya kopi. Selain itu pengunjung akan melakukan pemanenan dan sekaligus dapat merasakan fungsi pohon di kebun kopi.

Gambar 2. Pola penanaman agroforestry kopi dan tegakan pohon (Sumber Kompas 2018, dan Samsuri 2020)

3. Kedai Kopi View Danau Toba.

Setelah lelah berkeliling dan praktek mengelola proyek agroforestry, pengunjung akan dibawa ke pusat bisnis hasil agroforestry. Salah satu hasil agroforestry yang dapat dinikmati adalah seduhan kopi secara tradisional. Airnya panas bahan kopi direbus dengan kayu bakar dari hasil agroforestry, dan diseduh secara tradisional. Cara menikmatinya (meminumnya) juga ditemani dengan kue atau makanan tradisional sambil memandang view Danau Toba.

Gambar 3. Menikmati kopi sambil menikmati view agroforestry kopi dan hutan lindung

Gambar 4. Desain tapak salah satu alternatif agroekowisata di DTA Danau Toba

Pentahapan penataaan desa ekowisata secara berkala dalam perencanaan tahunan dan jangka panjang di DTA Danau Toba dapat disusun Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan ekowisata selama 5 tahun sebagai berikut:

Program	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Desain	Menetapkan lokus ekowisata berbasis mapping potensi eko dan destinasi wisata	Pembangunan tahap awal	Membangun kekhasan produk dan jasa yang unik	Mantapkan keunikan dan standarisasi layanan	Mantapkan stnadarisasi layanan dan pengembangan produk

Program	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Regulasi	Menyusun, menetapkan dan sosialisasi regulasi insentif dan disinsentif ekowisata	Mengundang investor untuk berpartisipasi dalam membangun ekowisata	Membangun atmosfir yang kondusif berupa proteksi dan promosi	Mantapkan atmosfir yang kondusif untuk pengembangan	Mantapkan atmosfir yang kondusif untuk pengembangan
Infrastruktur	Susun rencana dukungan infrastrutur dan peran SKPD lainnya	Membangun infrastruktur dasar khususnya akses jalan	Membangun infrastruktur lanjutan fasilitas umum	Bangun infrastruktur lanjutan fasilitas umum	Fasilitasi kemudahan untuk kembangkan infrastruktur
Sumberdaya Manusia	Melakukan pelatihan SDM aparatur dan masyarakat	Melakukan pelatihan sdm aparatur dan petani	Standarisasi kompetensi SDM aparatur dan petani	Mantapkan kompetensi SDM aparatur dan petani	Mantapkan kompetensi SDM aparatur dan petani
Kelembagaan	Membuat desain dan mengembangkan kelembagaan kemitraan	Membngun kelembagaan kemitraaan dan bangun *branding*	Memantapkan kelembagaan kemitraan dan bangun *branding*	Mantapkan kelembagaan kemitraan dan bangun *branding*	Bangun keberlanjutan kemitraan yang berkeadilan
Penelitian dan Pengembang-an	membangun dan menemukan serta merencanakan inovasi dan kreasi produk yang unik	Membangun dempolt untuk inovasi dan kreasi produk yang unik	Memantapkan dempolt untuk inovasi dan kreasi produk yang unik	Menemukan dan ujicoba hasil inovasi dan kreasi produk yang unik	Terapkan teknologi hasil inovasi di lapangan

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba maka diperlukan objek wisata alternatif yang dapat dinikamti dan dikunjungi, sehingga berbagai pengalaman dan kesan berwisatanya bisa beragam dan tidak membosankan. Objek wisata alternatif yang bisa dibangun di DTA Danau Toba sangat beragam, baik berupa wisata pendidikan, penelitian, budaya, pertanian, kehutanan dan tetumbuhan endemik.

Saran

Pengembangan objek wisata alternatif di DTA Danau Toba harus berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga objek wisata bersekala mikro (individu, kelompok, dusun, atau desa) tetap dapat dikembangkan sekaligus dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah memfasilitasi dengan membangun sarana prasarana dan infrastruktur transportasi. Penggunaan dan penyaluran dana CSR dari perusahaan BUMN, BUMS, atau BUMD sangat membantu mendukung pengembangan objek wisata alternatif berbasis pemberdayaan masyarakat di DTA Danau Toba,

Daftar Pustaka

Abdul-Rauf. 2017. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan. Edisi Revisi. USU Press.

Abdul-Rauf, Rahmawaty, B. Slamet, Y. Hidayat, dan H. Santuri, 2013. Pengelolaan DAS; Sebuah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Asahan Toba. USU Press, Medan.

Abdul-Rauf, Samsuri, Rahmawaty, B.Slamet. Rahmanta, dan Supriadi. 2021. Kajian Implementasi Hasil Studi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai Asahan Hulu. LPPM USU-Perum Jasa Tirta I.

Dishut-SU, 2019. Rancangan Awal Renstra Dinas Kehutanan 2018 – 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. http://dishut.sumutprov.go.id/blog/wp-content/uploads/ 2019/11/RENSTRA-2018-2023-FULL.pdf

Gischa, S., 2022. Pengertian Agrowisata, Manfaat, dan Prinsipnya. https://www.kompas.com.

Riadi, M., 2019. Ekowisata; Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis. https://www. kajianpustaka.com/2019/12/ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html

Salim, A., Calfer, C.J.P., dan McDougall, C. 1999. Panduan Cara Pemberian Skor dan Analisis untuk Menilai Kesejahteraan Manusia. CIFOR. Bogor.

Sinukaban, N., H. Pasaribu, dan O. Siagian. 2001. Pengelolaan Danau Toba: Peluang dan Ancaman. Prosiding Seminar Nasional MKTI di Medan, 25-27 Mei 2000. Hal. 11-23.

Biodata Penulis

Abdul Rauf, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara lahir di Binjai, 17 September 1959. Pendidikan S1 (Ir.) pada Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) lulus pada tahun 1985. Pendidikan S2 (MP) juga dalam bidang Ilmu Tanah di UGM Yogyakarta, lulus pada 1994, melanjutkan pendidikan S3 (Dr.) di bidang yang sama di IPB Bogor, lulus tahun 2004. Bidang Ilmu Tanah yang didalaminya adalah Konservasi Tanah dan Air serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan telah diembannya sejak tahun 1986 (sebagai staf pengajar di beberapa PTS di Medan) dan sejak 1987 hingga sekarang sebagai staf pengajar di FakultasPertanian USU, dan sejak tahun 2004 melengkapi pengabdiannya sebagai staf pengajar di Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian USU. Selain berperan sebagai staf pengajar dan narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, penulis juga aktif menulis buku teks (ISBN) diantaranya: Dasar-Dasar Pengelolaan DAS (USU Press), Sistem Agroforestry,Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan (2011) dan edisi revisinya (2017) (USU Press, 2017), Profil Arboretum USU 2006-2008 (USU Press, 2009), Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolan Terpadu DAS Asahan Toba (USU Press); Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolan Terpadu DAS Batang Gadis (CI-Jakarta); Teknologi Pemanfaatan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS (USU Press, 2016); Tanah Sulfat Masam dan Pengelolaannya Secara Biologi (USU Press); Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan (USU Press, 2018); Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa (USU Press, 2019); Ekspedisi DAS Wampu Sumatera Utara (USU Press, 2019); Menelusuri DAS Singkil dari Hulu ke Hilir (USU Press, 2019); Budidaya Padi di Tanah Salin (UMSU Press, 2020); dan Sains Biofisik dan Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an (USU Press, 2020). Beberapa organisasi profesi yang aktif diikuti oleh penulis diantaranya sebagai Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI), Pengurus Komisariat Daerah Sumatera Utara Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Ketua Forum DAS Wampu Sumatera Utara, Pengurus Forum Koordinasi DAS Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Kabupaten Deli Serdang; Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Cendikiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) Wilayah Sumatera Utara.

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Blondina Marpaung
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya menggenjot pendapatan asli suatu daerah dan meningkatkan pemasukan devisa negara lewat sektor kepariwisataan, berbagai terobosan dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata termasuk melibatkan masyarakat yang ada di kawasan wisata.

Tahun 2019 lalu, sebanyak 20 juta wisatawan asing ditargetkan berkunjung ke Indonesia. Selama proses pembangunan sektor pariwisata, hendaknya memperhatikan dampak lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk menerapkan sustainable tourism development.

Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhatikan dampak lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, dijelaskan tentang pedoman pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yang diadaptasi dari subdefinisi UNWTO dan standarisasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Pemerintah berharap pada tahun 2030, pariwisata Indonesia telah benar-benar menerapkan sustainable tourism.

Dalam pengelolaan pariwisata hendaknya tidak memikirkan keuntungan saat ini saja, melainkan keberlanjutan jangka panjang yang sesuai dengan realitas dan ruang lingkupnya, meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, kualitas, masalah kesehatan dan keselamatan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak dari pengembangan pariwisata di suatu negara. Pariwisata yang dibangun dengan dasar mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dipandang memiliki dampak destruksi terhadap lingkungan di destinasi, baik yang bersifat alam maupun sosial budaya.

Pembangunan pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara melalui kontribusi terhadap PDB Nasional. Jika pariwisata dapat dikelola secara baik, pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal lewat pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata.

Untuk itu, dalam pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism).

Apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? World Tourism Organization (WTO) menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah "tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities".

Penjelasan tersebut dapat didefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan.

Melalui penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep yang dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat.

WTO dan United Nations Environment Program (2005) juga telah merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Economic Viability, memastikan kelangsungan dan daya saing destinasi wisata sehingga mereka dapat menerima manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
2. Local Prosperity, memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di lingkungan destinasi.
3. Employment Quality, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas/terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, termasuk juga dalam hal penerimaan upah, kesetaraan gender maupun ras.
4. Social Equity, memberikan distribusi yang luas dan adil dari manfaat ekonomi maupun sosial, termasuk juga meningkatkan peluang keterlibatan, pendapatan, dan layanan.
5. Visitor Fulfillment, untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, termasuk juga adanya pertukaran pengetahuan di dalam kegiatan wisata.
6. Local Control, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencananaan maupun pengambilan keputusan mengenai pengelolaan atau pengembangan pariwisata.
7. Community Wellbeing, menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal, termasuk struktur sosial dan akses sumberdaya, fasilitas, dan sistem pendukung kehidupan.
8. Cultural Richness, menghormati dan meningkatkan kepedulian akan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan dari komunitas tuan rumah di destinasi wisata.
9. Physical Integrity, menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap destinasi, baik perkotaan maupun pedesaan.
10. Biological Diversity, mendukung segala bentuk sistem konservasi kawasan alam, habitat, dan margasatwa.

11. Resource Efficiency, meminimalkan penggunaan sumberdaya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan maupun pengoperasian fasilitas pariwisata.
12. Environmental Purity, meminimalkan pencemaran udara, air, dan tanah serta timbunan limbah oleh destinasi wisata dan wisatawan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, terdapat 4 (empat) pilar utama dalam pengembangan pariwisata.

Pilar ini juga menjadi kriteria yang telah dirumuskan oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (Global Sustainable Tourism Council), yang mencakup:

1. Pengelolaan destinasi parwisata berkelanjutan (Sustainability Management)
2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (Social-Economy)
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (Culture)
4. Pelestarian lingkungan (Environment)

Empat pilar di atas sejatinya sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Kepariwisataan kita, di mana kinerja pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam/lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa serta identitas bangsa sehingga dapat mempererat kesatuan.

2. Masalah

Pembangunan sektor kepariwisataan ke depan perlu melibatkan warga masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata. Pembangunan menimbulkan perubahan keadaan dan pergeseran peran pelaku, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Pembangunan kepariwisataan juga seringkali melupakan penyelamatan lingkungan di sekitarnya.

Dalam prakteknya di lapangan, masyarakat seringkali melupakan standar pelayanan dan kebersihan makanan yang disajikan menyebabkan wisatawan enggan untuk datang kedua kalinya ke lokasi yang sama.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri unik serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut:

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional.
2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas- komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.
3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pemberdayaan masyarakat pariwisata merupakan konsep yang mudah dilontarkan tertapi sangat sulit untuk dilaksanakan, karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistis dan terus menerus untuk digali dan diberdayakan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kaum manula (masyarakat lanjut usia) harus ikut dilabatkan dan dipahamkan.

Diberdayakan dalam arti filosofi hidup di masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perefektif, Pertama; pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua; partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri.

5. Rencana Tindak Lanjut

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Oleh karena pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat juga tetap berpedoman pada WTO dan United Nations Environment Program (2005) yang telah merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemberdayaan juga diharapkan dapat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepedulian dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan memperhatikan filosofi hidup di masyarakat perlu diarahkan dan diperhatikan, agar sesuai dengan filosofi pembangunan kepariwisataan karena apabila belum selaras akan menjadi ganjalan dan kendala. Mindset masyarakat dalam memandang tamu atau wisatawan harus diubah yang tadinya wisatawan sebagai saingan diubah menjadi aset dan sumber kehidupan.

Perlu disadarkan bahwa wisatawan yang datang adalah masyarakat yang membawa biaya/uang yang akan dibelanjakan dan dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Harus ditanamkan pada masyarakat bahwa tamu atau turis merupakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mempunya kewajiban untuk menghormati dan melayani agar tamu menjadi betah dan berlama-lama tinggal di tempat wisata.

Upaya lainnya adalah membenahi pendidikan sebagai media yang ampuh untuk menyiapkan generasi muda untuk melayani dan memenuhi kebutuhan informasi bagi wisatawan, baik informasi mengenai kondisi fisikal daerah maupun kultural yang berkembang di masyarakat.

Pendidikan yang ditekankan adalah pendidikan yang dapat memelihara kelestarian objek dan budaya, agar menjadi aset dan jasa yang bisa dijual. Banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata. Bentuk pendidikan yang perlu dikembangkan baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Untuk dapat menjelaskan kepada wisatawan secara lengkap dan benar maka diperlukan pengetahuan dan ilmu yang cukup mengenai berbagai kondisi alam dan historisnya, sehingga menjadi bekal dan pengetahuan yang berguna bagi pengunjung.

Yang tak kalah pentingnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kunci pengembangan kepariwisataan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan.

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

Masalah sikap/tata krama juga sangat berkaitan dengan filosofi yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu apa bila filosofinya sudah disesuaikan maka sikap dan tata kramanya pun akan sesuai. Masyarakat yang ada di sekitar objek atau tempat wisata ibarat tuan rumah yang sedang menerima tamu. Apabila tuan rumah memiliki sikap dan tata krama yang baik akan menyebabkan tamu menjadi betah dan mau tinggal berlama- lama di tempat wisata.

Banyak kalangan yang memandang jika pariwisata berkembang maka aturan bermasyarakat semakin longgar dan rusak. Pandangan semacam ini keliru dan perlu diluruskan, mestinya aturan bermasyarakat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata, dan kadang-kadang wisatawan merasa tertarik dan ingin mempelajari aturan bermasyarakat yang dipegang teguh.

Tidak berarti memaksa wisatawan untuk mengikuti aturan bermasyarakat yang ada di tempat wisata, tetapi menjadi media pendidikan bagi para wisatawan akan kemuliaan dan keunggulan aturan bermasyarakat yang dikembangkan.

Sama halnya dengan adat istiadat yang ada adalah merupakan aset wisata, sehingga adat yang baik perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan. Misalnya berbagai kepercayaan atau upacara yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat. Banyak wisatawan yang ingin datang ke suatu lokasi wisata yang hanya tertarik oleh berbagai keunikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Adat biasanya muncul tidak serta-merta melainkan merupakan suatu hasil proses kehidupan bermasyarakat yang cukup panjang sepanjang kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga mengandung berbagai filosofi hidup dan mengandung nilai-nilai pendidikan yang luar biasa.

Dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, masyarakat juga perlu memperhatikan penampilan, karena penampilan ini merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman dan pengetahuan termasuk keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, cerminan dari akumulasi tersebut akan nampak berupa penampilan sikap dan aura jiwa dari masyarakat tersebut.

Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan yang ada juga merupakan suatu daya tarik yang tidak kalah pentingnya dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dipertahankan terutama penampilan yang membuat wisatawan merasa aman, tenteram, dan menimbulkan semangat hidup untuk berkarya dan bersikap ke arah yang lebih baik.

6. Kesimpulan dan Saran

Secara umum peran masyarakat lebih menitikberatkan kepada partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan

pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik.

Pada dasarnya tidak semua masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat digali adalah partisipasi dibidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat.

Peran masyarakat yang lain adalah memiliki fungsi pada kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan kepariwistaan. Dalam pengelolaan pariwisata hendaknya tidak memikirkan keuntungan saat ini saja, melainkan keberlanjutan jangka panjang yang sesuai dengan realitas dan ruang lingkupnya, meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, kualitas, masalah kesehatan dan keselamatan.

Daftar Pustaka

Atma Ras, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. SOCIUS XIV, 56–63.

Badan Pusat Statistik, 2019. Berita Resmi Statistik No.12/02/Th.XXII: Perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2018. Jakarta.

Pilliang, Yasraf Amir, 1998, Dunia Yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme, Bandung: Mizan.

Salim, Emil, l983, Manusia dan Lingkungan Hidup, dalam M. Soerjani dan Bahrin Samad (ed), Manusia dalam Keserasian Lingkungan, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekadijo,R.G., 2000, Anatomi Pariwisata, Jakarta Gremedia Pustaka Utama

Santosa, SP. 2001. Bahan Paparan untuk Gubernur Bali. Mimeo

Todaro, Michael, P, 1989, Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga, Erlangga Jakarta.

Tjokrowinoto, M. 2005. Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press:53.

UNEP (United Nation Environment Programme). 2002. Industry as Patner for Sustainable Development: Tourism. UK: UNEP.

WTO (World Tourism Organisation). 2004. Tourism Barometer. Madrid: WTO

Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers. UNEP and UNWTO. 2005. p.11-12

Konsep Pariwisata Berkelanjutan, https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan/

Biodata Penulis

Prof. Dr. dr. Blondina Marpaung, Sp.PD-KR merupakan Guru Besar Tetap Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU. Lahir di Kuala Simpang, 25 Maret 1962 anak pertama dari pasangan Alm. Prof. dr. Boloni, Sp. PD, K-GEH dan Masnida Ritonga, B. Sc. Menjalani Pendidikan di SD Immanuel Medan (lulus tahun 1974). SMP Immanuel Medan (lulus tahun 1977) dan SMA Negeri1 Medan (lulus tahun 1981). Memperoleh gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 1988). Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Program Studi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU (2000). Meraih gelar Konsultan Reumatologi (2004). Meraih gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2010) dan memperoleh jabatan Guru Besar sejak tanggal 1 Juni 2022. Menjabat sebagai Ketua Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam (2021 – Sekarang) dan Ketua *Indonesian Rheumatology Association* (IRA) cabang Medan. Menjadi anggota dan pengurus di berbagai organisasi profesi antara lain : Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA), Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI), *Asia Pacific League of Associations for Rheumatology* (APLAR), dan *International Osteoporosis Foundation* (IOF). Aktif melakukan berbagai penelitian dan kerjasama di dalam dan luar negeri, publikasi ilmiah, mengikuti seminar dan menjadi moderator, pembicara ilmiah dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan dijalani di dalam maupun luar negeri seperti "*Intensive Course in Muskuloskeletal Ultrasound*" di Jakarta (2008) , *Pre Congress Workshop : Interventional pain Workshop and Refresher Course 3rd Congress Association of Southeast ASIAN Pain Societies and Neuropathic Pain Special Interest Group* di Bali (2009), *Advanced Course and Workshop Latest Therapeutic Development in The Management of RA* di Jakarta (2012), dan Berpartisipasi dalam *ISCD Densitometry course the 4th PERDOSI* di Jakarta (2012). Disertasi beliau yang berjudul *The Application of Biochemical Marker Hyaluronic Acid serum for Assessing Therapeutic Effect of Diacerein* berhasil publish disebuah jurnal *The EULAR JOURNAL, Annals of the Rheumatic Disease* (*June 2011. Vol 70 Supplement 3*). Beliau juga mendapatkan HKI dan telah mendapatkan sertifikat paten obat Reumatik Asam Urat yang mengandung Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida Rhombifolia L*) sejak 10 September 2020 melalui Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Elmeida Effendy
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Kepariwisataan, menurut Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin dan muncul sebagai wujud kebutuhan setiap individu dan negara, serta interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Kementrian Pariwisata, 2009).

Secara praktek telah membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata telah menjadi cara penting bagi daerah miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan merupakan model pembangunan daerah yang mendorong daerah miskin dengan sumber daya pariwisata yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai kemakmuran. Pengentasan kemiskinan dengan pariwisata adalah pendekatan pembangunan khusus sehingga terdapat sinergi dan hubungan yang baik antara pembangunan pariwisata dan pengentasan kemiskinan, yang akan menimbulkan dampak yang penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah miskin serta mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan (Wang and Cai, 2022; Yang et al., 2021).

Secara khusus, pariwisata internasional dipandang sebagai alat pengentasan kemiskinan di negara-negara kurang berkembang melalui sarana integrasi ekonomi dan globalisasi. Pertama, pariwisata internasional mendorong pengembangan infrastruktur domestik dan menciptakan banyak lapangan kerja lokal. Selain itu, pariwisata internasional juga membantu akumulasi sumber daya manusia dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, khususnya di sektor jasa. Lebih penting lagi, pariwisata internasional merangsang terjadinya diversifikasi ekonomi, perubahan struktur dan tertiarisasi (Lagos and Wang, 2023).

Pariwisata telah memainkan peran yang semakin vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara meningkat 12,58% menjadi 15,81 juta, dengan kontribusi kas asing sebesar USD 16,1 miliar. Wisatawan domestik melakukan 303,4 juta perjalanan pada tahun yang sama, meningkat 12,37%, dengan total pengeluaran Rp. 291 triliun dan peningkatan belanja sebesar 17,9%. (Badan Pusat Statistik, 2019; Kementrian Pariwisata, 2019). Universitas Sumatera Utara (USU) telah

berkomitmen untuk memberikan advokasi bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. USU menjadi satu-satunya *Sustainable Tourism Observation* (STO) di Sumatera oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) (Evalisa Siregar, 2018).

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada kata *empowerment* yang berarti "penguatan" dan merupakan upaya untuk memenuhi potensi yang telah dimiliki masyarakat. Untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan mencapai potensinya secara maksimal, diperlukan suatu struktur organisasi yang mampu mengelolanya. Dalam wacana kehidupan sosial, konsep pemberdayaan senantiasa dikaitkan dengan konsep kemandirian dan diposisikan pada level kapasitas individu dan sosial. Pemberdayaan telah didefinisikan sebagai proses seseorang membuat keputusan dan kemudian secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang yang telah mencapai tujuan bersama diberdayakan oleh kemandirian mereka; bahkan lebih penting lagi bagi mereka untuk diberdayakan dengan upaya mereka sendiri, perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lain untuk memenuhi tujuan mereka (Aslinda et al., 2021; Atma Ras, 2013).

Pendekatan yang diharapkan adalah pendekatan dimana individu dapat diposisikan sebagai subjek daripada objek. Pemberdayaan adalah konsep yang memperluas kebebasan seseorang untuk memilih dan bertindak. Kebebasan ini sangat dibatasi bagi orang miskin karena ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka dan ketidakberdayaan mereka terhadap negara dan pasar. Karena kemiskinan memiliki banyak segi, orang miskin membutuhkan keterampilan baik secara individu (seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) maupun kolektif (seperti bekerja sama untuk memecahkan masalah). Orang yang tidak berdaya dan anggota masyarakat miskin harus diberdayakan melalui proses pemberdayaan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapatkan sumber daya, dan mengubah cara pandang mereka. Sebaliknya, kelompok yang memiliki sumber kekuatan ini (kelompok dominan) harus mau berbagi pengetahuan, informasi, dan sumber daya dengan kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini berusaha untuk meringankan emosi ketidakberdayaan (impotensi) orang miskin ketika terlibat dengan struktur sosial dan politik. (Aslinda et al., 2021; Atma Ras, 2013).

Kemiskinan juga dikaitkan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental individu dibentuk oleh kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi di mana mereka dilahirkan, tumbuh, bekerja dan menua. Kemiskinan dan kekurangan sumber daya adalah penentu utama perkembangan sosial dan perilaku anak-anak serta kesehatan mental pada orang dewasa (Knifton and Inglis, 2020). Ekonomi dan kesehatan mental saling terkait dalam berbagai cara. Ekonomi menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Kemiskinan yang berdampak pada kesehatan mental bersifat dua arah dan kompleks. Di satu sisi, kesehatan mental juga memberikan dampak yang besar terhadap sistem ekonomi melalui konsekuensinya yang merusak,

seperti hilangnya produktivitas dan penggunaan sumber daya yang lebih berat. Di sisi lain, kerugian ekonomi dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya penyakit mental yang lebih besar yang disebabkan paparan terhadap faktor risiko (misalnya pengucilan sosial) dan akses yang lebih buruk ke faktor pendukung (misalnya pendidikan), atau spiral ke bawah yang kompleks (misalnya keterikatan kemiskinan, biaya perawatan, dan kesulitan pekerjaan) (Knapp and Wong, 2020).

2. Masalah

Pengaruh dinamis pariwisata terhadap kemiskinan terkait dengan manfaat jangka panjang pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemulihan misi. Pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di Indonesia masih jauh dari harapan dan cita-cita bangsa. Adanya kebijakan pembangunan di industri pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, belum sepenuhnya terwujud sehingga berdampak pada minimnya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan, di sisi lain, tetap meluas, yang berdampak signifikan pada kegiatan dan ambisi pengentasan kemiskinan. (Heri Wahyudi, 2019; Zainuri et al., 2021).

3. Pemikiran pemecahan masalah

Pariwisata di Indonesia kini telah menjadi salah satu tumpuan perekonomian negara. Indonesia kini telah menjadi tujuan wisata yang terkenal tidak hanya di kalangan wisatawan lokal, tetapi juga di kalangan individu dari seluruh dunia. Perkembangan pariwisata berjalan seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan kawasan wisata tersebut untuk mendukung infrastruktur pariwisata setempat. Namun, keberadaan dan perkembangan pariwisata saat ini belum mampu memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat setempat. Banyak provinsi yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih dikuasai oleh investor.

4. Strategi pemecahan masalah

Penggunaan *Community Based Tourism* (CBT), yang merupakan konsep wisata berbasis komunitas, merupakan konsep turisme dimana masyarakat diberdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. CBT memberikan berbagai manfaat, antara lain:

a. membentuk pariwisata, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk mengontrol dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
b. orang yang tidak terlibat langsung dalam keuntungan usaha pariwisata; dan

c. menuntut pemberdayaan politik, demokratisasi, dan distribusi manfaat bagi masyarakat tertinggal di pedesaan.

CBT mengutamakan pendekatan pengembangan pariwisata yang mengutamakan masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri pariwisata) berupa pemberian kesempatan (akses) dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, yang mengarah pada pemberdayaan politik melalui kehidupan yang lebih nyaman, termasuk berbagi manfaat dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat setempat.

Gagasan untuk mengadopsi CBT terkait dengan manfaat yang diterima dan adanya kegiatan perencanaan bantuan yang berpihak pada komunitas lokal dan organisasi lain yang memiliki kepentingan/kepentingan, sehingga menawarkan kontrol yang lebih baik atas proses sosial dalam mencapai kesejahteraan. Setiap komunitas harus didorong untuk mengembangkan tujuannya sendiri dan inisiatif wisata langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, diperlukan perencanaan sedemikian rupa sehingga masalah sosial dan lingkungan dipertimbangkan, dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan sekaligus memprioritaskan manfaat positif bagi penduduk lokal (A'inun et al., 2015).

5. Rencana Tindak Lanjut

Perwujudan dari penerapan konsep CBT adalah pertumbuhan pariwisata, dimana individu dalam industri pariwisata akan mengembangkan potensinya, baik dari segi sumber daya alam, budaya maupun sumber daya manusia/masyarakat lokal Pengembangan dan penerapan CBT harus memperhatikan berbagai dimensi seperti :

1. Dimensi ekonomi: dana menjadi sumber utama penting pada setiap penerapan suatu sistem yang diharapkan dapat mengembangkan masyarakat, terciptanya lapangan kerja khususnya di sektor pariwisata, dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat dari sektor pariwisata yang dikelola.
2. Dimensi sosial: menciptakan lingkungan sosial yang baik dan nyaman akan membangun penguatan organisasi komunitas yang memberikan dampak baik terutama dalam sektor pariwisata. Hal ini dapat berupa upaya-upaya dalam peningkatan kualitas hidup, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan komunitas.
3. Dimensi budaya: adanya keanekaragaman budaya menjadi penilaian penting dalam menerapkan CBT. Masyarakat diarahkan untuk menghormati perbedaan budaya, membantu perkembangan pertukaran budaya, juga pembangunan budaya yang melekat dalam budaya lokal setempat.
4. Dimensi lingkungan: kemampuan daya dukung lingkungan atau yang disebut pula dengan *Carrying Capacity Area* yang berarti kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kehidupan makhluk yang ada

didalamnya secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh 3 faktor berupa ketersediaan makanan, jumlah populasi, dan jumlah makanan di dalam suatu lingkungan. Masyarakat juga dapat dipaparkan dengan pengaturan pembuangan sampah, peningkatan kepedulian, dan jalinan kerjasama dalam upaya peningkatan sector pariwisata.

5. Dimensi politik: masyarakat setempat atau penduduk lokal diharapkan berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai upaya termasuk dalam bidang politik sehingga dapat mewujudkan harapan pengembangan suatu sektor pariwisata berupa jaminan hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan adanya peningkatan dalam memegang kekuasaan di komunitas.

6. Kesimpulan dan saran

Praktek telah membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata telah menjadi cara penting bagi daerah miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan merupakan model pembangunan daerah yang mendorong daerah miskin dengan sumber daya pariwisata yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai kemakmuran. Terjadinya kemiskinan juga telah dikaitkan dengan terganggunya kesehatan mental. Kesehatan mental individu dibentuk oleh kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi tempat mereka dilahirkan, tumbuh, berkembang, bekerja dan menua. Akibatnya, masyarakat harus didorong untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah mereka dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Perencanaan dan bisnis pariwisata harus berfokus pada wisatawan lokal dan asing, serta penduduk setempat. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pariwisata diharapkan menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan kemiskinan, sehingga seiring dengan perbaikan ekonomi, kehidupan semakin baik dan memberi dampak terhadap terbentuknya kesehatan mental yang baik pula.

Daftar Pustaka

A'inun, F., Krisnani, H., Darwis, R.S., 2015. Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. Prosiding Ks: Riset & Pkm 2, 301–444.

Arifin, A.P.R., 2017. Pendekatan Community Based Tourism dalam Membina Hubungan Komunitas di Kawasan Kota Tua Jakarta. Jurnal Visi Komunikasi 16, 111–130.

Aslinda, A., Zainal, H., Siraj, M.L., 2021. Reducing poverty through community empowerment with integrated coconut product program in Bujjulu District of Gowa Regency. Linguistics and Culture Review 6, 57–64. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS1.1901

Atma Ras, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. SOCIUS XIV, 56–63.

Badan Pusat Statistik, 2019. Berita Resmi Statistik No.12/02/Th.XXII: Perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2018. Jakarta.

Evalisa Siregar, 2018. USU jadi pengamatan pariwisata berkelanjutan [WWW Document]. ANTARA Sumut.

Heri Wahyudi, 2019. Pariwisata, Pengentasan Kemiskinan Dan MDGs. UPBJJ-UT.

Kementrian Pariwisata, 2019. Siaran Pers: Menpar proyeksikan devisa pariwisata akan tembus 18 miliar dolar AS.

Kementrian Pariwisata, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 .

Knapp, M., Wong, G., 2020. Economics and mental health: the current scenario. World Psychiatry 19, 3–14. https://doi.org/10.1002/wps.20692

Knifton, L., Inglis, G., 2020. Poverty and mental health: policy, practice and research implications. BJPsych Bull 44, 193–196. https://doi.org/10.1192/bjb.2020.78

Lagos, K., Wang, Y., 2023. International Tourism and Poverty Alleviation: Cross-Country Evidence Using Panel Quantile Fixed Effects Approach. J Travel Res 62, 1347–1371. https://doi.org/10.1177/00472875221119978

Wang, X., Cai, P., 2022. The relationship between tourism development and multidimensional poverty reduction: A decoupling analysis. Qual Quant 56, 2501–2518. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01233-4

Yang, J., Wu, Y., Wang, J., Wan, C., Wu, Q., 2021. A Study on the Efficiency of Tourism Poverty Alleviation in Ethnic Regions Based on the Staged DEA Model. Front Psychol 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.642966

Zainuri, Z., Priyono, T.H., Varazizah, A., 2021. Dampak Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 8, 138. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i2.26771

Biodata Penulis

Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, MKed, Sp.KJ (K) lahir di Leiden (Holland), 1 Mei 1972. Menyelesaikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1997. Melanjutkan spesialisasi Kedokteran Jiwa sebagai psikiater (Sp.KJ) di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2004. Lulus sebagai Magister Kedokteran Klinik (S2) dengan gelar MKed di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Lulus S3 (Doktor) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) tahun 2013. Memperoleh konsultan Psikiatri Biologik oleh Kolegium Psikiatri Indonesia tahun 2014. Saat ini penulis telah menghasilkan berbagai penelitian,artikel, karya tulis yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional dan buku terkait masalah kejiwaan. Penulis juga aktif di dalam kegiatan seminar, simposium, workshop baik sebagai narasumber, instruktur, moderator maupun peserta. Pernah mendapat berbagai penghargaan antara lain *Special Research Award* 7 *Schizophrenia National Conference* 2014, *Travel Award* 11th *Annual Meeting of JSSR*, Gunma, Japan2016, Ketua Program Studi Berprestasi 2016,Tanda Kehormatan Satyalancana Kaya Satya X Tahun 2017, *Best Presentation Award* ICPPD 2017 : 19 th International Conference on Psychiatry and Psychiatric Disability, Kuala Lumpur Malaysia, Academic Leader 2018, Top 500 Author Sinta Award 2020. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Optimalisasi Telepsikiatri dalam Sinergisme Aspek Tridarma PerguruanTinggi di *Era Society* 5.0.

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Erika Revida
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah musuh besar masyarakat dan bangsa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya menjadi miskin. Demikian halnya dengan manusia Indonesia selalu ingin hidupnya sehat dan sejahtera, berkecukupan serta jauh dari kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya dengan membuat program dan kegiatan agar masyarakatkan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tertulis bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dijamin oleh negara. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat dijamin oleh pemerintah. Fakir miskin dan anak anak terlalu merupakan tanggung jawab pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat baik melalui pelatihan maupun bantuan dana yang signifikan setiap tahun dan sebagainya.

Sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini tampak dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang tujuan kepariwisataan yang ketiga yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Menghapus kemiskinan
d. Mengatasi pengangguran
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
f. Memajukan kebudayaan
g. Mengangkat citra bangsa
h. Memupuk rasa cinta tanah air
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Sedemikian luasnya tujuan sektor pariwisata bagi kehidupan masyarakat termasuk menghapus kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan kepariwisataan di Indonesia yaitu dengan konsep *sustainable tourism.*

Sustainable tourism adalah pariwisata berkelanjutan. *Sustainable tourism* adalah penjabaran dan berupaya mengadopsi pendekatan dari *sustainable development (*Ruhanen, 2013). Dengan demikian tujuan dan prinsip-prinsip *sustainable development* juga dianut dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* adalah pariwisata

yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan kebutuhan generasi di masa yang akan datang (Helmy dan Cooper, 2008).

Sustainable tourism sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah unsur utama dalam implementasi *sustainable tourism* (Cole, 2006; Pencarelli, Cerquetti dan Splendiani, 2016; Scheyvens, 2002). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan pemberdayaan masyarakat.

Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat terutama ditujukan agar masyarakat secara mandiri mampu melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan. Namun dalam kenyataannya hingga kini, penurunan angka kemiskinan masih belum mencapai angka dan harapan yang diinginkan terutama di desa. Untuk itulah tulisan ini diangkat yang membahas keterkaitan *sustainable tourism* dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar bagi pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terjadi antara lain disebabkan sebahagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama seperti sandang, pangan dan papan.

Selain itu, masyarakat yang miskin pada umumnya menghadapi masalah kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan kesehatan anak-anak dan keluarganya, investasi hingga kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik lainnya.

Masalah kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan kejahatan masyarakat, merupakan “lingkaran setan” dan “gunung es” yang harus ditanggulangi pemerintah dan masyarakat dengan segera. Edward dan Azhar (2019) menyatakan kemiskinan sangat rawan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sesungguhnya, kemiskinan masyarakat terjadi bukanlah tanpa sebab. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan antara lain Sharp (1996) mengajukan penyebab kemiskinan dari segi ekonomi yaitu:

a) Secara mikro, kemiskinan muncul antara lain disebabkan ketidaksetaraan jumlah dan pola kepemilikan sumber daya yang dimiliki dan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Masyarakat yang miskin memiliki keterbatasan sumber daya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dan sebaliknya.
b) Kemiskinan disebabkan perbedaan kapabilitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada rendahnya produktivitas yang dimiliki yang berdampak pada rendahnya pendapatan atau gaji yang diterima. Pada umumnya kualitas sumberdaya manusia yang rendah

disebabkan pendidikan yang rendah dan sebaliknya. Sementara, standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat.

c) Kemiskinan disebabkan perbedaan akses terhadap modal yang dimiliki. Minimnya akses terhadap modal yang dimiliki masyarakat menjadi penyebab terbatasnya peran serta masyarakat di bidang ekonomi.

Di sisi lain, Prayoga et al. (2021), menyatakan penyebab kemiskinan antara lain adalah taraf hidup masyarakat yang buruk, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, dan upah minimum yang tidak memadai. Sementara upah minimum dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Todaro dan Stephen, 2014).

Pangiuk (2018) menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Namun yang terjadi adalah masih banyaknya jumlah manusia yang menganggur. Pengangguran antara lain disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

Jika dikaitkan dengan pengangguran, maka penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi alamiah seseorang seperti lanjut usia, cacat fisik atau mental, sehingga tidak dapat bekerja dengan baik.
b. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia karena budaya masyarakat tertentu seperti malas, tidak punya niat bekerja, tergantung pada orang harta warisan tua dan sebagainya.
c. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kesalahan struktur atau sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Struktur atau sistem yang diciptakan Negara/daerah membuat masyarakat tidak berdaya sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi miskin (Mulyadi, 2017).

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Zikrullah (2000) menyatakan kemiskinan dimaknai sebagai permasalahan pendapatan, sedangkan Hardinandar (2019) menyatakan kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Dengan demikian, kemiskinan adalah sebuah situasi serba kekurangan yang dimiliki dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat.

Pengentasan kemiskinan sudah menjadi salah satu tujuan dari era *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2000 dan dilanjutkan dengan gerakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga tahun 2030. Adapun tujuan SDGs hingga tahun 2030 adalah untuk (1) Tanpa Kemiskinan

dilanjutkan dengan tujuan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, (5) Kesetaraan Gender, (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Wahyuningsih, 2018).

Sustainable tourism adalah *"tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities" (*UNEP, 2005*).* Hirotsune (2011) menyatakan *sustainable tourism* sebagai *"tourism that meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing the opportunity for the future". WTO articulates that sustainable tourism is the tourism that leads to the management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support systems. Sustainable tourism,in its purest sense, is an industry that attempts to make a low impact on the environment and local culture, while helping to generate income, employment, and the conservation of local ecosystems. It is a responsible tourism that is both ecologically and culturally sensitive. Thus, sustainable tourism activities have minimal impact on the environment and culture of the host community.*

Sustainable tourism adalah turunan dari *Sustainable Development Goals (SDGs).* Dengan demikian, sebahagian tujuan SDGs menjadi tujuan *sustainable tourism* antara lain pengentasan kemiskinan. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tertulis bahwa kinerja pembangunan pariwisata berkelanjutan *(sustainable tourism)* diukur bukan hanya melalui manfaatnya dalam meningkatkan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan angka kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, pelestarian budaya dan menjaga keaslian identitas bangsa.

Sesungguhnya, inti dari *sustainable tourism* adalah menjaga keberlangsungan antara kelestarian lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan perkataan lain, *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang dapat menjaga keberlangsungan dan memperhitungkan kehidupan sosial, ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang bagi seluruh masyarakat setempat dan wisatawan yang datang berkunjung. Oleh karena itu, *sustainable tourism* dan pemberdayaan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam implementasi *sustainable tourism* ada beberapa hal yang harus dipatuhi. UNEP (2005) menyarankan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam *sustainable tourism*, yaitu:

a. Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen utama dari pembangunan kepariwisataan, menjaga keutuhan ekologi dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
b. Menghargai karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisi, serta berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
c. Menjamin keberlanjutan usaha, menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang terdistribusikan secara merata bagi para pemangku kepentingan, termasuk berupa kesempatan kerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan, tersedianya pelayanan dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan

Ada beberapa strategi pemecahan masalah yang diajukan dalam rangka mewujudkan *sustainable tourism* dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
   Pada umumnya kendala dalam mewujudkan *sustainable tourism* adalah kualitas sumber daya manusia pariwisata. Sumber daya manusia pariwisata pada umumnya belum menyadari akan pentingnya dampak dari pariwisata sehingga kurang menjaga dan meningkatkan kualitas destinasi wisata itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Effendi (2018). Pariwisata adalah bersifat pelayanan (jasa) yang diberikan oleh SDM pariwisata. Oleh karena peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata adalah sangat penting dalam mewujudkan sustainable tourism yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keuangan pariwisata.
   Keuangan pariwisata menjadi masalah apabila tidak atau kurang mencukupi operasionalnya. Hal ini sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila pemerintah setempat dan masyarakat mengalokasikannya dari dana desa yang setiap tahun selalu meningkat secara signifikan.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya alam pariwisata.
   Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi wisata yang sangat besar seperti potensi bahari, flora dan fauna serta sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam pariwisata di Indonesia sesungguhnya tidak kalah dengan sumber daya alam pariwisata yang dimiliki oleh negara-negara lain. Destinasi wisata Indonesia yang mempesona dan eksotis, bahari flora dan fauna serta kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat belum dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu peningkatan

kualitas sumber daya alam pariwisata perlu lebih ditingkatkan, dieksplor dan dikembangkan baik secara kuantitas dan kualitasnya.

5. Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal (Simanjuntak, 2000). Demikian halnya dengan sustainable tourism akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan peran utama dari pemerintah daerahnya. Oleh karena itu sangat diperlukan rencana tindak lanjut dari pemerintah setempat baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Rencana tindak lanjut dalam hal ini adalah upaya yang nyata dalam mewujudkan *sustainable tourism* dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengentaskan kemiskinan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
   Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan yang ajek dan berkesinambungan dengan memberikan sertifikasi bagi SDM pariwisata yang lulus berdasarkan ujian kompetensi pelayanan pariwisata. Selain itu SDM pariwisata perlu melakukan studi banding ke destinasi wisata yang telah berhasil atas dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (masyarakat) pariwisata.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya keuangan pariwisata.
   Rencana tindak lanjut dalam meningkatkan sumber daya keuangan pariwisata untuk mewujudkan *sustainable tourism* antara lain dapat dilakukan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sistem gotong royong. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di setiap desa dapat diberdayakan untuk membiayai pelaksanaan *sustainable tourism* dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di desa. BUMDes dikelola secara profesional layaknya mengelola sebuah perusahaan.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya alam (lingkungan) pariwisata.
   Sustainable tourism tidak boleh merusak lingkungan. Sementara tidak dapat dipungkiri pariwisata dapat berdampak positif dan negatif. Dampak negatif yang seringkali terjadi adalah merusak ekosistem lingkungan sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat agar pariwisata tidak merusak lingkungan seperti limbah, sampah yang menumpuk atau berserakan, penebangan hutan yang ilegal dan sebagainya. Untuk itu perlu diterapkan rewards and punishment. Rewards diberikan kepada penggiat wisata yang menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan, dan punishment untuk masyarakat atau penggiat wisata yang merusak lingkungan sehingga ada efek jera dan *sustainable tourism* pun terlaksana dengan baik.

6. Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemerintah dan masyarakat serta penggiat wisata perlu mendukung dan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan s*ustainable tourism* untuk mengentaskan kemiskinan.
b. Pemerintah dan masyarakat serta penggiat wisata secara bersama sama perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta memberikan sertifikasi sumberdaya manusia pariwisata.
c. Pemerintah dan masyarakat serta penggiat wisata secara bersama sama meningkatkan kualitas sumber daya keuangan pariwisata baik secara swadaya dan sdawana berbasis gotong royong, maupun dengan memanfaatkan Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes) berbasis pariwisata yang bersumber dari dana desa.
d. Pemerintah dan masyarakat serta penggiat wisata secara bersama sama meningkatkan kualitas sumber daya alam (lingkungan) dengan menerapkan *rewad and punishment* agar ada efek jera bagi yang merusak ekosistem lingkungan alam.

Daftar Pustaka

Cole, S. (2006). Cultural tourism, community participation and empowerment. Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re) presentation, pp.89-103.

Edwart, A.O. and Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(3), pp.759-768.

Effendi, M.N. (2018). Pentingnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Objek Wisata Pantai Papaliseran Kabupaten Kepulauan Aru. Tourism, Hospitality and Culinary Journal, 2(2), pp.26-35.

Handayani, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Medan).

Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(1), pp.1-12.

Hirotsune, K.I.M.U.R.A. (2011). March. Tourism, sustainable tourism and ecotourism in developing countries. In Proceedings of the ANDA international conference, nagoya, Japan (pp. 5-7).

Mulyadi, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. Kajian, 21(3), pp.221-236.

Murdiyana, M. and Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, pp.73-96.
Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 2(2), pp.44-66.
Pencarelli, T., Cerquetti, M. and Splendiani, S. (2016). The sustainable management of museums: an Italian perspective. Tourism and hospitality management, 22(1), pp.29-46.
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Prayoga, M.L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
Ruhanen, L. (2013). Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development?. Journal of Sustainable Tourism, 21(1), pp.80-98.
Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(3), pp.390-399.
Scheyvens, R. (2002). Tourism for development: Empowering communities. Pearson Education.
Sharp, A.M., Register, C.A., dan Grimes, P.W. (2006). Economics of Social Issues. New York: McGraw Hill
Simanjuntak, R. (2000). Decentralization and Local Autonomy. Makalah Workshop Otonomi Daerah. Jakarta: Kerjasama LPEM- UI dan IRIS
Todaro, M.P. and Stephen, C. (2014). Economic Development ke-11. Boston (US): Pearson.
Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Sekretariat Negara.
UNEP, W. (2005). Making tourism more sustainable: a guide for policy makers.[pdf] Available at: http://www. unep. fr/shared/publications/pdf. DTIx0592xPATourismPolicyEN. pdf [Accessed 5 January 2014].

Biodata Penulis

Prof. Dr. Erika Revida, MS lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan dan pada saat ini memiliki H-Index scopus 3, H-Index google scholar 24. Banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional serta penulis 40 buku yang diterbitkan secara nasional terutama bidang pariwisata, pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, manajemen pelayanan publiK, dan badan usaha milik desa (BUMDes).

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Evawany Y. Aritonang
Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Latar Belakang

Sustainable Tourism atau biasa disebut dengan pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang menciptakan keuntungan untuk ekonomi, sosial, kebudayaan dan lingkungan alam pada sebuah destinasi yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Program *sustainable tourism* bertujuan sebagai penerapan konsep wisata yang memperhatikan keberlanjutan bagi semua pihak baik itu pemilik tempat wisata, para wisatawan, sumberdaya manusia yang turut mendukung kelancaran usaha pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan destinasi wisata yang berperan besar menggunakan konsep tersebut yang tidak hanya menekankan pada pemaksimalan keuntungan dari sisi pendapatan penghasilan namun lebih mengedepankan aspek non profit diantaranya mampu menjaga keseimbangan ekosistem destinasi wisata serta menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan dan keamanan masyarakat luas (Ardijanto, 2018).

Aspek berkelanjutan juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan keikhlasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Widiati & Permatasari, 2022).

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan *trend* yang cukup tinggi, hal ini di pengaruhi oleh berbagai program branding dan marketing yang dilakukan oleh kementerian pariwisata Indonesia di berbagai tempat untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan khususnya wisatawan asing ke Indonesia (Iqbal, 2022). *Trend* pariwisata dunia sendiri saat ini digunakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberlangsungan objek wisata sendiri dan meminimalkan akses negatifnya dengan konsep *sustainable tourism* yang menyatukan pelestarian lingkungan alam, komunitas dan meningkatkan kesejahteraannya (Nafah & Purnaningrum, 2021).

Sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April 2023 sebanyak 865,81 ribu kunjungan, jumlah ini turun tipis (0,39%) dibandingkan dengan bulan Maret 2023 lalu. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada April 2023 di dominasi oleh wisatawan mancanegara yang

berasal dari Malaysia (17,01%), Australia (12,69%), dan Singapura (11,24%). Secara kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga April 2023 meningkat sampai (393,83%) dibandingkan dengan periode sama pada tahun 2022 lalu. Peningkatan kunjungan ini tercatat pada pintu bandara Ngurah Rai dan Soekarno Hatta, masing-masing meningkat sebesar (1.819,01% dan 441,24%). Dari tujuan transportasi yang ada pada data pariwisata diatas, menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara lebih banyak mengunjungi destinasi pariwisata kota Bali dan Jakarta yang ada di Indonesia (BPS Pariwisata & Tranportasi Nasional, 2023).

Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN dalam hal jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dari 92,7 juta wisatawan yang liburan di ASEAN pada tahun 2013, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sekitar 8 juta wisatawan ($\leq$ 10%) dari total kunjungan wisatawan negara-negara ASEAN. Kunjungan tersebut sangat jauh dengan negara Thailand yang berhasil menarik sekitar 26,5 juta wisatawan, atau Malaysia yang menarik sekitar 25,7 juta wisatawan dan bahkan Singapura mampu menarik sekitar 11,8 juta wisatawan (*World Economic Forum*, 2014).

Pengembangan pariwisata di dunia berpengaruh terhadap perekonomian negara ASEAN. Hal ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menarik wisatawan lebih banyak dengan mengambangkan industri pariwisata, karena sektor pariwisata Indonesia masih berada dibawah tingkat optimal apabila dibandingkan dengan negara pesaing lainnya di ASEAN. Sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia (Sujai, 2016). Oleh karena itu dengan adanya permasalahan yaitu kurangnya terhadap pengelolaan wisata di Indonesia bisa dikembangkan dengan strategi peningkatan sumber daya yang dikelola untuk membuat destinasi wisata lebih menarik minat kunjung wisatawan lokal maupun mancanegara dengan adanya evaluasi perbaikan serta adanya starategi pemasaran dan peningkatan kelola destinasi wisata dengan baik untuk pengembangan pariwisata yang ada di Indonesia.

2. Masalah

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata karena memiliki keindahan alam dan kekayaan alam yang unik dan indah. Hanya beberapa daerah saja di Indonesia yang pengelolaan pariwisatanya sudah baik seperti Bali dan Jakarta, padahal masih banyak wilayah lain di Indonesia yang bisa dikembangkan. Keberadaan wilayah pariwisata mestinya signifikan bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ironisnya masyarakat yang tinggal di daerah wisata masih banyak yang miskin. Program pemerintah untuk perbaikan kepariwisataan sering tidak berdampak terhadap keberlanjutan datangnya wisatawan ketempat yang sama (berulang). Hal ini disebabkan adanya ketidakpuasan yang dirasakan wisatawan saat berkunjung. Berdasarkan hal ini perlu mengupayakan solusi untuk kunjungan secara sustainable dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Sektor pariwisata adalah industri yang pada dasarnya berorientasi pada orang serta partisipasi aktif di berbagai bidang aktivitas dalam sektor wisata (Swain & Mishra, 2017). Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tujuan parawisata juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan negara tuan rumah pada destinasi. Rasa kepuasan yang ada pada wisatawan saat berkunjung di destinasi wisata Indonesia secara tidak langsung berperan sebagai *ambassador* dari destinasi wisata yang telah dikunjunginya, sehingga wisatawan tersebut mau kembali lagi untuk liburan bersama orang terdekatnya. Masyarakat lokal yang berada pada daerah destinasi wisata tersebut berperan penting sebagai subjek maupun objek dalam kegiatan pengembangan parawisata. Masyarakat lokal dengan budayanya tersebut lebih mengetahui dan memahami caranya berinteraksi serta memanfaatkan potensi sumber daya sekitar dangan memelihara dan melestarikannya agar dapat memberi manfaat yang berkelanjutan serta mempertahankan tradisi budaya masyarakat setempat yang dapat menarik minat kunjungan para wisatawan (Iriani, 2019).

Sektor wisata berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di daerah wisata, berdasarkan kajian secara ekonomis dengan mempertimbangkan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara, seharusnya sektor wisata berpotensi cukup mampu menanggulangi kemiskinan melalui program-program pengembangan keparawisataan. Hal ini didukung dengan tujuan keparawisataan yang tercantum dalam UU No. 10 tentang Keparawisataan Tahun 2009, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
6. Memajukan Kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cita tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

4. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah dalam pengembangan objek wisata bisa dilakukan dengan analisis SWOT (*Stenghts, weakness, opportunities, dan threads*). (Rangkuti, 2014). Analisis SWOT pada pengembangan objek wisata, terdiri dari empat faktor yaitu:

1. Kekuatan (*Strenghts*), kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep yang ada. Kekuatan yang dianalisis adalah kekuatan apa yang dimiliki destinasi parawisata untuk dikembangkan menjadi lebih

tangguh sehingga mampu bertahan dan mampu bersaing dalam perkembangan selanjutnya yang menyangkut destinasi parawisata.
2. Kelemahan (*Weakness*), kelemahan yang terdapat pada suatu organisasi, proyek, atau konsep yang ada bisa merugikan ornag lain dan tidak menguntungkan bagi destinasi wisata.
3. Peluang (*Opportunities*), peluang yang berkembang dimasa akan datang dari luar organisasi, proyek, ataupun konsep itu sendiri dengan kompetitor kebijakan.
4. Ancaman (*Threats*), ancaman dari luar dapat mengganggu destinasi wisata dan para wisatawan yang sedang berkunjung, maka pengamanan juga dibutuhkan di destinasi wisata biar pengunjung merasa aman (Suarto, 2017).

Setelah diidentifikasi analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dapat diantisipasi dengan berbagai strategi mendukung untuk meningkatkan kunjungan destinasi wisata yaitu: promosi dengan tujuan wisata yang belum atau jarang dijelajahi oleh wisatawan di promosikan melalui media sosial, meningkatkan kemudahan transportasi menuju destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung, mengembangkan infrastruktur yang lebih baik untuk memberikan fasilitas ternyaman bagi wisatawan juga dengan kebersihan lingkungan yang dapat menyejukkan mata memandang keindahan wisata tanpa sampah yang berserakan, pelestarian budaya, adat istiadat dan keanekargaman makanan khas Indonesia yang akan membuat wisatawan mancanegara menikmati Indonesia dengan berbagai keunikannya yang berbeda pada tiap-tiap destinasi wisata pada setiap daerah di Indonesia.

5. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan terkait dengan harus melibatkan multisektor dengan kerjasama yang saling mendukung. Sector pariwisata merupakan salah satu sector unggulan pemerintah yang ditargetkan mendapat devisa 17,6 milyar dollar AS dengan target 20 juta wisatawan mancanegara hingga akkhir 2020 dengan 6 langkah strategis yaitu :
1. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur
2. Mendorong pengembangan atraksi wisata di wilayah perbatasan atau crossborder tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodic
3. Meningkatkan kualitas amenitas melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni Danau Toba dan Borobudur.
4. Memperkuat promosi wisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism

5. Mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi, antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman.

Hal yang tidak kalah penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah dengan perbaikan sikap dan perilaku masyarakat yang berada di daerah wisata. Sikap yang ramah, sopan, dan peduli serta mengahargai setiap wisatawan yang datang juga merupakan modal dasar yang bisa menimbulkan kenyamanan dan kepuasan sehingga akan mendatangkan efek keberlanjutan (sustainable) dalam kunjungan berikutnya.

6. Kesimpulan dan Saran

Peran sektor pariwisata berperan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada pada daerah wisata di Indonesia. *Sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan) dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan sebagai program yang dapat terlaksana dengan baik, melalui peningkatkan kesadaran masyarakat akan hal yang berpotensi guna mendorong mereka berpartisipasi dalam mengelola wisata yang ada di daerahnya sebagai destinasi wisata yang menghasilkan pendapatan. Dengan adanya minat masyarakat pada pengelolaan potensi sumber daya yang ada secara perlahan meningkatkan ekonomi masyarakat dan angka keluarga miskin perlahan juga menurun di Indonesia. Akan tetapi perlunya bantuan dari pemerintah sekitar sebagai upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan destinasi wisata bisa terkelola dengan baik dan bermanfaat ekonomis bagi masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Ardijanto, L. K. (2018). Pengambangan sustainable tourism management di Karesidenan Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 7(1), 3133.

Widiati, I. A., & Permatasari, I. (2022). Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism deveplopment*) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 16(1), 37.

Iqbal, M. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata melalui konsep *community based tourism* dan *sustainable tourism*. AT TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2(1), 10.

Nafah, H. K., & Purnaningrum, E. (2021). Penggunaan big data melalui analisis *google trends* untuk mengetahui perspektif pariwisata Indonesia di mata dunia. *SNHRP*, 3, 430-436.

BPS, Pariwisata dan Trasportasi Nasional. (2023). Perkembangan pariwisata dan transportasi nasional april 2023. Berita Resmi Statistik.

World Economic Forum. (2014). *The global Competitiveness index report* 2014-2015. Geneva: *World Economic Forum*

Sujai, M. (2016). Strategi pemerintah Indonesia dalam menarik kunjungan turis mancanegara. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. 20(1), 63, 70-73.

Swain, S. K., & Mishra, J. M. (2017). *Tourism: Principles and practices*. Oxford University. India.

Iriani, A. Y. (2019). Strategi pengembangan pariwisata berdasarkan preferensi masyarakat asli. Studi kasus di Raja Ampat. Jurnal Masyarakat & Budaya, 21(3), 272-273.

Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT teknik pembeda kasus bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suarto, E. (2017). Pengembangan objek wisata berbasis analisis SWOT. Jurnal Spasial. Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat.

Biodata Penulis

Prof. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, MSi lahir di Medan 16 Juni 1968. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) pada tahun 2007 dan pendidikan Magister (S2) di Institut Pertanian Bogor bidag ilmu Gizi Masyarakat. Pendidkan S1 (sarjana) di bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian USU tamat pada tahun 1992. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada 1 Maret 1993 Fakultas Kesehatan Masyarakat USU dan menjadi Guru Besar FKM USU sejak tanggal 1 Desember 2015. Saat ini sebagai Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana USU. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasioanl dan internasional terutama bidang kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat. Selain itu juga mempunyai beberapa kekayaan intelektual berupa hak paten sederhana maupun hak cipta.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Harry Agusnar
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan, pengentasan kemiskinan adalah dorongan untuk pembangunan berkelanjutan (Taghizadeh-Hesary, Panthamit & Yoshino 2021). Pengentasan kemiskinan dalam segala dimensinya tetap menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang paling menakutkan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digaungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah komitmen heroik untuk memerangi apa yang dimulai dan memberantas kemiskinan dalam semua dimensi dan bentuk pada tahun 2030 (Taghizadeh-Hesary et al. 2021).

Sebagian besar di negara-negara Asia yang sedang berkembang, ekspansi ekonomi yang cepat di negara-negara dan sub-kawasan, misalnya China, India, dan kawasan Asia Tenggara, telah membebaskan jutaan orang yang melekat di luar lingkaran kemiskinan (Asian Development Bank 2020). Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara berkembang, khususnya Cina, Vietnam, Nepal, dan Thailand, telah berhasil mengentaskan kemiskinan; namun, keberhasilannya tidak merata (Asian Development Bank 2020). Di negara-negara berkembang di Asia Tenggara, lebih dari 610 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem antara tahun 2005-2015, diukur pada garis kemiskinan internasional sebesar 1,90 USD per hari, berdasarkan daya paritas pembelian tahun 2011 (Asian Development Bank 2020). Sebagian besar dari orang-orang ini, sekitar 80% berasal dari China (234 juta - 38,5%) dan India (253 juta- 41,5%); namun, masih lebih dari 260 juta berada dalam kemiskinan ekstrim, dan sebagian besar berada di kawasan Asia Selatan dengan 202 juta -78% orang (Asian Development Bank 2020).

Meskipun lebih dari satu miliar orang dari negara-negara Asia telah keluar dari krisis kemiskinan ekstrem sejak tahun 1990, masih ada jutaan orang yang hidup antara 1,90 USD dan 3,2. USD berdasarkan daya paritas pembelian per hari pada tahun 2015 (Asian Development Bank 2020). Banyak orang terancam kemiskinan karena gejolak dan resesi ekonomi, ketidaksetaraan, korupsi, perubahan lingkungan dan iklim, dan, yang lebih penting, tata kelola yang terbatas dan kemampuan kelembagaan yang terbatas (Taghizadeh-Hesary et al. 2021). Khususnya, dengan munculnya pandemi global Covid-19 dan resesi ekonomi, perkembangan pengentasan kemiskinan semakin melambat, sebagai konsekuensi dari krisis Covid-19 yang berisiko membalikkan kemajuan puluhan tahun dalam perjuangan melawan kemiskinan. Bukan hanya mendorong jutaan orang kembali ke

dalam perangkap kemiskinan; itu juga membeli lebih banyak tantangan tambahan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Sumner (2020), akibat pandemi global, Covid-19, kemiskinan global dapat meningkat hingga setengah juta- yaitu sekitar 8% dari total populasi manusia di bumi. Ini menjadi kali pertama kemiskinan meningkat di mana-mana dalam 30 tahun terakhir, yakni sejak 1990 (Sumner, Hoy & Ortiz-Juarez 2020).

Di era sekarang, lebih banyak perhatian terhadap pariwisata berkelanjutan telah dilihat oleh para peneliti akademik dari sebelumnya (Mohamadi, Abbasi & Askarifar 2022). Pariwisata berkelanjutan tidak serta merta perlu mengadakan segmen pariwisata tertentu. Merupakan aspirasi mengenai dampak dari segala bentuk dan dimensi pariwisata yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya (Mohamadi et al. 2022). Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan, tanpa kelaparan, perlindungan lingkungan. Peneliti seperti Rasoolimanesh, Ramkrishna, Hall, Esfandiar dan Seyfi (2020) dan Scheyvens (2018) telah menyoroti keterkaitan antara pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dalam berbagai konteks. telah diterapkan secara global ke semua negara anggota (Kc, Dhungana & Dangi 2021).

Sebagai negara berkembang harus memiliki potensi yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut melalui pemanfaatan pariwisata. Namun. Oleh karena itu, kontribusi ini dimaksudkan untuk memberikan potensi pariwisata untuk mengentaskan kasus kemiskinan . Lebih jauh lagi, ini bertujuan untuk menemukan hubungan dan besarnya keterkaitan antara pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penulisan ini membantu menjelaskan apakah keterkaitan ini hanya retorika atau kenyataan di dunia praktis.

Mengingat banyaknya literatur terkait pariwisata dan pengurangan kemiskinan, sangat penting untuk memahami hubungan dan besarnya antara pariwisata dan kemiskinan (Winters, Corral & Mora 2013) karena literatur sebelumnya dalam bidang ini tidak mencukupi (Winters, Corral & Mora 2013; Oviedo-García, González-Rodríguez & Vega-Vázquez 2019). Oviedo-García dkk. (2019) telah menunjukkan bahwa bukti empiris yang dihasilkan tidak cukup untuk mendukung hubungan ini dan membutuhkan pemodelan yang lebih canggih untuk memahami hubungan ini. Selanjutnya, Winters et al. (2013, 184) telah menyebutkan bahwa untuk menjelaskan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi, khususnya pengentasan kemiskinan, diperlukan pemodelan ekonometrik yang lebih canggih untuk memahami hubungan dan besarnya. Dalam konteks Nepal, sejauh pengetahuan dan penelitian terbaik penulis, terdapat kekurangan penelitian tentang keterkaitan ini, terutama dalam pengentasan kemiskinan melalui penggunaan pemodelan ekonometrik yang canggih. Oleh karena itu, mengingat anteseden tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan penilaian empiris hubungan antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesaksian empiris tentang besarnya hubungan pariwisata-

pengentasan kemiskinan, sehingga temuan dari penelitian ini akan membantu menjelaskan apakah hubungan ini hanya retorika atau kenyataan.

2. Masalah

Apakah pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan
Tujuannya adalah untuk melihat pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan mengukur apakah pembangunan pariwisata berkelanjutan akan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas bahwa untuk memahami secara komprehensif keterkaitan antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai teori serta memahami peran pembangunan pariwisata berkelanjutan dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

3. Pemikiran Pemecahan Permasalahan

3.1. Pariwisata Berkelanjutan

Sejak 1980-an, gagasan keberlanjutan semakin penting bagi industri pariwisata (Joo, Seok & Nam 2020). Pada tahun 1990-an, pariwisata berkelanjutan berarti menjaga situs pariwisata dengan menahan pembangunan industri yang berlebihan, yang berisiko merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati lainnya. Namun, di era kontemporer, konsep-konsep tersebut telah melebar ke beberapa perspektif. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini bertentangan dengan kedua konsep tersebut; masalah lingkungan dan pariwisata (Nicolaides 2020). Literatur kini telah diperluas menjadi tiga pilar simbolis pembangunan berkelanjutan: keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini menyiratkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di setiap lapisan masyarakat dengan cara yang hemat biaya, persetujuan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan yang sama terhadap keragaman budaya dengan akses dan kesempatan yang sama bagi semua orang (Umur-zakov, Tosheva & Salahodjaev 2022). Meskipun pariwisata sangat dianggap sebagai pembuat perubahan pembangunan, muncul pertanyaan tentang dampaknya terhadap standar hidup dan lingkungan masyarakat tuan rumah. Pengenalan pembangunan berkelanjutan telah dibahas lebih awal dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup manusia pada tahun 1792. Secara progresif, konsep ini memperluas serikat internasional untuk konservasi alam (IUCN) untuk mencakup hak dan kewajiban masyarakat adat terhadap perlindungan lingkungan untuk generasi penerus. Tepat setelah pembentukan komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan pada tahun 1983, interpretasi pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang menggabungkan masa kini tanpa merugikan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan 1987). Melalui interpretasi ini, United Nations World Tourism

Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai "pertimbangan penuh atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan mempertimbangkan kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah dan masyarakat" (UNWTO 2005, 12). UNWTO juga menyoroti beberapa tujuan untuk memastikan pariwisata berkelanjutan, yang mencakup pelestarian sumber daya pariwisata dengan manfaat positif bagi masyarakat tuan rumah, mengurangi kerusakan lingkungan, budaya, dan sosial di destinasi tersebut, menjamin kepuasan wisatawan yang tinggi, dan, yang lebih penting, mendistribusikan manfaat pariwisata kepada masyarakat tuan rumah (UNWTO 2005).

Pariwisata dianggap sebagai industri tanpa asap (Sati 2020) karena, tidak seperti industri lain yang menghasilkan barang aktual dalam struktur ekonominya, yang mengakumulasi polusi atau asap sebagai produk sampingan, pariwisata tidak menghasilkan barang aktual dan dengan demikian dianggap sebagai industri tanpa asap. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dicapai ketika semua jenis alam, budaya, lingkungan, dan ekonomi secara memadai direnungkan dan dipraktikkan secara optimal dari perspektif yang komprehensif (Sati 2020). Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan bertanggung jawab atas konsekuensi saat ini dan masa depan terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan serta mempertahankan isu-isu tersebut. Pariwisata berkelanjutan terwujud dalam semua aspek; perlindungan dan konservasi alam, kesejahteraan penduduk setempat dan penduduk asli, perlindungan budaya, ekonomi yang sehat, dan kepuasan keseluruhan para tamu. Tentang teori ekologi dan pembangunan berkelanjutan, teori pariwisata berkelanjutan menetapkan bahwa perluasan keseluruhan pariwisata berkelanjutan harus sama-sama bermanfaat bagi sistem tiga dimensinya: sosial-ekologis-dan ekonomi (Zhang, Ji & Zhang 2015). Ini benar-benar mengamanatkan pariwisata untuk membentuk kegiatan yang direncanakan secara organik dengan alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Keumuman pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mengandung pemikiran yang adil, kesamaan, dan keberlanjutan untuk kesuksesannya secara menyeluruh. Namun, penerapan pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata ditemukan tersebar karena para sarjana yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah yang sama. Menurut Alarcón & Cole (2019) dan Wassler & Fan (2021) menegaskan penerapan pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata kurang berkelanjutan karena membawa lebih banyak tantangan untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat pada dimensi sosial-ekonomi-dan lingkungan. . Sharpley (2020) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah tujuan yang tidak layak. Sebaliknya, Mondal & Samaddar (2021) dan Roxas, Rivera & Gutierrez (2020) mengklaim bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan karena banyak pelancong dan pemangku kepentingan menjadi lebih sadar akan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, semakin banyak praktik konsumsi dan perilaku berkelanjutan oleh wisatawan dan pemangku kepentingan telah terlihat dalam dekade terakhir.

3.2. Pariwisata sebagai strategi pengentasan kemiskinan

Pariwisata memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, jauh lebih banyak perbaikan yang dikeluarkan dalam mengembangkannya di pedesaan, daerah regional dengan perilaku etis. Pariwisata adalah industri pengembangan ekonomi yang penting karena terkait secara signifikan dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi (Zhang 2015). Namun, sangat penting untuk memahami keterkaitan pariwisata-kemiskinan sebelum menempatkan pariwisata sebagai mekanisme pengentasan kemiskinan (Winters, Corral & Mora 2013). Praktek pariwisata berkembang pesat di seluruh dunia. Hal ini semakin dilihat sebagai pendorong potensial pertumbuhan ekonomi dan mekanisme untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Agenda ini telah ditekankan oleh Organisasi Perdagangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa 'kekuatan pariwisata, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi paling dinamis di zaman kita, dapat dimobilisasi secara lebih kompeten untuk mengatasi masalah kemiskinan secara lebih signifikan' (UNWTO 2017).

Meskipun ada konsensus luas tentang potensi pariwisata untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, masalah yang diidentifikasi dalam literatur tidak memiliki bukti empiris tentang tingkat keterkaitan ini (Winters, Corral & Mora 2013; Cooper 2018). Meskipun mekanisme potensial yang melaluinya pariwisata dapat mengurangi kemiskinan telah dieksplorasi, besarnya kaitan ini masih kurang dieksplorasi. Misalnya, Ashley & Mitchell (2010) mengidentifikasi tiga kemungkinan cara pariwisata dapat berkontribusi positif terhadap kemiskinan: efek langsung, tidak langsung, dan dinamis. Namun, mereka mengindikasikan bahwa penyelidikan yang dilakukan di daerah ini tidak memadai. Demikian pula, Oviedo-García, Gonzalez-Rodriguez & Vega-Vazquez (2019, 13) menemukan bahwa diperlukan pemodelan yang lebih canggih untuk memahami hubungan pariwisata-kemiskinan. Temuan mereka menunjukkan bahwa pendapatan dari pariwisata tidak mengurangi kemiskinan dan gagal meminimalkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Kritik terhadap permainan peran ini adalah bahwa industri pariwisata dapat membawa banyak peluang bagi pembangunan ekonomi ke negara tuan rumah. Namun, masalah kebocoran keuntungan dan partisipasi masyarakat lokal yang tidak memadai: kebutuhan modal dan sumber daya manusia yang sangat besar mencegah negara-negara miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan wisata (Oviedo-García, González-Rodríguez dan Vega-Vázquez 2019). Menurut Oviedo-García et al. (2019), terlepas dari kemungkinan daya tarik wisata yang potensial, negara-negara berkembang merasa sulit untuk menahan keuntungan mereka di dalam diri mereka sendiri karena perusahaan asing memulangkan mereka.

Beberapa sarjana sebelumnya telah meneliti pemanfaatan pariwisata sebagai sarana pertumbuhan ekonomi. Namun, teori pertumbuhan perdagangan-ekonomi banyak digunakan dalam hubungan pariwisata dan pembangunan ekonomi. Menurut teori hubungan perdagangan-ekonomi ini, tiga hipotesis biasanya digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara

pariwisata dan pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan pariwisata yang digerakkan oleh ekonomi, hubungan yang searah, dan pertumbuhan yang didorong oleh pariwisata (Aratuo & Etienne 2019). Perkembangan industri pariwisata memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam ekspansi ekonomi lokalnya. Ekspansi ekonomi lokal ini hanya mungkin terjadi ketika pertumbuhan pariwisata tertarik dan cukup didorong untuk menarik pelancong bisnis, modal manusia, dan pembangunan infrastruktur, terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi, untuk mengakses destinasi dengan cara yang paling nyaman (Aratuo & Etienne 2019). Pariwisata dianggap sebagai industri siklis, yang sangat sensitif terhadap situasi ekonomi, memiliki waktu puncak dan musim sepi; oleh karena itu, komposisi ekonomi makro yang berimbang membantu menjaga lingkungan yang menguntungkan bagi operasi pariwisata. Prospek industri pariwisata lebih terkait dengan status ekonomi makro, di mana kegiatan ekspansi industri berdampak pada keseluruhan pengembangan usaha pariwisata dengan meningkatkan jumlah wisatawan, tingkat hunian, tingkat lapangan kerja, dan tingkat terkait lainnya, sehingga meningkatkan rasio penjualan. perusahaan pariwisata (Khan, Bibi, Lorenzo, Lyu & Babar 2020). Selain itu, perkembangan industri pariwisata memiliki arti penting bagi lingkungan usaha badan usaha pariwisata, dan secara tidak langsung mempengaruhi skala usaha pariwisata. Namun, tidak cukup luas untuk mengevaluasi dampak operasi ekonomi makro dan kemajuan industri pariwisata melalui penskalaan operasi bisnis pariwisata.

Oviedo-Garcia dkk. (2019) menegaskan bahwa interkoneksi antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Hubungan ini berpotensi lebih penting untuk mengembangkan ekonomi karena pariwisata tetap menjadi salah satu sektor ekonomi penting di sebagian besar tempat yang menderita kemiskinan ekstrim. Jika diterima bahwa pertumbuhan ekonomi telah mengurangi kasus kemiskinan dan bahwa kegiatan pariwisata menghasilkan pertumbuhan tersebut melalui penciptaan lapangan kerja, neraca perdagangan yang positif, dan kemajuan bisnis yang terkait dengan pariwisata, maka benar juga bahwa kegiatan pariwisata membantu mengurangi kemiskinan (Croes 2014). Demikian pula, Alieva dan Usmonova (2021) menyoroti bahwa ekspansi pariwisata lebih cocok untuk pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang.

Medina-Munoz, Medina-Munoz & Gutierrez-Perez (2015) menyoroti bahwa, dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, pariwisata memiliki potensi lebih besar untuk memerangi kemiskinan di negara berkembang hingga negara kurang berkembang karena kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat miskin pedesaan dan pesisir. situs dengan sedikit kemungkinan lain untuk pertumbuhan; Ini dianggap sebagai kegiatan padat karya di mana keterlibatan penduduk setempat relatif tinggi dan juga melibatkan perempuan, dewasa muda, dan orang-orang yang kurang berkualitas (persentase lebih besar dari tingkat yang lebih miskin dari

masyarakat); dan masuknya lebih banyak wisatawan mengundang beragam peluang bisnis di tempat tujuan.

3.3 Pariwisata dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB telah menyoroti peran pariwisata dalam mencapai tujuan yang saling terkait antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan, karena pariwisata melaporkan 1/10 produk domestik bruto dunia. Jika dikelola dengan tepat, pariwisata dapat mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mempercepat SDGs (WTO dan UNDP 2017). Pariwisata memiliki peran khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan dalam SDG: 14 (WTO dan UNDP 2017; Rasoolimanesh et al. 2020). Selain itu, pariwisata memiliki peran penting dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan lain, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan (WTO dan UNDP 2017; Rasoolimanesh et al. 2020).

Kecukupan pariwisata untuk mendukung pencapaian SDG telah dibahas dalam banyak studi terkait pariwisata. Misalnya, Trupp dan Dolezal (2020) menegaskan pentingnya pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan menguraikan potensinya untuk memfasilitasi pencapaian SDGs, terutama untuk agenda pengentasan kemiskinannya. Sebaliknya, Scheyvens (2018) berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tantangan yang menakutkan jika sifat kemiskinan multidimensi dipertimbangkan, karena ketidaksetaraan struktural dapat bertahan, yang dapat menghambat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Scheyvens dan Hughes (2019, 1075), “pemain pariwisata harus meningkatkan masyarakat untuk mengakses sumber daya dan mempertahankan kekuatan mereka; memberdayakan orang miskin dan membantu mereka untuk memberikan hak-hak mereka yang diperlukan, dan menawarkan lebih banyak kesempatan bagi orang miskin dan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pariwisata.” Namun, beberapa ahli, seperti studi kasus Kenya oleh Manyara dan Jones (2007), menemukan bahwa daerah dengan kegiatan wisata yang melimpah juga mengalami kemiskinan yang parah. Scheyvens & Hughes (2019) puas bahwa bahkan pariwisata pro-kaum miskin tidak mampu menjangkau yang paling miskin dari yang miskin.

Menurut Trupp dan Dolezal (2020, 5), “pariwisata yang terkait dan berkontribusi pada SDGs lebih menantang untuk dipahami, mengingat peran besar pariwisata di masa lalu tidak harus bersifat kemanusiaan yang welas asih, dengan kesehatan, pendidikan , ekonomi, atau kesetaraan gender sering dianggap sebagai sisa dari intrusi pariwisata.” Dari pengaturan pedagogis, Slocum, Dimitrov & Webb (2019, 34) menyatakan bahwa “pariwisata berkelanjutan sangat terkait dengan SDG kesadaran dan transformasi di seluruh dunia, dan konsolidasi SDG melalui pendidikan tinggi memerlukan tanggung jawab untuk menawarkan kesuksesan yang berkelanjutan dari tujuan ini. ” Pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas ini sangat penting,

dan yang lebih penting lagi, tanggung jawab bersama perlu ditanamkan di antara semua pemangku kepentingan yang relevan.

Movono dan Hughes (2022) menarik perhatian pada pentingnya membina hubungan antara pemangku kepentingan dan mengembangkan kemitraan yang kuat untuk mencapai SDG. Demikian pula dalam konteks Nepal, Hall (2019) menekankan relevansi membina kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Perspektif Nepal tentang proses perencanaan secara historis lebih merupakan pendekatan dari atas ke bawah tanpa kolusi dari pemangku kepentingan pariwisata teratas (NPC 2017)

Program-program ini dirancang untuk memenuhi tujuan ganda melestarikan lingkungan dan mendukung standar hidup masyarakat adat. Inisiasi ini menghasilkan lebih banyak aliran uang ke masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya pendidikan keluarga mereka, mempromosikan kesetaraan gender, dan juga untuk melestarikan lingkungan alam dan situs budaya (Kc 2021). Beberapa kawasan lindung telah berkembang, menarik jumlah wisatawan yang layak, sedangkan kawasan lindung lainnya sedang berjuang untuk mendorong pariwisata. Misalnya, kawasan lindung yang berhasil adalah proyek kawasan konservasi Annapurna, taman nasional Chitwan, dan taman nasional Sagarmatha, yang proyek kawasan konservasi Annapurna sering disebut sebagai salah satu model ekowisata terbaik di seluruh dunia. Masyarakat yang tinggal di pinggiran zona kawasan lindung bergembira atas pendapatan yang dibagi oleh kawasan lindung. Arahan pengelolaan zona penyangga ini menetapkan bahwa investasi perlu diputuskan dalam lima perspektif berbeda ini: program konservasi dan pengembangan masyarakat (60%), program peningkatan pendapatan dan keterampilan & pengembangan kejuruan (20%), kampanye pendidikan konservasi (10%), dan alokasi administratif (10%) (Min 2020; Kc, Dhungana & Dangi 2021).

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pada bagian ini, pendekatan yang diadopsi untuk latihan empiris akan diberikan, yang meliputi filosofi tersirat, pengembangan teori, metode pengumpulan data, strategi. Selanjutnya, pembenaran untuk menggunakan pendekatan ini daripada alternatif lain juga akan diberikan

Meskipun keyakinan filosofis dan asumsi sering mempengaruhi cara penelitian apapun dilakukan, mereka mungkin tidak secara eksplisit ditunjukkan atau bahkan mungkin diterima begitu saja (Crotty 1998). Secara sederhana, pandangan umum yang menggambarkan paradigma penelitian dicirikan oleh pandangan dasar, keyakinan, dan asumsi tentang dunia, yang dicirikan oleh jawaban yang diberikan atas pertanyaan dasar (Crotty 1998). Keyakinan ini sangat penting bagi peneliti mana pun karena asumsi ini secara konsekuen membentuk pemahaman peneliti tentang pertanyaan penelitian, metode, dan proses interpretasi (Saunders, Thornhill & Lewis 2016). Dengan demikian, konsistensi kepercayaan dan asumsi yang direncanakan

sebelumnya mengarah pada penelitian yang kredibel yang membawa lebih banyak makna pada pemilihan pendekatan berbeda yang diperlukan untuk bagian empiris.

Pemahaman yang jelas tentang filosofi penelitian menunjukkan kesadaran penuh terhadap perumusan dan keefektifan keyakinan dan pemahaman tentang dunia nyata. Pemilihan filosofi penelitian tergantung pada implikasi praktisnya, sifat penelitian, dan organisasi pertanyaan penelitian dan literatur. Lebih tepatnya, ada perbedaan filosofis yang signifikan antara penelitian yang berfokus pada berbasis kuantitatif (objective-based) dan berbasis kualitatif (subjective-based). Dua sudut pandang filosofis ini, "positivisme" dan "interpretivisme", umumnya tersirat dalam penelitian ilmiah dan sosial (Collis & Hussey 2003). Dari sikap filosofis positivis, keyakinan dan asumsi didasarkan pada realitas berbasis objektif, berbeda dengan realitas berbasis subyektif dalam sikap filosofis interpretivisme.

5. Rencana Tindak Lanjut

Filosofi positivis bergantung pada studi berbasis kuantitatif karena percaya pada penalaran berbasis logis, dan teori berkembang dengan membawa hubungan antara variabel yang diidentifikasi dalam literatur (Saunders, Thornhill & Lewis 2016). Filsuf positivis percaya dalam merenungkan tempat-tempat di mana pengetahuan diamati dan dievaluasi sebagai otentik, di mana metode yang terbukti secara ilmiah berdasarkan koherensi logis diambil untuk menguji hipotesis (Saunders, Thornhill & Lewis 2016). Sejak sifat dari pertanyaan penelitian, sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, lebih dapat dijawab melalui objektivitas. realitas berbasis tife, yaitu, melalui temuan terukur, filosofi penelitian positif paling sesuai dengan penelitian ini. Menurut Saunders et al. (2016), filsafat positivis memberikan kecenderungan pada penelitian kuantitatif, yang merupakan realitas berbasis objektif dan memiliki kekuatan generalisasi. Dengan demikian, alih-alih mendapatkan wawasan komprehensif tentang fenomena melalui sikap subyektif, penelitian ini akan memanfaatkan temuan, teori, dan model peneliti sebelumnya untuk memahami dan menyimpulkannya melalui kerangka teoretisnya. Dengan demikian, hubungan antara berbagai variabel atau tindakan seperti pariwisata berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan potensi ekonomi akan dinilai dan akan menarik temuan yang sesuai.

Data kuantitatif atau kualitatif ini membawa unsur-unsur yang berbeda untuk mencapai koherensi dalam proses penelitian. Sifat metode pengumpulan data mempengaruhi strategi penelitian, cakrawala waktu, dan upaya. Karena metode penelitian kuantitatif banyak dikaitkan dengan pendekatan berbasis deduktif, di mana fokus utamanya adalah memanfaatkan data untuk menguji teori atau model (Saunders et al. 2016, 165). Metode pengumpulan data berbasis kuantitatif memungkinkan dilakukannya analisis dan evaluasi kemungkinan hubungan kausal antar variabel melalui analisis statistik. Misalnya, hubungan antara pariwisata berkelanjutan dengan kampanye pengentasan kemiskinan. Selain itu, metode pengumpulan data

kuantitatif juga memungkinkan pengumpulan data dari sampel besar dan nantinya dapat digunakan untuk menggeneralisasi populasi menggunakan metode statistik yang berbeda sesuai dengan teori yang digunakan.

Metode pengumpulan data kuantitatif nampaknya lebih relevan dengan penelitian ini karena sifat pertanyaan penelitian lebih condong ke arah jawaban berbasis kuantitatif. Peneliti dapat mengakses ukuran sampel yang besar dengan memanfaatkan strategi berbasis kuesioner. Selain itu, agenda utamanya adalah untuk menguji teori yang diadopsi, yang dimungkinkan melalui metode kuantitatif yang memungkinkan analisis statistik untuk mengukur apakah teori yang diadopsi dapat diterima. Selain itu, metode penelitian kuantitatif memakan waktu lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit bias daripada metode kualitatif (Lash, Fox, MacLehose, Malando, McCandless & Green-land 2014).

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, meskipun diakui bahwa pariwisata dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, data empiris yang tersedia tentang hubungan antara pariwisata dan kemiskinan tidak meyakinkan. Hubungan antara pariwisata dan kemiskinan telah menjadi subjek studi ekstensif, yang dapat ditemukan dalam kanon literatur yang berkembang tentang pengentasan kemiskinan yang dibawa oleh industri pariwisata. Sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa pariwisata dapat berdampak positif pada pengentasan kemiskinan, penelitian lain menunjukkan tidak ada korelasi antara keduanya. Dampak pariwisata pada keluarga dengan berbagai pendapatan hampir tidak tersentuh oleh penelitian akademis. Sebagian besar, penelitian empiris sebelumnya telah memberikan dampak positif pariwisata pada orang miskin didukung oleh data yang kuat. Agar adil, peran potensial pariwisata berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan kurang mendapat perhatian dalam literatur. Investigasi komprehensif diperlukan untuk menentukan apakah mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan. Entah bagaimana, penelitian ini telah menambah sedikit pemahaman kita tentang topik ini. Ketidakstabilan politik dan meluasnya korupsi merupakan hambatan utama untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, bahwa orang miskin sebenarnya bukanlah penerima utama manfaat pariwisata di daerah mereka masing-masing

6.2. Saran

Untuk pariwisata berkelanjutan untuk dapat pengentasan kemiskinan perlu dianalisis berdasarkan lima faktor berbeda: perkembangan masyarakat, tingkat ekonomi, kondisi mata pencaharian, pelatihan pendidikan, dan akses ke fasilitas kesehatan..

Daftar Pustaka

Alarcón, D.M. & Cole, S. 2019. 'No sustainability for tourism without gender equality,' *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 903–919. Available at https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1588283.

Cooper C. et al. 2018. *The SAGE Handbook of Tourism Management: Applications of Theories and Concepts to Tourism*. SAGE.

Joo, Y., Seok, H. & Nam, Y. 2020. 'The Moderating Effect of Social Media Use on Sustainable Rural Tourism: A Theory of Planned Behavior Model,' *Sustainability*, 12(10), 4095.Available at: https://doi.org/10.3390/ su12104095.

Kc, B., Dhungana, A. & Dangi, T.B. 2021. 'Tourism and the sustainable development goals: Stakeholders' perspectives from Nepal,' *Tourism Management Perspectives*, 38, 100822.Available at: https://doi.org/ 10.1016/j.tmp.2021.100822.

Mohamadi, S. Abbasi, A. Kordshouli, H.R. Askarifar, K. 2022. Conceptualizing sustainable–responsible tourism indicators: an interpretive structural modeling approach, *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 399–425. Available at: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01442-9.

Nicolaides, A. 2020. '*Sustainable Ethical Tourism (SET) and Rural Community Involvemen*t'. Available at: Sustainable Ethical Tourism (SET) and Rural Community Involvement (unisa.ac.za)

Oviedo-García, M.Á., González-Rodríguez, M.R. & Vega-Vázquez, M. 2019. 'Does Sun-and-Sea All Inclusive Tourism Contribute to Poverty Alleviation and/or Income Inequality Reduction? The Case of the Dominican Republic, *Journal of TravelResearch*, 58(6), 995–1013. Available at: https://doi.org/10.1177/0047287518789272.

Rasoolimanesh, S.M, Ramakrishna, S. Hall, C.M, Esfandiaar, K & Seffi, S. 2020. 'A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals,*Journal of Sustainable Tourism*, 1–21. Available at: https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621.

Sati, V.P. 2020. *Sustainable Tourism Development in the Himalayas*: Constraints and Prospects. Cham:Springer International Publishing (Environmental Science and Engineering). Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58854-0.

Sumner, A., Hoy, C. & Ortiz-Juarez, E. 2020. Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. Available at: https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9.

Taghizadeh-Hesary, F., Panthamit, N. & Yoshino, N. 2021. *Poverty Reduction for Inclusive Sustainable Growth in Developing Asia*. (ed.) Singapore: Springer Singapore (Economics, Law,in Asia Pacific). Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-16-1107-0.

Umurzakov, U., Tosheva, S. & Salahodjaev, R. 2022. 'Tourism and Sustainable Economic Development: Evidence from Belt and Road

Countries, *Journal of the Knowledge Economy*.Available at: https://doi.org/10.1007/ s13132-021-00872-0.
Wessler, P. & Fan, D.X.F. 2021. 'A tale of four futures: Tourism academia and COVID-19', Tourism *Management Perspectives*, 38, 100818. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100818.
Zhang, J., Ji, M. & Zhang, Y. 2015. 'Tourism sustainability in Tibet – Forward planning using a systems approach,' *Ecological Indicators*, 56, 218–228. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.04.006.

Biodata Penulis

Prof. Dr. Harry Agusnar, M. Sc. M. Phil, lahir di Langsa – Aceh pada tanggal 17 Agustus 1953. Mengawali pendidikan SD Negeri No3 Kota Langsa lulus tahun 1966 dan SMP Negeri No.1 di Kota Langsa lulus tahun 1969 serta pendidikan menengah atas di SMA No.1 Kota Langsa lulus tahun 1972. Menempuh pendidikan S1 pada program studi Kimia di Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1982. Selanjutnya menyelesaikan program Magister Kimia di tahun 1990 dan program Doktor Kimia di tahun 2006 di Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 1983 mengabdikan diri sebagai Staf Pengajar / Dosen di Departemen Kimia – FMIPA USU pada bidang ilmu Kimia Analitik. Menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Penelitian FMIPA USU sejak tahun 2004-2021 dan Sebagai Sekretaris S2/S3 Program Studi Kimia sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Kimia Analitik, penulis saat ini mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Kimia Analitik antara lain Kimia Analitik I, II, III dan IV, Mata kuliah pilihan, Cara-cara Analisa Khusus, Analisa Bahan Berbahaya Kimia Lingkungan, Analisa Pencemaran dan Pengendalian pada program studi S1, dan S2/S3 Kimia. Penentuan Struktur, Kimia Sensor, Artikel Riview dan Buku Teks

Beberapa hibah penelitian baik tingkat nasional melalui Dirjen Dikti dan tingkat lokal (Talenta) serta hibah pengabdian pada masyarakat telah dimenangkan oleh penulis. Penulis telah mempublikasikan beberapa artikel hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan WoS seperti di Elsevier. Beberapa paten sederhana dan buku juga telah dihasilkan penulis.

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Irnawati Marsaulina
Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang menyeluruh. Kemiskinan dipandang sebagai suatu standar hidup di tingkatan yang rendah dan kekurangan materi yang dialami oleh sejumlah orang jika dibandingkan dengan standar kualitas yang pada umumnya berlaku dalam kehidupan masyarakat[1]. Masalah sosial seperti kemiskinan juga dapat berdampak pada kemampuan negara untuk mensejahterakan dan memberdayakan warganya. Karena tingkat kesejahteraan rakyat merupakan ukuran keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan, maka kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensi[2].

Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirancang oleh pemerintah Indonesia yakni penghapusan segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan sudah mulai dilakukan, namun upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin sulit. Salah satu bukti nyata seperti pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan mengakibatkan masyarakat semakin malas bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, ketergantungan kepada pihak lain yang pada akhirnya kemandirian dan kesejahteraan sulit diwujudkan[3]. Munculnya pandemi Covid- 19 juga mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat, hal ini dibuktikan dalam penelitian bahwa angka kasus positif Covid-19 dapat mengganggu kegiatan ekonomi yang pada akhirnya membawa dampak terhadap pendapatan masyarakat[4].

Total penduduk dengan kategori miskin yang ada di Indonesia pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut[5]:

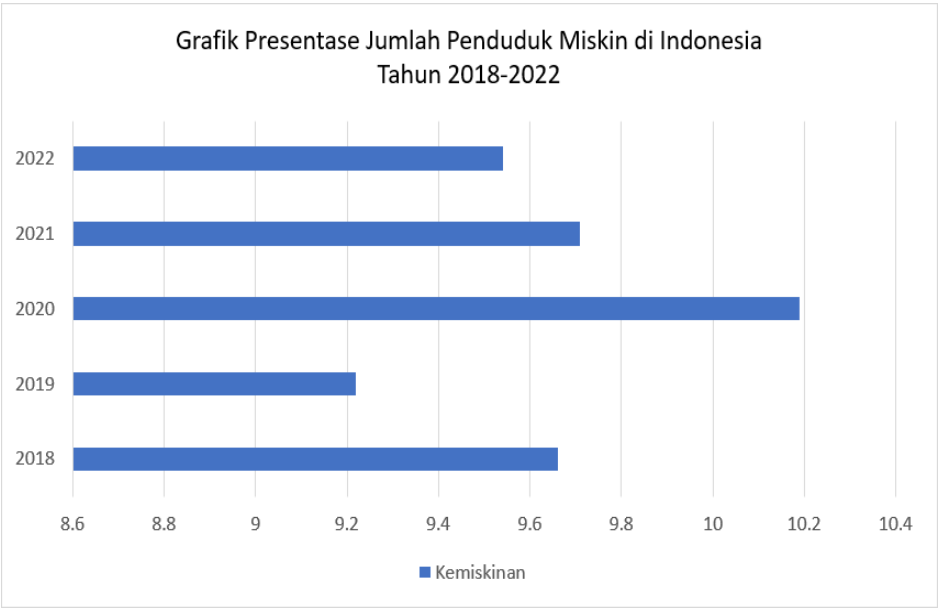

Gambar 1. Grafik Presentase Jumlah Penduduk Miskindi Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwasanya presentase total penduduk dengan kategori miskin pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 9.66% dan 9.22% sedangkan presentase total penduduk dengan kategori miskin di Indonesia paling tinggi dalam periode waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2020 sebesar 10.19%. Hal tersebut tak luput dari pandemi global yang melanda hampir belahan dunia khususnya Indonesia sehingga mengakibatkan jutaan orang jatuh miskin dan pada akhirnya tingkat kemiskinan meningkat.

Kelompok kemiskinan terbagi 3 kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi pada masing-masing provinsi di Indonesia sebagai berikut[6]:

1. Kelompok kemiskinan rendah terdapat 18 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
2. Kelompok kemiskinan sedang terdapat 14 Provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Gorontalo.
3. Kelompok kemiskinan tertinggi terdapat di dua provinsi yaitu, Papua dan Papua Barat.

Sebelum memberikan upaya untuk melakukan penghapusan segala bentuk kemiskinan ada baiknya menggali potensi wilayah beserta masyarakatnya terlebih dahulu, hal ini mungkin dapat dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang nantinya bisa saja dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat serta memberantas kemiskinan. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa dalam pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopak Ngarai Sianok Maninjau memiliki beberapa manfaat di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dimana dalam dimensi ekonomi adanya tempat wisata tersebut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, serta keadaan tersebut tentu memerlukan keikutsertaan berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah, pengusaha pariwisata serta masyarakat[7].

Aktivitas atau kegiatan pengembangan pariwisata lokal melalui desa wisata merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan potensi desa yang dapat dikembangkan. Karakteristik desa wisata memiliki konsep suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang sudah ada dan diberlakukan[8].

Pengembangan desa wisata merupakan kegiatan alternatif pariwisata yang didasarkan adanya potensi yang dimiliki di desa dengan aspek kelestarian lingkungan, tradisi yang sudah ada sejak dahulu, kebudayaan yang melekat pada masyarakatnya dan fokus dalam memberdayakan masyarakat di sekitar desa[9].

Saat ini, desa wisata dapat menjadi tujuan wisata penting di dalam dunia pariwisata. Desa wisata menawarkan alternative destinasi bagi para wisatawan yang mengalami kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan ingin kembali merasakan kehidupan di alam pedesaan, serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktifitas sosial budayanya menyebabkan berkembangnya pariwisata di daerah-daerah pedesaan yang dikemas dalam bentuk desa wisata[10]. Karakteristik desa wisata memiliki konsep suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang sudah ada dan berlaku[11].

Adanya pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk lain dari kegiatan pariwisata yang merujuk pada potensi-potensi desa yang memang sudah digali dan direncanakan dengan matang sebelumnya. Peran pro aktif dan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata dapat menciptakan iklim pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sinergis dan berkesinambungan. Tidak hanya di sektor pariwisata saja, dampak yang ditimbulkan dari adanya keikutsertaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan memberikan *multiplier effect* seperti pada sektor ekonomi dan sektor sosial budaya daerah setempat[12].

Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat menciptakan iklim pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya pengembangan wisata untuk perekonomian tapi juga melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu saat ini pemerintah menggencarkan pengembangan pariwisata lokal dengan konsep desa wisata untuk memberdayakan, meningkatkan perekonomian, dan melestarikan budaya masyarakat lokal[11].

Walaupun peran masyarakat sangat besar dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami perannya tersebut, hal inilah yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan tadi. Mengingat begitu pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan maka perlu keikutsertaan berbagai pihak untuk memberikan solusi[13]. Padahal berdasarkan hasil penelitian yang lain, mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi proses memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan dilakukannya pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan pemberdayaan masyarakat secara efektif mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan[14].

2. Masalah

Masalah yang dihadapi yang menghambat proses pengembangan wisata berkelanjutan dari SDM adalah kurangnya pengetahuan tentang pariwisata, dan kurangnya keterampilan dalam pengembangan dan implementasi kreativitas produk-produk setempat. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pengelolaan daya tarik wisata, *homestay* dan layanan prima, dimana masyarakat belum mengetahui standar dalam pengelolaan *homestay* dan layanan kepada wisatawan, dan kurangnya keterampilan masyarakat tentang kuliner atau kreasi makanan dan minuman bagi wisatawan.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang pariwisata sehingga belum semua masyarakat mau berpartisipasi. Hal ini karena belum optimalnya kapasitas masyarakat khususnya dalam bidang layanan wisata. Layanan wisata terkait dengan ketersediaan fasilitas baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam mengatasi permasalahan yang ada diperlukan peran serta pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata. Pemerintah dan masyarakat sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata, Oleh sebab itu diperlukan adanya situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki pola berpikir yang sadar wisata. Penerapan sikap sadar wisata diharapkan akan mengembangkan pemahaman dan pengertian yang proporsional di antara berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam mengajak, menggugah, dan menggairahkan masyarakat. Tugas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Peranan pemerintah dalam upaya menjadikan wilayah setempat mejadi Wisata dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha kerajinan di area obyek wisata. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan dan mengadakan program pelatihan kepada kelompok-kelompok sadar wisata.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan penghasilan setempat dan pengetahuan serta pemahaman masyakakat dalam pengembangan desa wisata sebagai pariwisata berkelanjutan maka harus segera dilakukan upaya-upaya yang tepat sasaran dan inovatif sesuai dengan ketentuan *World Tourism Organization* Tahun 2018[15]. Langkah yang harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi pariwisata kepada masyarakat. Proses sosialisasi dilakukan oleh para tokoh desa melalui rapat-rapat desa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tercipta pariwisata yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak kalah pentingnya masyarakat dan pelaku pariwisata harus mampu menjaga kesetabilan hubungan agar bisa tercipta pariwisata yang berkelanjutan. Para pelaku pariwisata mampu menjaga sumber daya alam, dan budaya lokal sehingga masyarakat setempat juga merasakan manfaat sosial ekonomis dari kepariwisataan tersebut, sesuai dengan ciri daripada pariwisata berkelanjuatan yaitu dapat meningkatkan taraf hidup, serta perekonomian masyarakat lokal, dan melestarikan lingkungan[16].

5. Rencana Tindak Lanjut

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam serta potensi-potensi alam yang dapat dikelola sehingga menghadirkan objek wisata. Potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman alam yang sangat indah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal maupun Internasional. Sektor pariwisata di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Sektor pariwisata muncul sebagai bintang baru bagi perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa negara. Salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri. Selain sumber daya manusia, sumber daya yang menjadi faktor penting adalah luas wilayah serta keragaman yang ada di suatu wilayah. Sumber daya ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjungan.

Rencana tindak lanjut dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat maka ada beberapa yang dilakukan; Pertama, adanya dilakukan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan misalnya saja kerjasama dengan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada diterutama sekolah dasar dan sekolah menengah untuk melakukan belajar alam yang ada di tempat tinggal mereka maka dari itu pemahaman seseorang sudah didik dari kecil.

Kedua, pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat. Dengan tercipta pariwisata yang berkelanjutan, kearifan lokal (ciri khas daerah setempat) yang dapat menarik pariwisatawan, arus kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca negara cukup besar, hal ini tentu membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Menghadapi hal tersebut berbagai macam upaya dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya.

Ketiga, melakukan promosi wisata. Dengan promosi wisata, orang-orang dapat mengetahui destinasi yang ada di wilayah tersebut dengan begitu tingkat kunjungan wisatawan akan semakin meningkat. Promosi wisata yang dilakukan adalah dengan menghidupkan nuansa modern akan tetapi tidak menghilangkan unsur budaya setempat yang ada. Meningkatnya jumlah wisatawan dari adanya kegiatan pariwisata terhadap kondisi ekonomi akan memberikan dampak yang positif berupa distribusi manfaat atau keuntungan, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat, pendapatan pemerintah, serta pembangunan daerah setempat.

Keempat, perubahan cara hidup dan tata nilai. Perubahan cara hidup dan tata nilai yang bisa diamati yaitu meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial. Dengan adanya pariwisata taraf hidup masyarakat semakin meningkat, banyak warga mengalami peningkatan pendapatan dengan cara berdagang ataupun usaha lain yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata.[10]

6. Kesimpulan dan Saran

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta potensi-potensi alam yang dapat dikelola sehingga menghadirkan objek wisata yang dapat dinikmati. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektoral agar pembangunan pariwisata dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Keberhasilan pembangunan juga tergantung dari daya tarik wisata. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Proses pembangunan pariwisata berkelanjutan terdapat banyak pihak terkait yang terlibat, dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata diperlukan sebuah strategi yang akan dilakukan serta kerjasama antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang merata di seluruh Indonesia dapat membantu perekonomian masyarakat. Hal ini langsung dirasakan oleh masyarakat adalah ramainya wisatawan yang datang

mengunjungi kawasan daerahnya menimbulkan banyak dampak positif pada pendapatan asli daerah serta naiknya perekonomian masyarakat lokal. Dalam pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa manfaat di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada akhirnya akan membuat kesempatan kerja bertambah, dengan adanya kesempatan kerja yang bertambah maka pengangguran akan berkurang dan tingkat kesejahteraan akan meningkat sehingga tingkat kemiskinan ikut berkurang.

Diharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mengetahui potensi yang ada diwilayah tersebut dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Andini, G., Kurniansyah, D., & Febriantin, K. (2022). Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), pp. 2055-2062.
2. Prasetyono, R.I., dkk. 2021. Analisis Peramalan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Dengan Model Arima. Jurnal Ilmiah Informatika Komputer. pp 26.
3. Nindatu, P.I. (2019). Komunikasi pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 3(2), pp. 96
4. Setyadi, S. & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4 (1), pp. 62
5. Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *6*(1), 82-95.
6. Setiawan, D., & Zahra, A. (2023). Pengelompokan Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Time Series Based Clustering. *Inferensi*, 6(1), 83-90.
7. Fadisa Nur, Syamsurizaldi & Hendri. (2021). Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukittinggi. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 3(2), pp. 73-78
8. Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Pangestu, R.P.A.G. (2017). Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *7*(2), pp. 192–202.
9. Dwiridhotjahjono, J., Wibowo, P. and Nuryananda, P. F. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(1), pp. 241–266.

10. Kusumawardhana, I. (2023). Pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa: studi kasus di Desa Wisata Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), pp. 27-55.
11. Prihasta, A.K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, *7*(1), pp. 221-240.
12. Nisa, F.L., Utami, N.T., & Marseto, M. (2022). Pengembangan wisata berkelanjutan kampung batik tin berbasis pemberdayaan masyarakat Wilayah Kelurahan Gundih Kota Surabaya. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 59-64.
13. Nurlenawati, N. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, *3*(1), pp. 1501-1513.
14. Purbantara, A., & Mujianto.(2019). *Pemberdayaan Masyrakat Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 1(2), pp.1-20.
15. World Tourism Organization (2018). *Sustainable Development of Tourism Conceptual Definition*.
16. Sukmawati, N.M.R., Solihin, S., & Susyarini, N.P.W.A. (2019). Dampak pengembangan desa mas sebagai desa wisata di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *Media Bina Ilmiah*, 13(9), pp. 1537. https://doi.org/10.33758/mbi.v13i9.23

Biodata Penulis

Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S. lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 1965 dan sekarang tinggal di Jl. Marakas No. 46, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Beliau telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Biologi di Universitas Negeri Medan tahun 1983-1988, dan melanjutkan studi Magister Sains dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1990-1992, dan meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 1996-2002. Beliau merupakan Guru Besar tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU sejak tanggal 1 Oktober 2011 bagian Kesehatan Lingkungan dan telah banyak meluluskan mahasiswa S1, Lulusan S2 dan S3. Beliau telah banyak melakukan penelitian-penelitian yang terpublikasi di jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional terindeks dan telah banyak melakukan pengabdian masyarakat dan menjalin kerjasama dengan banyak mitra terutama dalam bidang kesehatan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Beliau telah menghasilkan berbagai penelitian,artikel, karya tulis yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga aktif di dalam kegiatan seminar, simposium, workshop baik sebagai narasumber, instruktur, moderator maupun peserta khususnya dibidang Lingkungan hidup. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI tahun 2007. Beliau juga pernah menjabat Ketua Program Studi S2 Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri (MKLI) IKM- FKM-USU tahun 2006-2009, sebagai Sekretaris Program Studi S2 Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri (MKLI) IKM- FKM-USU tahun 2009-2010, Sebagai *Peer Review* Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Universitas Indonesia dan Jurnal Makara Seri Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2007-2016, Sebagai Majelis Wali Keilmuan Pengurus Pusat IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) tahun 2010-2013, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kolegium Kesehatan Lingkungan tahun 2010-2015, Sekretaris LPPM USU tahun 2016 – 2021 dan sebagai Anggota Senat Guru Besar FKM USU periode 1 pada tahun 2014-2019 dan periode 2 pada tahun 2019-2024.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DAN UPAYA BANGKIT KEMBALI PASCA PANDEMI

Iskandar Muda Damanik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata sangat penting dalam banyak hal. Dari segi tinjauan ekonomi, pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun terakhir baik melalui devisa dan penjualan ekonomi. Sektor pariwisata juga membuka peluang usaha jasa pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan dari berbagai sektor. Berbagai negara telah menunjukkan bahwa industri pariwisata selalu menempati peringkat ke-4 atau ke-5 sebagai sumber devisa dalam negeri. Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, hantaman pandemi Covid-19 di 2020 mengakibatkan turunnya kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 56% yaitu menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi.

Destinasi wisata domestik yang sudah dikenal wisatawan mancanegara (wisman), seperti Bali, Bunaken, dan Raja Ampat, menjadi salah satu kekuatan destinasi wisata domestik. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi, peningkatan data dan informasi, serta peningkatan daya tarik wisata gabungan dapat menjadi alternatif peningkatan devisa pariwisata nasional.

Sejak munculnya pandemic virus covid 19 maka sector yang paling terkena imbasnya adalah bidang pariwisata. Pemerintah telah memperkenalkan berbagai insentif untuk memitigasi dampak virus corona terhadap perekonomian domestik. Sebagian besar insentif ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata, mulai dari diskon penerbangan domestik hingga pembebasan pajak hotel dan restoran.

Untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah telah menangguhkan penerbangan dari dan ke China sejak 5 Februari 2020. Karena penurunan pariwisata dari luar negeri, okupansi hotel menurun di banyak daerah penting. Misalnya, di Bali, wabah virus corona mengurangi okupansi hotel hingga 6080%, terutama di daerah yang disukai wisatawan China seperti Nusa Dua, Legian, dan Kuta. Sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun (**https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri)**. Hal ini disebabkan karena hilangnya pendapatan valas dari wisatawan asal China.

Rata-rata jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Indonesia mencapai 2 juta setiap tahunnya, dengan rata-rata pengeluaran sebesar $1.400 per kunjungan.

Pandemi Covid-19 telah membuat perjalanan udara internasional hampir terhenti sepanjang tahun lalu. Hal itu karena banyak negara menolak mengizinkan perjalanan tak penting. Kerugian di sektor pariwisata akibat hal tersebut ditaksir mencapai 2,4 triliun dolar AS. Laporan UNWTO dan UNCTAD memperingatkan, kerugian serupa dapat terjadi tahun ini. Hal tersebut bergantung pada distribusi vaksin Covid-19. Kerusakan ekonomi terparah bakal terkonsentrasi di negara-negara dengan tingkat vaksinasi rendah.

Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, dan 939 ribu orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2020, sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 (Jumhari et al., 2022).

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata, khususnya pendapatan pariwisata dan hiburan, serta produktivitas pegawai di sektor pariwisata Indonesia serta upaya membangkitkan kembali sector pariwisata pasca Pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan mendeskripsikan semua gejala-gejala yang terjadi akibat COVID-19 dan efeknya terhadap kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia.Penelitian ini menggunakan data sekunder,dimana data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui penelahaan kepustakaan, seperti artikel, jurnal, sumber web berita yang terpercaya. Seluruh data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang telah diterbitkan selama pandemi ini berlangsung. Pandemi COVID-19 berimbas pada perubahan sosial di Sumatera Utara dan Indonesi,Pandemi covid 19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian indonesia Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan berupa fakta actual yang menunjukan bagaimana covid 19 di sumatera utara.Teknik pengumpulan data yang di pakai adalah studi kepustakaan ,pengumpulan data sekunder dan dokumentasi teknik Analisa data menggunakan kuantitatif dan kualitatif.Pengaruh yang signifikan pandemik pandemik covid-19 terhadap kinerja karyawan pariwsata di Indonesia. Semakin lama pandemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan kinerja karyawan pariwisata. Penutupan sementara tempat wisata dan hiburan berdampak negatif pada penurunan kinerja karyawan pariwisata seperti pengurangan karyawan, pemotongan gaji dan insentif serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengaruh pandemik covid-19 terhadap pendapatan tempat wisata di Indonesia. Semakin lama pandemi COVID-19 berlanjut, semakin besar dampaknya terhadap pendapatan pariwisata. Indikator pendapatan pariwisata

dan hiburan yang paling dominan adalah pendapatan daerah dari sektor pajak pariwisata dan hiburan. Pengaruh pendapatan pariwisata terhadap tenaga kerja pariwisata Indonesia.Pendapatan tempat wisata semakin menurun, maka berpengaruh pada penurunan kinerja karyawan pariwisata.

2. Masalah

Coronavirus atau COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering,dan rasa Lelah.Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami oleh beberapa pasien meliputi rasa nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis,sakit tenggorokan, diare, kehilangan inderasa rasa dan penciuman, ruam pada kulit, dan perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-29 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas.

WHO (World Health Organization) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya,virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemic terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tetapi lebih pada penyebarannya yang meluas.Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga diri agar masa pandemic ini dapat dihadapi dan selesai dengan cepat.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengahadapi pandemic ini adalah dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah. Oleh karena itu, pandemic ini menimbulkan berkurangnya pemasukan negara di sector pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan objek wisata yang dikunjungi dalam periode waktu sementara (Arjana, 2016 dalam Noerkhalishah, Ersis Warmansyah Abbas, dan Melly Agustina Permatasari, 2020). Peranan sector pariwisata nasional sangat penting sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun ekonomi berkelanjutan di masa mendatang. Sektor pariwisata memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor pariwisata meliputi : tempat rekreasi, hotel, restoran,angkutan serta hal yang mendukung pertumbuhan industry pariwisata lainnya. Terhitung sejak awal 2020 ktivitas jumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini dikarenakan banyak daerah dan negara yang menghentikan penerbangan dan menerapkan lockdown pada wilayahnya. Dengan penyebaran yang begitu cepat dan kelalaian otoritas yang tidak menutup tempatnya atau membatasi jumlah pengunjung selama pandemic, sehingga masalah ini akhirnya mentransformasikan industry

pariwisata karena pengaruhnya terhadap keseluruhan tujuan dari keberadaan pariwisata sehingga memunculkan istilah new normal.

New normal merupakan sebuah peraturan dan scenario baru yang menekankan CHSE (Certified Healthcare Simulation Educator) yang mana diterapkan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek Kesehatan sosial ekonomi. Pada akhirnya, scenario ini mengakui krisis yang mendiami pariwisata jauh sebelum pandemi karena pariwisata pasca-pandemi yang tangguh harus semakin adil dan mampu beradaptasi secara operasional dikarenakan pengaruhnya yang besar terhadap orang, tempat, dan public (Babri, et al., 2022). Penerapan new normal ini disertai dengan berbagai penyelesaian dan solusi untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan industry pariwisata agar bertahan di situasi pandemic ke depannya.

Penelitian ini membahas sejauh mana pengaruh covid terhadap sector pariwisata wisata ? Pengaruh covid dan semakin berkembangnya varian covid 19 memengaruhi kecilnya pendapatan yang akan diterima oleh suatu negara. Dengan berkurangnya pendapatan suatu negara maka akan mempengaruhi segala sektor perekonomian baik dalam bidang jasa,industri,pembangunan infratruktur,lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi. Tulisan ini juga melihat sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan geliat sector Pariwisata Pasca Pandemi.

Dampak Covid-19 Terhadap Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pandemik covid-19 terhadap wisatawan mancanegara dan nusantara di Indonesia. Fenomena ini sudah berlangsung sejak Maret hingga Juli 2020. Semakin banyak warga negera Indonesia yang meninggal dunia dan terinfeksi covid-19, maka semakin banyak turis mancanegara merasa khawatir akan penyebaran covid-19, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang membatalkan kunjungan wisatanya ke Indonesia, Hal ini berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tak Hanua wisatawan mancanegara, Namun banyak pula wisatawan nusantara yang membatalkan kunjungannya ke tempat tempat wisata di beberapa kota dan provinsi di Indonesia. Meningkatnya warga negera Indonesia yang meninggal dunia dan terinfeksi covid-19 merupakan indikator paling dominan penyebab penurunan jumlah kunjungan ke tempat wisata di indonesia. Indikator lainnya ialah sulitnya untuk memperoleh alat pelindung diri(APD), fasilitas rumah sakit belum lengkap dan tenaga medis serta dokter yang sangat terbatas. Pemerintah Indonesia sendiri masih memberlakukan larangan bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia dan juga melarang wisatawan nusantara berkunjung ke tempa-tempat wisata di beberapa kota dan provinsi di Indonesia

Diketahui data yang diterima dari Kemenparekraf Republik Indonesia, 2020 dan Biro Pusat Statistik, 2020 (dalam Piri et al., (2021) bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan sebesar **58,80%** apabila dibandingkan pada bulan Januari hingga Juni 2018 yang berjumlah **7.498.378** orang dengan bulan Januari hingga Juni 2020 berjumlah **3.089.659** orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019,

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan sebesar **59,96%** apabila dibandingkan pada bulan Januari hingga Juni 2019 berjumlah **7.715.512** orang dengan bulan Januari hingga Juni 2020 berjumlah **3.089.659** orang.

Kemudian jika dilihat dari Wisatawan nusantara, maka wisatawan nusantara yang berkunjung ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia mengalami penurunan sebesar **71,98%** apabila dibandingkan pada bulan Januari hingga Juni 2018 berjumlah **303.403.888** orang dengan bulan Januari hingga Juni 2020 berjumlah **85.000.000** orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, Wisatawan nusantara yang berkunjung ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia mengalami penurunan sebesar **69,09%** apabila dibandingkan pada bulan Januari hingga Juni 2019 berjumlah **275.000.000** orang

Pengaruh Covid-19 Terhadap Tempat-Tempat Wisata

- Penurunan Pendapatan bisnis dan pendaptan pajak
  Salah satu pengaruh Covid-19 yang paling berdampak kepada tempat-tempat wisata ialah penurunan pendapatan bisnis tempat wisata dan hiburan sehingga dapat menurunkan pendapatan pajak tempat wisata dan hiburan. Semakin lama pandemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan pendapatan pajak tempat wisata. Di jakarta sendiri, Pengaruh dari Covid-19 menyebabkan terjadinya penutupan sementara tempat wisata dan hiburan sekitar 28 tempat wisata sehingga mengalami penurunan sebesar 80%. Realisasi pajak tempat wisata dan hiburan pada januari hingga Mei 2020 diperkirakan mencapai 122.430.000.000 atau mengalami penurunan sekitar 34,17% apabila dibandingkan dengan januari hingga Mei 2019 yang berjumlah 358.333.000.000
- Penurunan Kinerja Karyawan Pariwisata
  Jika pendapatan tempat wisata sudah menurun otomatis hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pariwsata di .Semakin menurun pendapatan pendapatan tempat wisata, maka semakin berpengaruh pada penurunan kinerja karyawan pariwisata. Indikator pendapatan tempat wisata dan hiburan yang paling dominan adalah jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah dan indikator kinerja karyawan yang paling dominan adalah kinerja tugas. Tidak hanya kinerja karyawan yang terpengaruh, namun juga banyak terjadi pemotongan gaji dan insentif, gaji tidak dibayar bahkan sampai terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal itu menunjukkan dampak dari Covid-19 sendiri sangat berpengaruh kepada keseharian masyarakat.

1. Parawisata Indonesia Pasca Pandemi
   Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin menguat pascapandemi meski belum mencapai level prapandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2023 secara kumulatif mencapai 2,5 juta kunjungan

atau naik 508,87% dibandingkan periode sama tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun memprediksi kunjungan wisman hingga akhir tahun ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan. (Media Keuangan, 2023, "Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi). Berbagai upaya untuk membangkitkan sektor pariwisata yang mati suri selama pandemi berbuah manis. Pada 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) berhasil melampaui target. Kemenparekraf mencatat pada 2022 terdapat kunjungan wisman sebanyak 5,5 juta kedatangan atau di atas target yang sejumlah 1,8- 3,6 juta kedatangan. Sedangkan pergerakan wisnus mencapai 800 juta perjalanan atau di atas target yang sebesar 550 juta perjalanan.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Usaha kolegial antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan pelaku usaha industri pariwisata dalam upaya menjaga momentum penguatan pemulihan sektor pariwisata melalui penerapan kebijakan pengembangan industri pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis digital.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi peningkatan sector parawisata dilakukan melalui sejumlah program, antara lain pengembangan desa wisata, kampanye lokasi pariwisata baru, kampanye rekrutmen influencer parawisata, bantuan atau insentif ke pelaku usaha pariwisata, sertifikasi tempat-tempat wisata sesuai standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE), dan penyediaan fasilitas vaksinasi Covid-19 di lokasi wisata.

Di samping itu, dukungan pemerintah selama masa pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada sektor pariwisata juga signifikan dalam memberikan bantalan sekaligus mempersiapkan sektor tersebut dalam menyerap potensi kenaikan aktivitas pariwisata dalam jangka menengah.

Kembalinya kepercayaan pada sektor pariwisata juga tak lepas dari efektivitas upaya penanganan pandemi yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan destinasi pariwisata yang sangat layak untuk dikunjungi kembali, terutama oleh wisman.

5. Rencana Tindak Lanjut

Langkah strategis, inovatif, adaptif, dan kolaboratif perlu dilakukan untuk pertumbunan sektor pariwisata pada tahun 2023 termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku pariwisata dalam mengembangkan usaha melalui

deregulasi. Situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan mudah berubah di tengah era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) akan menimbulkan tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pariwisata. Upaya penerapan program yang sudah dirumuskan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah (RPJMN) 2020-2024, dalam bentuk pariwisata yang berkelanjutan (tourism sustainability), peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah, transformasi digital, dan peningkatan nilai tambah perlu ditingkatkan.

6. Kesimpulan dan Saran

Dampak Covid-19 sendiri sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat terutama pada tempat-tempat wisata. Munculnya pandemik ini sangat memberikan rasa khawatir dan gelisah kepada para wisatawan mancanegara maupun nusantara yang ingin berwisata. Alhasil, banyak wisatawan mancanegara/nusantara yang mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat-tempat wisata yang ada. Dampak dari penurunan jumlah wisatawan tersebut tentunya akan mempengaruhi pendapatan dan pelayanan yang diberikan. Semakin lama pandemik ini berlangsung, maka tempat-tempat wisata akan terus mengalami penurunan dari segi pengunjung,pendapatan bisnis, pendapatan pajak dan pelayanan yang ada. Tidak hanya itu, namun para karyawan yang bekerja di beberapa tempat wisata juga ikut terpengaruh dampaknya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu banyaknya karyawan yang terkena PHK. Tentunya semakin banyak karyawan yang terkena PHK maka angka pengangguran juga akan melambung naik yang bisa menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran. Maraknya pengangguran juga memungkinkan naiknya angka kejahatan/kriminalitas. Hal itu menunjukkan, dampak dari pandemic ini sangat besar hingga seluruh aspek dalam suatu negara bisa terkena dampaknya

Itu sebabnya pemerintah memperlakukan beberapa protokol seperti Lockdown,PSBB dan PPKM. Upaya tersebut dilakukan guna menekan angka dari korban Covid-19 itu sendiri. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat betapa pentingya mengikuti protokol kesehatan seperti, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Dengan diberlakukanya protol tersebut, maka secara tidak langsung kita sebagai masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menekan angka korban yang terkena Covid-19. Semakin menurun jumlah dari korban Covid-19 tersebut, maka perlahan-perlahan para tempat wisata juga akan bisa beroperasi kembali namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Banyaknya dampak positif yang diberikan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat menyebabkan industri pariwisata harus tetap dikembangkan dengan melibatkan semua unsur yang terkait, karena antara perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Jika pariwisata berkembang dengan baik maka ekonomi masyarakat juga membaik. Sebaliknya jika pariwisata memburuk maka perekonomian

masyarakat juga akan memburuk. Pemerintah harus memperbaiki tatakelola sektor pariwisata dan infrastruktur menjadi lebih ramah lingkungan dan modern dengan didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang memberikan manfaat bagi upaya pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

Babri, S., Díez-Gutiérrez, M., Aspen, D. M., & Johansen, B. H. (2022). A simulation model to assess emission reduction policies in tourism transport: Case study of the Geiranger fjord UNESCO world heritage site in Norway. International Journal of Sustainable Transportation, pp.1-14. https://doi.org/10.1080/15568318.2022.2137712

CNN News (2020). Menghitung Kontrbusi Sektor Pariwisata. Diperoleh melalui artikel dari web : **https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri**

Jumhari, M. (2022). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Bengkel Honda Nss Ahass 1838 Karawang. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 321-328.

Kemenparekraf Republik Indonesia, (2020). Diperoleh melalui artikel dari web : **https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia**

Media Keuangan (2023). Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi - Website Name" Available in https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi

Mejjad, N., Rossi, A., & Pavel, A. B. (2022). The coastal tourism industry in the Mediterranean: A critical review of the socio-economic and environmental pressures & impacts. Tourism Management Perspectives, pp. 44, 101007. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101007

Piri, P. H., Mananeke, L., & Roring, F. D. (2021). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Grabcar Di Kota Manado Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(3), 1049-1057. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/35231

Biodata Penulis

Prof. Dr. Iskandar Muda Damanik, SE, M.Si, Ak, CA, CRP, CSRA, CSRS, IPSAS, CPA adalah Staf Pengajar Tetap pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU Medan), Prodi Magister Akuntansi (M.Si) dan Program Doktor (S3) Ilmu Akuntansi USU. Selain itu, beliau juga sebagai staf pengajar pada S3 Ekonomi Syariah, FEBI UIN Sumatera Utara. Beliau juga aktif pada organisasi profesi seperti Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Iindonesia (ISEI), Institue of Certified Sustainability Practioners (ICSP) Netherland dan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), USA.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE TOURISM UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Juliati Br. Tarigan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Latar Belakang

Pariwisata sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia terutama dalam kegiatan sosal dan ekonomi. Pada awal abad ke-20 pariwisata hanya dinikmati oleh orang-orang kaya namun kini sudah menjadi bagian hak azasi manusia. Hal ini bukan hanya dinikmati oleh negara maju tetapi sudah mulai dirasakan oleh negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang dalam tahap pembangunannya juga berusaha untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata sehingga pemasukan devisa dapat meningkat[1]. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor primadona karena Indonesia memiliki beragam kekayaan ekosistem alam dan budaya yang luar biasa hampir di seluruh penjuru Nusantara. Keadaan alam dan keunikan budaya ini akan mengundang banyak wisatawan lokal dan Internasional datang ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan pariwisata ini maka perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya karena masih banyak potensi alam Indonesia yang masih tersembunyi supaya dalam proses pengembangannya tidak merusak lingkungan (dampak negative) dan meningkatkan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat (dampak positif), serta dampak sosial yang merupakan kombinasi dari dampak ekonomi dan lingkungan[2]. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negative maka dikembangkanlah pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan dengan melaksanakan perencanaan pembangunan kepariwisataan yang tetap memperhatikan keunikan, keanekaragaman, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Ini memberikan makna bahwa pembangunan kepariwisataan merujuk pada kebijakan pariwisata berkelanjutan yang dapat mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang sesuai dengan budaya setempat, secara sosial dapat diterima, diprioritaskan untuk masyarakat setempat, ramah lingkungan dan tidak diskriminatif.

Pariwisata berkelanjutan juga di jabarkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, yang pada dasarnya pariwisata berkelanjutan tetap memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa yang akan datang atau masa depan yang membawa manfaat bagi

kesejahteraan masyarakat. Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan ini telah sesuai dengan indikator *United Nation Word Tourism Organization* (UNWTO) dan mendapatkan pengakuan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), sehingga dapat mensinergikan, memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multicultural dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya didestinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. Ada empat kategori dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 yaitu:

1. Kriteria perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi;
2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal yang mencakup kriteria pemantauan ekonomi, peluang kerja untuk masyarakat lokal, fungsi edukasi sadar wisata, pencegahan ekploitasi, dukungan untuk masyarakat, dan mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil;
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjunga yang mencakup kriteria perlindungan atraksi wisata, pengelolaan pengunjung, perilaku pengunjung, perlindungan warisan budaya, interpretasi tapak, dan perlindungan kekayaan intelektual;
4. Pelestarian lingkungan, yang mencakup kriteria risiko lingkungan, perlindungan lingkungan sensitive, perlindungan alam liar (flora dan fauna), emisi gas rumah kaca, konservasi energi, pengelolaan air, keamanan air, kualitas air, limbah cair, mengurangi limbah padat, polusi Cahaya dan suara, dan transportasi ramah lingkungan.

Merujuk pada kriteria yang dimaksud diatas maka untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan bukanlah hal yang mudah namun membutuhkan penanganan yang begitu kompleks. Namun demikian untuk mewujudkannya tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lokal yang merupakan subjek dan bukan merupakan objek sesuai dengan kriteria kedua. Hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan pariwisata berkelanjutan sangat erat kaitannya dalam mengentaskan kemiskinan, karena sumberdaya manusia (SDM) merupakan factor penting dalam mewujudkan keberlangsungan suatu industri pariwisata dimana kemampuan SDM dapat di ditingkatkan melalui pemberdayaannya[3], dengan demikian keberadaan pariwisata dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan atau pengentasan kemiskinan[4].

Pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan dengan perubahan atau transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemberdayaan merupakan suatu proses menumbuhkan kekuasaan dan kemampuan diri masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Proses pemberdayaan ini diharapkan dapat mengubah strata sosial masyarakat dari terendah menjadi masyarakat lapisan menengah dan atas. Proses ini dapat terwujud jika masyarakat tidak hanya diberikan kesempatan tetapi dapat diberikan bantuan atau difasilitasi oleh pihak lain yang berkomitmen untuk itu. Hal ini bisa saja dilakukan oleh sekelompok orang atau institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (*enabler*) bagi mereka[5]. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tentunya yang diharapkan

sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat lokal dimana destinasi pariwisata berada adalah pemilik ataupun pengembang pariwisata. Harapan ini tentunya harus didukung oleh suatu kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Kebijakan ini juga harus dapat memenuhi keterwakilan kondisi masing-masing lokasi atau daerah dengan komunitas yang beragam[6,7]. Dengan demikian dapat terwujud aspek ekonomi sektor pariwisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan kerja dan pengembangan kegiatan masyarakat secara berkelanjutan untuk dapat mengentaskan kemiskinan[6].

2. Masalah

Perbaikan strata sosial masyarakat di destinasi pariwisata perlu kiranya dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat lokal di destinasi pariwisata yang rentan dan lemah serta individu-individu yang miskin, sehingga mereka berdaya untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: rasa percaya diri, mengutarakan aspirasi, memiliki mata pencaharian yang tetap, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Setelah masyarakat lokal di tempat pariwisata sudah dapat diberdayakan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan maka akan menghasilkan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan demikian terjadi pengentasan kemiskinan. Untuk itu bagaimanakah peranan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan?

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat lokal dimana adanya destinasi wisata dengan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting secara partisipatif. Proses partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat didekati dengan dua perspektif yaitu:

1. Melibatkan masyarakat stempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan;
2. Partisipasi transformasional yang bertujuan untuk merubah strata lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri. Selanjutnya setelah pemberdayaan masyarakt maka akan tercipta kondisi dan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang dan mampu berperan aktif dalam parawisata berkelanjutan. Dengan demikian akan terbentuk individu atau masyarakat menjadi mandiri dalam berpikir, bertindak, dan apa yang mereka lakukan.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang mudah untuk dibicarakan namun sangat sulit untuk pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena konsep ini merupakan konsep yang holistis yang secara terus menerus harus digali dan diberdayakan dari semua sisi umur masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan masyarakat lanjut usia harus ikut terlibat dan di beri pemahaman. Masyarakat diberdayakan dalam hal arti filosofi hidup dalam masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, dan penampilan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka masyarakat sudah dapat dilibatkan dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan dalam pariwisata setelah mendapatkan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung akan memperoleh pengelolaan dalam skala kecil yang memilki rasionalitas keunikan tersendiri dalam properti dan karakter serta secara ekologis aman dan tidak banyak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan dibanding dengan pengelolaan secara konvensional. Parawisata yang dikembangkan oleh masyarakat berpeluang untuk mengembangkan atraksi-atraksi wisata dalam skala kecil sehingga dapat dikelola oleh pengusaha-pengusaha lokal dan komunitas masyarakat. Komunitas yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata dapat menikmati keuntungan dari proses pengembangan pariwisata[8]. Berdasarkan hal tersebut maka keterlibatan masyarakat setelah diberdayakan dalam pengembangan pariwisata mendukung atau memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Menteri Parawisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pariwisata berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata berkelanjutan mengedepankan masyarakat yang partisipasi aktif yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dan tetap menjaga kelestarian atau kualitas lingkungan, kehidupan sosial dan budaya. Implementasi ini mampu mendukung pencapaian tiga pilar berkelanjutan (*the three pillars of sustainability*) yakni: tercapainya keberlanjutan dalam bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan[9]. Model ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Model ini juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan pariwisata sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat setempat yang tentunya dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, maksudnya adalah bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam pengembangan pariwisata atau masyarakat terlibat aktif dalam mengelola dan mengontrol pariwisata di daerahnya[10]. Konsep pariwisata berkelanjutan yang

melibatkan masyarakat atau komunitas terdiri dari empat dimensi pemberdayaan yaitu pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial dan politik. Keempat pilar ini menekankan bahwa pentingnya masyarakat atau komunitas lokal memilki control atas pariwisata didaerahnya dari berbagai manfaat atas kegiatan pariwisata[11]. Untuk itu dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan metode dan fasilitasi keterlibatan masyarakat[12], melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata sehingga mereka dapat mengetahui dampak bagi kehidupan sosial dan mata pencaharian mereka[13], implementasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dimulai dengan identifikasi, kesadaran, penguatan, perlindungan, dan kemandirian[3], kesadaran pariwisata dan potensi bisnis masyarakat di bidang pariwisata[4], memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengembangkan inisiatifnya untuk kegiatan pariwisata kreatif misalnya mejadikan produk-produk pertanian menjadi souvenir wisatawan[14].

Keterlibatan masyarakat yang begitu menyeluruh dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, maka hal- hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Filosopi hidup di masyarakat
   Filosofi pengembangan pariwisata harus diselaraskan dengan filosofi masyarakat, yang mana masyarakat harus memandang bahwa wisatawan bukanlah menjadi saingan. Perlu disadarkan bahwa wisatawan atau masyarakat yang datang akan membawa biaya/uang dan dibelanjakan sehingga dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan ditanamkan bahwa kedatangan wisatawan dapat menciptakan lapangan kerja dengan demikian masyarakat wajib menghormati dan melayani agar tamu dapat betah dan berlama-lama tinggal di destinasi wisata.
2. Pendidikan generasi muda
   Pendidikan sangat penting bagi generasi muda terutama Pendidikan tentang informasi-informasi daerah objek wisata baik informasi fisikal maupun historis situs-situs yang ada di destinasi tersebut sehingga menjadi asset dan jasa yang dapat dijual serta dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan wisatawan. Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk formal dan informal sehingga masyarakat dapat megemas dan menjelaskan informasi kepada wisatwan dengan jelas dan benar berbagai kondisi, situasi dan historisnya dengan demikian akan menjadi bekal dan pengetahuan bagi pengunjung.
3. Keterampilan masyarakat
   Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh wisatawan yakni keterampilan menerima tamu, memberikan informasi yang dibutuhkan, menyuguhkan atraksi-atraksi khas destinasi wisata dan keterampilan dalam membuat cendramata yang khas diinginkan oleh wisatawan. Keterampilan tentunya berkaitan dengan ide-ide dan kreativitas masyarakat dengan demikian masyarakat harus selalu diberikan pembinaan dan pengembangan kreativitas.

4. Sikap atau tata krama
   Sikap atau tata krama yang baik harus dimiliki oleh masyarakat di sekitar objek wisata, ibarat suatu rumah maka yang menjadi tuan rumah adalah masyarakat di objke wisata dan yang menjadi tamu adalah wisatawan. Untuk dapat betah berlama-lama tamu dirumah tersebut maka tuan rumah harus ramah dan memiliki tata krama yang baik. Umumnya tata krama sejalan dengan penerimaan filosofi masyarakat terhadap pariwisata. Bukan berarti masyarakat harus merubah sikap atau tata krama sesuai dengan tata krama wisatawan tetapi harus menunjukkan kemuliaan agar wistawan betah dan merasa aman di destinasi wisata. Untuk itu perlu pembinaan terhadap sikap atau tata krama secara terus-menerus bagi masyarakat di objek wisata.
5. Aturan bermasyarakat
   Aturan bermasyarakat yang ada diobjek wisata harusnya dikemas dengan baik sehingga menjadi daya tarik bagi wisata dan merupkan daya tersendiri sehingga ingin mempelajarinya mengenai aturan masyarakat yang sudah dipegang teguh sejak dulu kala. Hindari adanya anggapan bahwa jika pariwisata berkembang maka aturan masyarakat akan makin merosot atau rusak. Jangan pula ada pemaksaan bagi wisatawan untuk mengikuti aturan bermasyarakat di destinasi wisata, tetapi menjadi wahana Pendidikan bagi wistawan akan keunggulan aturan bermasyarakat yang perlu untuk dikembangkan.
6. Adat
   Adat yang berbeda dari masing-masing daerah merupakan aset wisata, sehingga adat tersebut perlu dikembangkan dan diperkenalkan. Kebanyakan wisatawan datang ke objek wisata tertentu hanya tertarik karena keunikan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakatnya. Adat memiliki filosofi hidup dan mengandung Pendidikan yang luar biasa karena adat muncul melalui proses kehidupan bermasyarakat yang cukup Panjang sesuai dengan masa kehidupan masyarakat itu sendiri.
7. Penampilan
   Penampilan merupakan daya Tarik yang luar biasa bagi wisatawan, baik penampilan yang dimiliki oleh masyarakat yakni penampilan sikap dan aura jiwa masyarakat di objek wisata, dan juga penampilan lingkungan yang disesuaikan dengan ketertarikan wisatawan maupun ciri khas daerah objek wisata. Dengan demikian penampilan perlu dipelihara dan dipertahankan agar wisatawan merasa aman dan tenteram.
8. Partisipasi masyarakat
   Untuk dapat mengajak masyarakat terlibat langsung dalam mengarahkan kegiatan pariwisata maka pemberdayaan dititikberatkan pada partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan:
   - Lebih efektifnya perumusan persoalan;
   - Memperoleh informasi dan pemahaman dari sumber asli dan realistis;
   - Membuat rumusan penyelesaian altertanif yang dapat diterima secara social;

- Menumbuhkan sifat memiliki pada rencana sehingga dapat memperlancar rencana dan penerapan;
- Menjauhkan perselisihan yang tajam;
- Menggalang swadaya masyarakat lebih mudah;
- Meningkatkan posisi pemberdayaan masyarakat yang setara dengan stakeholder[15].

6. Kesimpulan dan Saran

Pemberdayaan masyarakat sangat memiliki peranan penting dalam proses perkembangan pariwisata berkelanjutan untuk terwujudnya pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang sudah diberdayakan dalam pengelolaan pariwisata akan membuat wisatawan merasa aman, nyaman dan betah untuk tinggal berlama-lama di tempat wisata sehingga menambah pendapatan, peluang kerja (*tour guide, waiter, bell boy* dll) dan mendapatkan devisa (*national balance payment*) melalui pertukaran mata uang asing, serta adanya perubahan inftrasturktur menjadi lebih baik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal ditempat wisata. Dengan demikian akan merubah keadaan ekonomi dan social masyarakat menjadi ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai.

Daftar Pustaka

1. Fandeli, C., dan Mukhlison, 2000, Pengusahaan Ekowisata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
2. I Nyoman Sukra Arida, L. K., 2017, Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Analisis Parawisata.
3. Sinaga, Kariaman, Lubis, Suwardi, Sihombing, Marlon, & Dalimunthe, Ritha F. (2018). Implementation of Community Empowerment-Based Tourism Development Policy (Case in Samosir Regency, Indonesia). International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Vol. 9, No. 9, pp. 585-599. IAEME Publication, India
4. Cahyaningrum, Dinis. (2017), Community Empowerment Based Lokal Wisdom in Tourism of Bajo Community, Wakatobi. International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 6, No. 11, pp. 196-201.
5. Mahmudi, Ahmad. 2002. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dinamika Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik. Edisi Agustus. 2002. FISIP UNS
6. Karmilah, Mila, Nuryanti, Wiendu, Soewarno, Nindyo, & Setiawan, Bakti. (2014). Commuity Involvement in Tourism Development: As Strategy for Poverty Alleviation After The Earthquake (Case Study: Kasongan Village Yogyakarta). International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 4, No. 12, pp. 1-7.
7. OECD Tourism Trends and Policies 2018. Paris: OECD Publishing.

8. Nasikun, 2000, Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Parawisata Berbasis Komunitas,
9. IND Putra, 2015, Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali, Penerbit Bukti Arti, Denpasar Bali.
10. Kurniawan, T., dan Ikke, F., 2020, Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Perspektif Implementasi Kebijakan, Journal Pariwisata Pesona, Vol. 05 N0. 1, p 1-11.
11. Scheyvens, Regina. (1999). Case Study – Ecotourism and The Empowerment of Lokal Communities. Tourism Management, Vol. 20, No. 2, pp. 245-249. Elsevier, Amsterdam
12. Hernanda, Dedy Wahyu, Mindarti, Lely Indah, & Riyanto. (2018). Community Empowerment Based on Good Tourism Governance in The Development of Tourism Destination (Case Study of Kawah Ijen Tourism Buffer Zone "Kampung Kopi" Gombengsari Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, Vol. 6, No.2, pp. 126-135.
13. Albrecht, Julian Nina. (2010). Challenges in Tourism Strategy Implementation in Peripheral Destinations – The Case of Stewart Island, New Zealand. Tourism and Hospitality Planning & Development, Vol. 7, No. 2, pp. 91-110. Taylor & Francis Group, Abingdon.
14. Butarbutar, Regina R., & Soemarno. (2012). Community Empowerment Efforts in Sustainable Ecotourism Management in North Sulawesi, Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari, Vol. 3, No. 1, pp. 1-7. Universitas Brawijaya, Indonesia
15. Gumelar, S. S., 2010, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure, Yogyakarta: AMPTA Press

Biodata Penulis

Prof. Dr. Juliati Br. Tarigan, SSi, MSi, lahir di Kutambelin – Kabupaten Karo tanggal 3 Mei 1972. Mengawali pendidikan SD Negeri di Keriahen lulus tahun 1985 dan SMP Negeri di Tigabinanga lulus tahun 1988 serta pendidikan menengah atas di SMA Kristen 1 Nasrani – Medan lulus tahun 1991. Menempuh pendidikan S1 pada program studi Kimia di Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1996. Selanjutnya menyelesaikan program Magister Kimia di tahun 1999 dan program Doktor Kimia di tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 1999 mengabdikan diri sebagai Staf Pengajar / Dosen di Departemen Kimia – FMIPA USU pada bidang ilmu Kimia Organik. Menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kimia Organik – FMIPA USU sejak tahun 2020 dan koordinator mata kuliah Kimia Dasar di UPT Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA USU) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Kimia Organik, penulis saat ini mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Kimia Organik antara lain Kimia Organik I dan II, Sintesis Kimia Organik, Proses Agrokimia, Teknik Reaksi Kimia Organik dan Oleokimia & Karbohidrat serta Kimia Transformasi Hasil Pertanian pada program studi S1, S2 dan S3 Kimia. Beberapa hibah penelitian baik tingkat nasional melalui Dirjen Dikti dan tingkat lokal (Talenta) serta hibah pengabdian pada masyarakat telah dimenangkan oleh penulis. Penulis telah mempublikasikan beberapa artikel hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan WoS seperti di RSC, ACS, dan Elsevier. Beberapa paten sederhana dan buku terkait hasil penelitian dan pengabdian juga telah dihasilkan penulis.

KOMPETENSI KOMUNIKASI DALAM PEMASARAN COFFEE SHOP DI ERA DIGITAL

Lusiana Andriani Lubis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Latar Belakang

Saat ini, setiap orang dapat berkomunikasi di mana pun dan kapanpun melalui jaringan internet, meskipun berasal dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, ideologi, dan suku bangsa yang berbeda. Perkembangan kajian komunikasi, terjadi pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan, tertulis, imajiner, atau model lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Proses pembagian informasi itu dilakukan juga melalui bahasa tubuh, gaya atau tampilan pribadi, atau bantuan media lain di sekitarnya yang dapat memperjelas pesan yang disampaikan. Komunikator harus menguasai bahasa dan budaya komunikannya agar komunikasi dapat berjalan lancar (Lubis,2023). Dinamika komunikasi berjalan sebagaimana teknologi komunikasi tersebut digunakan oleh para penggunanya , baik secara langsung maupun di dunia maya . Kompetensi komunikasi daripada individu, baik secara perorangan, kelompok dan organisasi tidak luput dari perhatian. Adakah itu dengan menggunakan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa sampai kepada new media seperti kehadiran media sosial yang mampu bergerak di ruang tanpa batas (Lubis, 2016). Komunikasi itu dapat terjadi antara orang-orang berbeda bangsa (*international*), antaretnik (*interethnical*), kelompok ras (*interracial)*, dan komunitas bahasa (*intercommunical*) sebagai proses pertukaran pikiran dan makna yang berbentuk simbol-simbol (Samovar dan Porter, 2010 dalam Lubis, 2023).

Berkaitan dengan judul di atas, sangat menarik untuk menyikapi maraknya pertumbuhan bisnis coffee shop di luar negeri maupun di dalam negeri seperti di Indonesia khususnya di kota kota. Sebagaimana diketahui bahwa masa lalu, kopi identik dengan minuman untuk golongan orangtua, akan tetapi di masa kini kopi menjadi tren baru untuk anak-anak muda kalangan generasi milenial dan lintas generasi dan gender. Industri kopi terus berkembang dari waktu ke waktu. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia menjadi pasar yang sangat menarik bagi jaringan perusahaan kopi global tentunya dengan jumlah populasi Indonesia yang mencapai 273 juta jiwa lebih (https://dukcapil.kemendagri.go.id).

Kopi adalah minuman yang semakin familiar untuk semua orang tidak memandang usia. Di Indonesia dapat ditemui budaya minum kopi di seluruh daerah, dimana sebagian besar masyarakatnya sudah terbiasa meminum kopi

sebagai minuman keseharian mereka. Produsen kopi berlomba-lomba untuk membuka kedai kopi baru di mall dan setiap sudut kota yang ada di kota-kota di Indonesia, tak terkecuali di kota Medan. Keadaan ini membuat anak muda memiliki pengetahuan tentang kopi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi muda masa kini yang disebut dengan generasi milenial memahami alat-alat seduh manual terkini seperti *pour over, immersion, boiling dan cold brew*. Mereka juga tak canggung lagi dengan penyebutan sajian kopi yang diadaptasi dari negara Barat, seperti *espresso, doppio, cappucino, cafe macchiato* ataupun *Cafe latte*. Perkembangan ini didukung dengan kompetisi 'Barista' dan 'Brewer' yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan generasi milenial. Hal ini tidak terlepas dari internet berperan sangat besar di dalam pesatnya kemajuan ini. Tren kopi yang ada di Jepang, Taiwan, Australia, Amerika, atau Eropa akan cepat menyebar di Indonesia.

Sekitar tahun 2002, dunia kopi telah memasuki masa yang disebut dengan era *third wave coffee* (kopi gelombang ketiga). Ini merupakan lanjutan dari dua gelombang di dunia kopi yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama ditandai dengan industrialisasi di dunia kopi. Kemunculan kopi instan ada di era ini. Gelombang kedua ditandai dengan kehadiran jaringan kedai kopi yang memperkenalkan minuman kopi dengan kreativitas tinggi sehingga menarik minat anak muda. Penyajian kopi makin menarik karena ditambah dengan sirup-sirup perasa tertentu seperti karamel atau krim. Jaringan kedai kopi The coffee bean & Tea leaf dan Starbucks dari Amerika Serikat membuka ratusan cabang di luar Amerika menandai ekspansi global kedai kopi bergaya Amerika di seluruh dunia. Kedai kopi mereka diadaptasi dari budaya minum kopi dari negara Italia, sehingga menu yang menjadi dasar adalah sajian kopi *espresso* dan susu. Gelombang ketiga adalah era saat ini, gelombang ini ditandai dengan gerakan bahwa kopi seharusnya diapresiasi layaknya seni, hal yang sudah lebih dulu terjadi di industri minuman *wine*. Konsumen kopi di era ini lebih peduli terhadap asal-usul kopi, bagaimana kopi bisa ditelusuri sampai ke petani penanamnya (*Single Origin*), bagaimana kopi disajikan dengan peralatan modern dan canggih dan dipanggang dengan sesuai profil roasting diantaranya *light to medium* yang tidak terlalu gelap agar karakter asli biji kopi tidak hilang, dan beberapa skema sertifikasi terkait proses perlindungan konsumen seperti sertifikasi organik, sertifikasi kepedulian terhadap hutan hujan tropis (*Rainforest Alliance*), perdagangan yang berkeadilan (*Fairtrade International dan UTZ Certified*) bagi para petani kopi bertujuan untuk mereka lebih sejahtera.

Perkembangan Coffee Shop atau Warung Kopi semakin marak dan berada di setiap sudut kota. Tentunya ini akan membuat semakin tingginya persaingan bisnis kuliner sub sektor kopi itu sendiri. Coffee Shop sendiri terbagi atas beberapa jenis sesuai dengan menu dan peralatan yang digunakan. Berkah era gelombang ketiga (*third wave*) hingga sekarang ini, kopi yang kita konsumsi dibeli berdasarkan asal usul dan cara pembuatan yang benar-benar diperhatikan sebelum disajikan. kehadiran coffee shop, maupun roastery yang mengedepankan kualitas biji kopi. Minuman kopi

berkembang dengan berbagai ragam teknik menyeduh menggunakan alat-alat yang terbaru. Coffee shop berkompetisi untuk menghadirkan suasana interior terbaik untuk menarik calon konsumen. Merek-merek dari luar negeri memaksimalkan kehadiran kedai kopi mereka di mall-mall terbaik di kota, dan mengoptimalkan desain interiornya. Jika dilihat dari sisi konsumen, interior dan emosi konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ulang, dan yang paling besar pengaruhnya adalah interior (Pramatatya, Najib, & Nurrochmat, 2015). Ini menunjukkan bahwa interior dampaknya besar dalam meningkatkan minat beli konsumen.

Adanya atmosfer yang dibentuk dari suasana kedai kopi yang nyaman, maka akan membuat konsumen memiliki emosi positif. Emosi positif ini akan menentukan keputusan pembelian mereka. Tidak hanya coffee shop mewah yang segmennya untuk kalangan atas, kedai kopi yang mengincar segmen pelajar dan mahasiswa akan berusaha optimal untuk menghidupkan suasana cafenya dengan interior yang sebaik mungkin.

2. Masalah

Berangkat dari uraian di atas, bagaimana kompetensi komunikasi pemilik kedai kopi/ coffee shop yang saat ini sangat pesat pertumbuhannya di Indonesia dan peran media sosial kepada konsumen dari segala golongan usia sebagai penikmat kopi ?

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Ada beberapa pemikiran yang dapat dituangkan, antara lain kompetesi komunikasi, media sosial dan pesan kreatif dalam pemasaran Coffee shop.

4. Strategi Pemecahan Masalah

1. Kompetensi Komunikasi

Komunikasi diharapkan untuk memahami dan menganalisis lingkungan operasi organisasi terhadap tantangan dan peluang komunikasi. Untuk dapat mengaktualisasikan hal ini, maka harus menunjukkan efektivitas dalam: 1.) Memahami fungsi bisnis yang selaras dengan prioritas organisasi dan kebutuhan serta preferensi audiens, 2.) Mengembangkan pendekatan komunikasi strategis yang selaras dengan arah strategis dan kebutuhan bisnis, 3.) Mengembangkan dan mengimplementasikan anggaran operasional, 4.) Mengelola hubungan antara fungsi-fungsi lain yang bersinggungan atau memengaruhi strategi dan rencana komunikasi, 5.) Mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan peluang dan tantangan komunikasi yang dihasilkan dari perubahan bisnis, serta 6.) Memberikan saran komunikasi tentang berbagai masalah bisnis seperti fluktuasi pasar, negosiasi serikat pekerja, masalah lingkungan dan keberlanjutan, reputasi dan manajemen krisis

Kompetensi komunikasi dalam bisnis juga dapat dikembangkan melalui pemahaman secara keseluruhan strategi bisnis sehingga objektivitas

bisnis dapat tercapai serta langkah dalam mencapai objektivitas tersebut dapat menjadi lebih spesifik. Apabila objektivitas bisnis dapat diidentifikasi, maka diperlukan kebijakan bisnis sehingga semua orang dapat memiliki kemampuan dan batasan yang saling menghormati objektivitas bisnis bersama.

Kompetensi Komunikasi memerlukan komunikator yang profesional menerapkan pemikiran strategis dan menafsirkan kebutuhan bisnis sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka, untuk memberikan hasil yang berarti. Untuk melakukannya mereka harus menunjukkan efektivitas dalam : 1.) Mengidentifikasi dan memahami tantangan dan peluang komunikasi dalam organisasi dan pasar eksternal, 2.) Menggunakan penelitian dan pengukuran untuk menginformasikan strategi dan mengevaluasi efek komunikasi pada organisasi dan pemangku kepentingannya, 3.) Mempraktikkan komunikasi yang efektif berdasarkan pendekatan yang menunjukkan hasil (praktik terbaik), 4.) Mengelola proses komunikasi strategis dari awal hingga akhir, serta 5.) Menyampaikan komunikasi yang relevan dan bertarget selaras dengan kebutuhan bisnis dan audiens

Selain itu kemampuan dalam menggunakan berbagai saluran media sosial dan taktik untuk menyampaikan pesan. Tujuan saluran dan taktik ini adalah untuk pemanfaatan media seperti apa yang bisa digunakan dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Selain itu saluran berfungsi sebagai penghubung antara sumber dan penerima. Saluran pesan dapat berbentuk visual, auditori, gerakan, dan aroma. Oleh karenanya memahami hubungan antara berbagai saluran komunikasi (digital, cetak, tatap muka) adalah keputusan yang bijak dalam bisnis

2. Media Sosial

Hasil survei Nasional penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan bahwa dari 266,91 Juta total penduduk Indonesia terdapat 196,71 Juta jiwa yang penetrasi pengguna internet, hal tersebut menunjukkan 73,7% dari total masyarakat Indonesia. Adapun perkembangan yang ditunjukkan dari tahun 2019 ke 2020 itu sebesar 25.537.353,5 jiwa pertumbuhan pengguna internetnya. Berdasarkan hasil survei APJII tahun 2019-2020 mengenai provinsi dengan kontribusi pengguna internet terbesar di Pulau Sumatera ini dikuasai oleh Provinsi Sumatera Utara yaitu 4,3% dibandingkan Provinsi di pulau Sumatera lainnya. Selain itu dilihat dari segi umur, usia pengguna internet ini cukup tinggi pada umur 20-34 tahun, hal ini dinilai karena pada umur tersebut sangat aktif dalam menggunakan internet, terus memperbaharui informasi yang didapat dari berbagai sumber. (apjii.or.id, 2020).

Perusahaan informasi dan pengukuran global mengumumkan hasil riset mengenai Indonesia. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren pembaca media baca perlahan mulai bergeser ke media Online. Menurut Helen Katherina sebagai direktur eksekutif Nielsen Media hal ini dikarenakan masyarakat mulai merasa bahwa informasi seharusnya didapatkan secara

gratis (25/8/2020). Data survei menunjukkan pembaca media Online mencapai hingga 6 juta orang, yang mana lebih banyak dibandingkan dengan pembaca media cetak yang hanya sebanyak 4,5 juta orang. Kini media cetak menjadi pilihan ke 5 masyarakat sebagai media untuk mendapatkan informasi sebesar 8 % sedangkan penggunaan internet sebesar 43%. (suara.com, 2020).

Media Online memberikan informasi mengenai perkembangan suatu peristiwa dan terus berkembang seiring waktu, tak jarang muncul informasi-informasi dari sudut pandang yang berbeda. Audiens media massa Online dinilai melek teknologi karena media Online dalam pengoperasiannya menggunakan jaringan internet dan komputer. Dengan menggunakan media massa Online, perhatian audiens lebih tertuju kepada berita apa yang ingin mereka lihat atau cari, tidak ada yang dapat mengontrol perhatian audiens selain audiens itu sendiri.

Pengawasan media Online berbeda dengan pengawasan dalam media sosial. Dewan pers (pengawas) mengawasi media cetak, dan kelompok kerja (satgas) mengawasi media Online (*website*) sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dewan pers. Bahkan dari segi hukum sekalipun dalam website pun harus berbadan hukum atau mempunyai status dan izin peran sebagai afiliasi, karena website yang berbasis media massa Online lebih banyak ditujukan pada produk berita berupa berita. Bukan sekedar informasi lalu disampaikan kepada masyarakat tanpa pengawasan. Masyarakat mulai menggemari media Online, dikarenakan media Online dapat memberikan berita dengan cepat dan memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan media massa konvensional terpinggirkan di mata masyarakat karena keterbatasan waktu, ruang dan jarak. Pemberitaan pada media Online yang dinilai sangat luas menyebabkan masyarakat harus lebih bijak dalam menerima informasi, apakah informasi yang disampaikan itu benar adanya atau tidak. Dengan bijaknya masyarakat menyaring informasi, akan berpengaruh kepada pandangan masyarakat ke depannya termasuk dalam memilih tempat nongkrong dan minum kopi di coffe shop.

Media sosial saat ini telah menjadi pilihan perusahaan kecil maupun besar dalam memasarkan produk. Media sosial memberikan kesempatan kepada pemilik untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, bahkan dalam bentuk komunitas online. Media sosial dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi pemasaran yang digabungkan melalui sosial media lainnya dan memberikan peluang masuk pada komunitas yang telah ada sebelumnya serta memberikan kesempatan mendapatkan feedback langsung (Puntoadi, 2011: 21-31). Bahkan digital marketing dengan pemanfaatan media sosial khususnya Facebook dan Instagram berguna untuk menyebarluaskan informasi promosi, meningkatkan jumlah konsumen dan mempertahankan penjualan. Instagram juga dimanfaatkan untuk meningkatkan branding dari Coffee Shop dengan pemanfaatan postingan tentang tempat dan suasana yang nyaman serta ketersediaan menu makanan dan minuman yang menarik. Sebagaimana dikatakan Billa Dea Pramusinta (2022) bahwa strategi

pemasaran yang dilakukannya melalui akun Instagram dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pesan dan ide.

3. Pesan Kreatif

Untuk melakukan penyampaian pesan kreatif, harus menunjukkan efektivitas dalam: a) Menceritakan kisah organisasi, b) Membuat konten yang jelas, konsisten, kreatif, dan menarik, c) Menyampaikan konten secara tepat waktu dan tepat, d) Melibatkan setiap segmen audiens pada tingkat emosional serta e) Menciptakan peluang untuk komunikasi yang ditargetkan

Kemampuan penyampaian pesan yang efektif ini dapat dikembangkan melalui memberikan waktu dan perhatian selama percakapan berlangsung, melakukan kontak mata dengan lawan bicara, menggunakan bahasa tubuh, mendengarkan dan berkomunikasi melalui berbagai sumber dan pengalaman. Diharapkan dengan menggenapi standar kompetensi komunikasi, maka penyampaian pesan dapat dipastikan, direpresentasikan dan direspon dengan sesuai. Selain itu pesan harus bersifat kreatif sehingga menarik perhatian pembaca atau pendengar.

Pesan kreatif adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Bentuk penyampaiannya dapat melalui pesan yang terkandung dalam unggahan di media sosial. Akun media sosial dirancang sebagai alat mengenalkan ide *coffee shop* dan menu-menu yang tersedia. Jenis unggahan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu unggahan yang menampilkan menu makanan/minuman yang disediakan dan unggahan yang menunjukkan suasana atau interior cafe. Konsep pesan kreatif harus simpel dan nyaman ditampilkan di media sosial seperti Instagram, facebook, dan lainnya.

Konsep simpel dan nyaman yang ditampilkan di postingan di Instagram Calathea bermanfaat untuk menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi dan untuk konsistensi. Personal branding yang dilakukan Calathea bertujuan untuk mengenalkan tema yang membedakannya dengan coffee shop lainnya. Salah satu manfaat personal branding yaitu memberitahu orang lain tentang siapa diri seseorang, apa yang dilakukannya, apa yang menjadikannya berbeda dengan orang lain, bagaimana membuatnya bernilai untuk mereka, dan apa yang diharapkan orang lain ketika berhubungan dengannya (Srihastina, 2018).

Kesan *coffee shop* yang simpel dan nyaman disampaikan lewat unggahan foto-foto interior cafe. Selain khusus unggahan mengenai interior atau suasana cafe, foto-foto produk pengenalan menu diambil di dalam cafe. Penyampaian pesan dilakukan berulang-ulang lewat unggahan baik foto maupun video yang latar belakangnya adalah cafe. Penyampaian yang berulang-ulang dan konsisten adalah cara yang efektif digunakan agar pesan dapat diterima oleh konsumen maupun calon konsumen. Selain itu, cara pengemasan pesan yang ditujukan untuk target pengunjung dan follower , misalnya kelompok usia 15-30 tahun harus dilakukan dengan pengaturan

sudut pengambilan foto yang mengutamakan detail objek gambar dan hasil gambar yang rapi. Cara berikutnya ialah dengan menggunakan filter yang memberikan kesan pencahayaan yang hangat untuk memberikan kesan tempat yang nyaman dan ramah. Pesan penyampaian produk atau jenis menu yang tersedia dilakukan lewat unggahan foto-foto. Jenis produk yang paling banyak diunggah utamanya adalah varian minuman, khususnya modifikasi minuman kopi. Fitur caption dimanfaatkan untuk menyapa pengunjung dengan menggunakan kalimat-kalimat motivasi dan sapaan. Jenis keterangan foto (kalua ada) digunakan untuk membangun kedekatan personal dengan pengikut agar memunculkan rasa nyaman dan percaya akan pelayanan yang ramah. Hal ini sebagaimana penelitian Nursatyo (2008) terhadap komunikasi pemasaran situs Telunjuk.com menunjukkan Telunjuk.com menekankan konten yang relevan dan lengkap sesuai dengan apa yang dicari pengunjung situs.

5. Rencana Tindak Lanjut

Kompetensi komunikasi dalam pemasaran coffee shop merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi agar capaiannya maksimal. Strategi komunikasi yang diperlukan dalam hal ini yaitu mampu mengubah sikap , opini dan perilaku dengan menjadikan tradisi minum kopi menjadi budaya. Gejala-gejala psikis komunikan sangat perlu diketahui oleh seorang komunikator. Jika kita sudah mengetahui sifat-sifat komunikan dan efek apa yang kita kehendaki dari mereka, maka memilih strategi yang harus diambil memerlukan kecakapan sebab ini akan berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan maupun media yang digunakan. Cara bagaimana kita berkomunikasi (how to communicate) kita bisa menggabungkan beberapa bentuk komunikasi seperti komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok, komunikasi massa dan media sosial. Bauran multi media memperepat pencapaian tujuan dari organisasi bisnis coffee shop

Komunikasi tatap muka biasa dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan pada tingkah laku (behaviour change) dari komunikan. Mengapa demikian, karena pada saat kita berkomunikasi memerlukan umpan balik langsung (immediate feedback). Dengan komunikasi tatap muka, secara langsung (antar pribadi) kita dapat melihat dan menggunakan kelima alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada seseorang. Kita sebagai komunikator bisa mengetahui apakah komunikan memperhatikan dan mengerti apa yang kita komunikasikan, dengan kata lain kita bisa menangkap adanya umpan balik langsung sehingga bisa mengembangkan komunikasi satu sama lain dengan lebih baik. Jika umpan baliknya positif, kita akan mempertahankan cara komunikasi yang kita gunakan, bila sebaliknya kita akan mengubah teknik maupun strategi komunikasi kita sehingga komunikasi kita berhasil dan efektif. Selain itu penggunaan sosial media memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk

membentuk komunitas online. Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi komunikasi pemasaran yang digabungkan.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kompetensi komunikasi merupakan tingkat keterampilan untuk menyampaikan pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu dan mengubah sikap, pendapat serta perilaku secara keseluruhan, baik secara langsung, lisan, maupun tidak langsung. Kompetensi komunikasi ini dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan, motivasi, keterampilan, dan pengetahuan seorang komunikator menggunakan berbagai sumber daya yang ada di dalam proses komunikasi dalam bisnis coffee shop maupun jenis lainnya untuk kualitas yang prima dan pelanggan yang banyak, 'tidak berpindah kepada hati yang lain'.

Saran

1. Pengguna media sosial untuk bisnis tetap mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.
2. Pelaku bisnis diharapkan tetap mempertahankan kualitas kopi kepada pelanggan dan kreatif dalam menyampaikan pesan untuk menarik peminat singgah minum secangkir kopi di café atau restorannya.

Daftar Pustaka

Adithia, Sandy dan Mega Puspita Perwira Jaya. 2021. *Strategi Pemasaran Digital Produk Minuman Kopi di Masa Pandemi*. Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia Journal of Research on Business and Tourism. Volume 1 No. 1, June, p. 37 – 46

Excellence, C. f. (2022). *Cropley Competency Model for Strategic Communication Management*. Retrieved from https://www.thecsce.com/competency-model

Firmansyah, M. Anang. 2020. *Komunikasi Pemasaran*. CV. Penerbit Qiara Media. Pasuruan.

Lubis, Lusiana Andriani. 2023. Pemahaman Praktis Komunikasi Antarbudaya. USU Press. Cetakan ke enam.

_____, 2016. Dinamika Komunikasi Antarbudaya dan Implikasi Penelitian. USU Press.

Mardiana, Siska. *Peranan Komunikasi Pemasaran Dalam Membentuk Perilaku Konsumen*. Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Mei - Agst 2013, halaman 40 – 46

N.V., P. A. (2020). The Importance of Developing Communicative. *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138*, 1-6.

Payne, H.J, (2005). "Reconceptualizing Social Skills in Organizations : Exploring the Relationship Between Communication Competence. Job

performance and supervisory roles". Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol 11, No. 2

Prakosa, Adhi. *Generasi Third Wave Coffee: Perspektif Milenial terhadap Kopi Gelombang Ketiga.* Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business and Management : Volume 2. Hal. 106. Nomor 2, Agustus 2019.

Pradita, Kennia Aline dan Lucy Pujasari Supratman. *Studi Kasus Deskriptif Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Melalui Media Sosial Instagram*. e-Proceeding of Management : Volume 5, Nomor 1, Maret 2018, halaman 1551.

Spitzberg, B. H. (1989). *Handbook of Interpersonal Competence Research.* New York : Springer

Srihastina, Rita. Dharmasetiawan. Strategi Membangun Personal Branding dalam Meningkatkan Performance Diri. Jurnal BAPPEDA, Volume 4, Nomor 1, April 2018, 19-25.

Biodata Penulis

Prof. Dra. Hj. Lusiana Andriani Lubis, MA, Ph.D, Lahir di Medan 5 April 1967, menikah drg. H.M.Iqbal Siregar dan memiliki tiga orang anak. Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada tahun 1985 dan tamat tahun 1989. Lanjut S2 pada Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia tahun 1996 dan tamat 1998. Kemudian melanjutkan kuliah Doktoral (S3) di tempat yang sama pada tahun 2007 dan tamat 2010 bidang kajian Komunikasi Antarbudaya. Guru Besar diperoleh pada Desember 2015. Pada jenjang karir beliau sejak 1990 hingga sekarang merupakan staf pengajar dan Guru Besar tetap FISIP USU Ilmu Komunikasi yang mengajar S1.S2 dan S3. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi dari tahun 2000-2005. Pada tahun 2011 sampai 2020, dua periode menjabat sebagai Ketua Magister Ilmu Komunikasi FISIP USU dan tahun 2020 sebagai pelaksana tugas Ketua Program Doktor Ilmu Komunikasi serta tahun 2023 diangkat menjadi Aksesor BAN PT. Selain di lingkungan akademik, aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti Ketua umum ISKI Sumatera Utara tahun 2023-2026, Ketua Dewan Pakar ASPIKOM Sumatera 2018-2023, Ketua Bidang Pendidikan Perguruan Tinggi di Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara 2020-2025, Pengelola PAUD dan TK ILMA dari tahun 2010 sampai sekarang yang berada di Kecamatan Medan Selayang dan Sei Mencirim Sunggal Deli Serdang. Juga aktif pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen pada pembinaan dan pemberdayaan perempuan serta beberapa organisasi lainnya seperti IKA Universiti Sains Malaysia, IKA USU. Banyak buku yang dihasilkan, di antaranya Pemahaman Praktis Komunikasi Antarbudaya (2012) dengan HKI C00201304028 dan saat ini sudah msuk cetakan ke enam (2023) ; Dinamika Komunikasi Antarbudaya (2016) dengan HKI : C00201605150 ; Perkawinan Antaretnis (2018), Perencanaan Komunikasi dan Audit komunikasi (2018), Analisis Komunikasi Normal Baru Saat Pandemi Covid 19 (2020) serta beberapa buku bunga rampai (tulisan bersama Pemikiran Guru besar USU) dan lainnya.

TANTANGAN DAN PROSPEK SUSTAINABLE ECOTOURISM DI HUTAN MANGROVE SUMATERA UTARA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Mohammad Basyuni
Fakultas Kehutanan

1. Latar Belakang

Hutan mangrove terluas di dunia dengan 2,7 juta ha pada tahun 2020 terdapat di Indonesia [1]. Di pesisir timur Sumatera Utara, hutan mangrove sebagian besar terdapat di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Batu Bara, Tanjung Balai, Asahan, Labuhanbatu, dan Serdang Bedagai [2]. Mangrove di Sumatera Utara adalah aset ekosistem yang sangat berharga, namun seringkali terancam oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim [3]. *Sustainable ecotourism* (ekowisata berkelanjutan) dapat menjadi strategi yang efektif dalam memanfaatkan potensi mangrove untuk mengentaskan kemiskinan dan merawat lingkungan.

Kami telah mengembangkan dua model pengembangan ekowisata mangrove melalui pengelolaan mangrove berbasis masyarakat melalui ekowisata di dua lokasi berbeda, yaitu Lubuk Kertang di Langkat dan Sei Nagalawan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia [3]. Keanekaragaman mangrove di Lubuk Kertang terdiri dari lima belas jenis yang didominasi oleh *Rhizophora apiculata* dan *Avicennia lanata*, sedangkan mangrove di Sei Nagalawan terdapat tujuh jenis yang didominasi oleh *R. apiculata* dan *A. officinalis*. Berdasarkan tingkat kesesuaian ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata, LK dan SN termasuk dalam kategori sesuai

Ekowisata mangrove di Sumatera Utara menawarkan potensi besar untuk pemberantasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Namun, pencapaian tujuan ini menghadapi tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat [4]. Ekowisata mangrove merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat melalui nilai tidak langsung dari sumber daya alam. Makalah ini akan membahas tantangan dan strategi pemberdayaan ekowisata mangrove Sumatera Utara untuk pemberantasan kemiskinan.

2. Masalah

Ekowisata hutan mangrove beserta artibutnya menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu upaya peningkatan nilai ekonomi ekowisata mangrove masih perlu dilakukan untuk menunjang

kesejahteraan masyarakat [5]. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas wisata yang menarik untuk meningkatkan minat pengunjung dan meningkakan peran serta msayarakat sekita ekowisata untuk berpromosi dan berperan aktif.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Karakteristik ekowisata mangrove yang bervariasi menunjukkan adanya studi kritis mengenai perbedaan jenis ekowisata mangrove. Potensi ekowisata ekosistem mangrove di Sei Nagalawan dan Lubuk Kertang menghasilkan produk mangrove dari sumber daya mangrove. Keberadaan kelompok masyarakat mendukung kedua mendukung kedua lokasi tersebut. Alternatif strategi prioritas pengelolaan ekowisata mangrove di Sei Nagalawan dan Lubuk Kertang dengan meningkatkan upaya pengelolaan ekosistem mangrove sebagai melalui ekowisata berkelanjutan, menjaga daya dukung kawasan dan menggunakan internet dan media sosial untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi ekowisata mangrove. Studi lebih lanjut tentang lanskap ekowisata mangrove akan memperdalam pengetahuan kita tentang pengelolaan mangrove berbasis masyarakat.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan ekowisata berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan kami perlu sarankan dari mulai tantangan, prospek dan strategi pengembangannya.

4.1. Tantangan dalam Mengembangkan Sustainable Ecotourism di Mangrove Sumatera Utara [6]

a. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Mengembangkan ecotourism yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan lingkungan yang hati-hati untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove, agar tetap dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pariwisata.
b. Infrastruktur dan Aksesibilitas: Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas ke kawasan mangrove dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan ecotourism yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan investasi untuk meningkatkan akses dan fasilitas bagi para wisatawan.
c. Keterlibatan Masyarakat Lokal: Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan ecotourism, agar mereka dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan memiliki tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan mangrove.

4.2. Prospek dari *Sustainable Ecotourism* di Mangrove Sumatera Utara [7]

a. Pendapatan Tambahan untuk Masyarakat: Pengembangan sustainable ecotourism dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk

mendapatkan pendapatan tambahan melalui berbagai usaha seperti homestay, pemandu wisata, atau produk-produk kerajinan tangan.

b. Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati: Dengan menjaga lingkungan mangrove yang lestari, ecotourism dapat berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan habitat bagi berbagai spesies satwa liar.
c. Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Wisatawan yang mengalami ecotourism memiliki kesempatan untuk belajar tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan secara global dan mendorong praktik berkelanjutan lainnya.

4.3. Strategi Pengembangan Sustainable Ecotourism di Mangrove Sumatera Utara [8]

a. Keterlibatan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan ecotourism akan menciptakan kesempatan partisipasi dan meningkatkan keberlanjutan inisiatif ini.
b. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan akan meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman wisatawan, sambil tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
c. Pengembangan Program Edukasi Lingkungan: Program edukasi lingkungan untuk wisatawan akan membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pelestarian lingkungan mangrove dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem.

5. Rencana Tindak Lanjut

Pemberdayaan ekowisata mangrove di Sumatera Utara dapat menjadi strategi yang efektif dalam pemberantasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan [9]. Dengan mengatasi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, akses keuangan, pengetahuan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta menerapkan strategi pemberdayaan yang tepat, ekowisata mangrove dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, Sumatera Utara dapat menjadi contoh sukses dalam mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi pemberantasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan [10].

6. Keseimpulan dan Saran

Sustainable ecotourism di Mangrove Sumatera Utara menawarkan prospek yang cerah dalam upaya mengenangkan kemiskinan dan melestarikan lingkungan. Dengan mengatasi tantangan pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat lokal, ecotourism dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Pengembangan ecotourism yang berkelanjutan juga akan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan

wisatawan, dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas. Dengan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, Mangrove Sumatera Utara dapat menjadi contoh sukses dalam mengembangkan sustainable ecotourism yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Daftar Pustaka

1. Basyuni, M., Sasmito, S. D., Analuddin, K., Ulqodry, T. Z., Saragi-Sasmito, M. F., Eddy, S., & Milantara, N. (2022). Mangrove Biodiversity, Conservation and Roles for Livelihoods in Indonesia. In Mangroves: Biodiversity, Livelihoods and Conservation (pp. 397-445). Springer, Singapore.…
2. Basyuni, M., & Sulistiyono, N. (2018, February). Deforestation and reforestation analysis from land-use changes in North Sumatran Mangroves, 1990-2015. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 309, No. 1, p. 012018). IOP Publishing.
3. Basyuni, M., Bimantara, Y., Siagian, M., Wati, R., Slamet, B., Sulistiyono, N., ... & Leidonad, R. (2018, March). Developing community-based mangrove management through eco-tourism in North Sumatra, Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012109). IOP Publishing.
4. Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, S., & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, 2(1).
5. Hartati, F., Qurniati, R., Febryano, I. G., & Duryat, D. (2021). Nilai Ekonomi Ekowisata Mangrove Di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Belantara, 4(1), 1-10.
6. Ulhaq, A. Z. D., Pribadi, R., & Nuraini, R. A. T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat terhadap Ekowisata Mangrove di Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Journal of Marine Research, 11(2), 295-302.
7. Zaryaningsih, A., Kamal, E., & Damanhuri, H. (2022). Strategi pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Teluk Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal, 9(2), 72-75.
8. Ambarita, S. T. P., Basyuni, M., Sulistyono, N., Wati, R., Fitri, A., Slamet, B., ... & Munir, E. (2018). Landscape planning and economic valuation of mangrove ecotourism using GIS and Google Earth image. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 96(19).
9. Satria, D. (2009). Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics, 3(1).
10. Parmawati, R., Hardyansah, R., Pangestuti, E., & Hakim, L. (2022). Ekowisata: Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat. Universitas Brawijaya Press.

Biodata Penulis

Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut, M.Si, Ph.D, adalah staf pengajar pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU) dan Ketua Pusat Unggulan Iptek Mangrove yang telah direcognisi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 1998, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di IPB dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan S3 pada laboratory of Molecular Biotechnology, Center of Molecular Biosciences (COMB), University of the Ryukyus dan meraih gelar Ph.D di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University pada 14 Maret 2008. Selama dua tahun (2008-2010), penulis menjadi Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Postdoctoral Fellow di bawah Host Researcher Prof. Shigeyuki Baba di Tropical Biosphere Research Center (TBRC), Universty of the Ryukyus. Kemudian selama 6 bulan (Mei-November 2010), penulis menjadi Foreign Visiting Reseacher pada institusi yang sama. Pada bulan Oktober-Desember 2012, penulis mendapatkan Post-doc di COMB dengan dana dari SAME (Scheme for Academic and Mobility Exchange) dari Direktorat Pendidikan Dikti, Kemdikbud. Pada tahun 2013-2015 selama bulan Januari-Maret, penulis menjadi Visiting Researcher pada Joint Research di TBRC, University of the Ryukyus. Pada tahun 2018-2022 penulis mendapatkan international grant dari Newton Fund/DIPI/LPDP sebagi Principle Investigator berkolaborasi dengan University of Glasgow dan aberystwyth University, UK, tahun 2020-2023 mendapatkan JSPS Core to Core sebagai Coordinator Project. Tahun 2022-2024 penulis mendapatkan hibah e-ASIA Joint Research Program bersama Prof Tadashi Kajita (University of the Ryukyus) dan Dr. Venus Leoprdas dari Mindanao State University at NaawanPhilippines Philippines. Sejak 1 April 2020 menjadi Guru Besar tetap atau Full Professor ilmu Bioteknologi Hutan pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, USU. Penulis juga tertarik meneliti restorasi mangrove, meta barcode pada mangrove dan organismenya

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Muhammad Fidel Ganis Siregar
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Sustainable tourism adalah konsep pariwisata yang berusaha untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari aktivitas pariwisata. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dari pariwisata bagi tujuan, masyarakat, dan wisatawan.[1] Sustainable tourism juga dianggap sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan perdamaian.[2]

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat meningkatkan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran mereka untuk mengambil kendali atas kehidupan dan lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan partisipasi, kerjasama, dan tanggung jawab masyarakat dalam proses pembangunan.[3] Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, karena dapat meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya, peluang, dan hak-hak bagi masyarakat miskin.[4]

Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat dapat saling mendukung dan memperkuat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Beberapa contoh hubungan antara keduanya adalah:

- Sustainable tourism dapat memberikan sumber pendapatan, lapangan kerja, dan pelatihan bagi masyarakat lokal, terutama yang tinggal di daerah-daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat lokal[5]
- Sustainable tourism dapat membantu melestarikan lingkungan alam dan budaya lokal yang menjadi daya tarik pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dan keunggulan kompetitif destinasi wisata, serta menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang[5]
- Sustainable tourism dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari wisatawan terhadap isu-isu kemiskinan, lingkungan, dan budaya di destinasi wisata. Hal ini dapat mendorong wisatawan untuk berperilaku lebih ramah lingkungan, menghormati hak dan kepentingan masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam program-program pemberdayaan masyarakat[5]

- Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan pengaruh masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata. Hal ini dapat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal terwakili dan terpenuhi dalam proses pariwisata[6]
- Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat lokal dalam menyediakan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam industri pariwisata[6]
- Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara masyarakat lokal dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pariwisata, seperti pemerintah, swasta, LSM, akademisi, media, dan wisatawan. Hal ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan[6]

Sustainable tourism merupakan salah satu strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, khususnya di negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Namun, sustainable tourism juga membutuhkan partisipasi yang sadar dari semua pemangku kepentingan, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk menjamin keterlibatan dan konsensus yang luas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung dan mendorong praktik-praktik pariwisata berkelanjutan di destinasi-destinasi wisata yang kita kunjungi.

2. Masalah

Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Sustainable tourism adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan pariwisata, baik bagi pengunjung, industri, lingkungan, maupun masyarakat tuan rumah.[1,2] Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat meningkatkan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian mereka untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada di lingkungan mereka.[7]

Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki banyak manfaat, tetapi juga menghadapi beberapa masalah dan tantangan. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:[1,2,8]

- Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal dengan kebijakan dan program pariwisata yang dijalankan oleh pemerintah atau sektor swasta

- Kurangnya kapasitas dan kompetensi masyarakat lokal dalam menyediakan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat lokal terhadap bantuan luar, rendahnya daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, serta hilangnya identitas dan kearifan lokal
- Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial dari wisatawan terhadap isu-isu kemiskinan, lingkungan, dan budaya di destinasi wisata. Hal ini dapat menyebabkan perilaku wisatawan yang tidak ramah lingkungan, tidak menghormati hak dan kepentingan masyarakat lokal, serta tidak berkontribusi dalam program-program pemberdayaan masyarakat
- Kurangnya kerjasama dan solidaritas antara masyarakat lokal dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pariwisata, seperti pemerintah, swasta, LSM, akademisi, media, dan wisatawan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya sinergi, koordinasi, dan integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan
- Kurangnya pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan dampak dari pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas dari pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Pemberdayaan masyarakat juga dapat mendukung sustainable tourism dengan cara:[3,7]

- Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata
- Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang pariwisata, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pemandu wisata
- Menjalin kerjasama dan kemitraan antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, seperti pemerintah, swasta, akademisi, LSM, media, dan wisatawan
- Menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pariwisata di daerah mereka
- Menjadi agen perubahan sosial yang positif bagi lingkungan sekitar

Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dengan beberapa cara, antara lain:[1,2,5,8]

- Meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat melalui penyediaan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.

- Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada sumber daya lokal, seperti kerajinan, kuliner, pertanian, perikanan, dan lain-lain.
- Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat melalui peningkatan akses terhadap layanan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi.
- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat setempat terhadap pelestarian lingkungan, budaya, dan warisan lokal, serta mengurangi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki masyarakat setempat terhadap potensi dan identitas wilayah mereka, serta meningkatkan hubungan harmonis antara masyarakat setempat dan pengunjung.

Jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan adalah salah satu faktor penting untuk mengembangkan konsep sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi. Sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi adalah konsep wisata yang memadukan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi dengan aspek kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus memberikan pengalaman wisata yang bermanfaat bagi para wisatawan.[8,9]

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan masyarakat setempat. Diperlukan juga strategi dan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah strategi yang bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan, tanpa merusak sumber daya alam dan budaya yang ada.[11] Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dan kegiatan pariwisata di wilayah mereka.[7]

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah:[7,11]

- Melakukan analisis situasi dan kebutuhan pasar untuk menentukan jenis produk dan jasa pariwisata yang sesuai dengan potensi dan preferensi masyarakat lokal dan wisatawan
- Melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dan

keterlibatan masyarakat lokal sebagai mitra, penyedia layanan, atau pengawas

- Menyediakan fasilitas, peralatan, modal, pelatihan, bimbingan, sertifikasi, atau pertukaran pengalaman bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam menyediakan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan
- Memberikan insentif, bantuan, atau dukungan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada sumber daya lokal, seperti kerajinan, kuliner, pertanian, perikanan, dan lain-lain
- Menyediakan informasi, edukasi, atau advokasi kepada wisatawan tentang dampak positif dan negatif dari pariwisata bagi masyarakat lokal, serta mengajak mereka untuk berperilaku lebih ramah lingkungan, menghormati hak dan kepentingan masyarakat lokal, serta berkontribusi dalam program-program pemberdayaan masyarakat
- Membangun jejaring kerjasama antara masyarakat lokal dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pariwisata, seperti pemerintah, swasta, LSM, akademisi, media, dan wisatawan. Jejaring kerjasama ini bertugas untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana aksi bersama yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
- Meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan dampak dari pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat kepuasan wisatawan, pendapatan destinasi wisata, akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi, serta manfaat sosial dan lingkungan

Jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan adalah salah satu faktor penting untuk mengembangkan konsep sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi. Kerjasama ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi bagi wisatawan dan masyarakat lokal.[9,10]

Untuk membangun jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:[11]

- Membentuk tim kerjasama yang terdiri dari perwakilan dari kedua sektor, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tim kerjasama ini bertugas untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana aksi bersama yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kedua sektor.
- Melakukan analisis situasi dan kebutuhan pasar untuk menentukan jenis layanan kesehatan reproduksi yang diminati oleh wisatawan, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh destinasi wisata.

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei, wawancara, observasi, atau studi kasus.

- Menyusun standar kualitas dan akreditasi untuk layanan kesehatan reproduksi yang disediakan oleh destinasi wisata. Standar ini harus memenuhi persyaratan hukum, etika, profesional, dan teknis yang berlaku di kedua sektor. Akreditasi ini dapat dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di kedua sektor. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, sertifikasi, atau pertukaran pengalaman antara tenaga pariwisata dan tenaga kesehatan. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan merekrut atau menggandeng tenaga ahli dari luar kedua sektor.
- Membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien antara kedua sektor. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, seperti website, aplikasi, media sosial, atau sistem reservasi online. Sistem ini dapat memfasilitasi proses pemasaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan evaluasi layanan kesehatan reproduksi.

Konsep sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi memiliki beberapa manfaat, antara lain:[7,8]

- Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Layanan ini dapat mencakup pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual, kanker serviks, infertilitas, kehamilan tidak diinginkan, dan kekerasan berbasis gender.
- Mendorong pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, serta memperbaiki fasilitas dan peralatan kesehatan. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan.
- Membuka peluang kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan. Kerjasama ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi. Kerjasama ini juga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing destinasi wisata.
- Meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.
- Mempromosikan budaya dan kearifan lokal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik lokal yang berkontribusi terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini juga dapat menjaga kelestarian dan keberagaman budaya lokal.

- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya edukasi, advokasi, dan partisipasi masyarakat lokal dan wisatawan dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan. Hal ini juga dapat mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan kesehatan.

Untuk mempromosikan konsep ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:[12,13]

- Menyusun strategi komunikasi yang efektif dan sesuai dengan sasaran, seperti menggunakan media sosial, website, brosur, poster, video, atau podcast. Media-media ini dapat menyampaikan informasi tentang manfaat, tujuan, dan cara berpartisipasi dalam sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi.
- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, akademisi, LSM, media, komunitas lokal, dan wisatawan. Mereka dapat berperan sebagai mitra, pendukung, penyedia layanan, pengawas, atau peserta dalam sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi.
- Membangun jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerjasama ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan sustainable tourism di bidang kesehatan reproduksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan reproduksi yang disediakan oleh destinasi wisata. Layanan ini harus aman, terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan. Selain itu, layanan ini juga harus memperhatikan aspek gender, hak asasi manusia, dan budaya setempat.
- Mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial dari wisatawan dalam *sustainable tourism* di bidang kesehatan reproduksi. Wisatawan dapat berkontribusi dengan cara mengikuti aturan dan etika yang berlaku di destinasi wisata, menghormati hak dan budaya masyarakat lokal, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan.

Salah satu contoh jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan adalah Tourism and Health: Understanding the Relationship, sebuah studi yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dan World Tourism Organization (UNWTO) untuk menggali potensi dan tantangan dari hubungan antara pariwisata dan kesehatan[1]. Studi ini juga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara kedua sektor dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.[5,6]

Di Indonesia, salah satu contoh destinasi wisata yang mengusung konsep ini adalah *Health Tourism* di Rumah Sakit Akademik UGM. Di sini, wisatawan dapat mendapatkan layanan kesehatan preventif dan konduktif, seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan jantung, pelayanan kanker, pelayanan bedah plastik, pelayanan infertilitas, dan lain-lain. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati fasilitas

akomodasi, transportasi, dan rekreasi yang disediakan oleh rumah sakit.[13] Di Sumatera Utara khususnya di kota Medan, Program Bobby Nasution Medan Medical Tourism adalah program yang bertujuan untuk menjadikan Kota Medan sebagai destinasi wisata yang menawarkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Program ini diinisiasi oleh Walikota Medan, Bobby Nasution, yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti universitas, rumah sakit, asosiasi perjalanan, dan asosiasi hotel dan restoran.[14]

5. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan adalah rencana yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Rencana ini harus memperhatikan aspek-aspek berikut:[1,2,7,11,14]

- Sasaran dan indikator. Rencana ini harus menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta indikator-indikator yang dapat mengukur pencapaian sasaran tersebut. Sasaran dan indikator ini harus SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu).
- Kegiatan dan anggaran. Rencana ini harus merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran, serta anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan dan anggaran ini harus sesuai dengan prioritas, ketersediaan, dan kelayakan sumber daya.
- Pelaku dan peran. Rencana ini harus mengidentifikasi pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan rencana, baik dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, media, masyarakat lokal, maupun wisatawan. Rencana ini juga harus menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku dalam rencana tersebut.
- Jadwal dan mekanisme. Rencana ini harus menentukan jadwal dan mekanisme pelaksanaan rencana, termasuk waktu, tempat, metode, alat, dan prosedur yang akan digunakan dalam setiap kegiatan. Jadwal dan mekanisme ini harus fleksibel, efisien, dan efektif.
- Monitoring dan evaluasi. Rencana ini harus menyediakan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi tentang kinerja dan dampak dari rencana tersebut. Sistem ini harus melibatkan partisipasi dari semua pelaku, serta memberikan umpan balik, saran, atau rekomendasi untuk perbaikan rencana.

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan dampak dari jejaring kerjasama antara sektor pariwisata dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan, seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat kepuasan

wisatawan, pendapatan destinasi wisata, akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi, serta manfaat sosial dan lingkungan.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran untuk sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan . Berikut adalah kesimpulan dan saran yang dapat diambil :

a. Kesimpulan

Sustainable tourism dianggap sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, dan perdamaian. Sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat dapat saling mendukung dan memperkuat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

b. Saran

- Menerapkan konsep sustainable tourism dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan masyarakat setempat.
- Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan evaluasi pariwisata berkelanjutan, diperlukan pendekatan bottom-up yang mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat lokal dalam menyediakan produk dan jasa pariwisata yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan, diperlukan pendidikan formal maupun informal yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat lokal terkait dengan pariwisata.
- Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dari wisatawan terhadap isu-isu kemiskinan, lingkungan, dan budaya di destinasi wisata, diperlukan kampanye dan promosi yang dapat menyampaikan informasi dan edukasi tentang dampak positif dan negatif dari pariwisata bagi masyarakat lokal.
- Meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara masyarakat lokal dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pariwisata, diperlukan jejaring kerjasama yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai sektor yang terlibat dalam pariwisata.
- Meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan dampak dari pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi tentang pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Sustainable tourism | Department of Economic and Social Affairs (un.org). Available at: https://sdgs.un.org/topics/sustainable-tourism
2. Sustainable development | UNWTO. Available at: https://www.unwto.org/sustainable-development
3. Tourism: The Solution To Poverty Alleviation? – The Organization for World Peace (theowp.org). Available at: https://theowp.org/reports/tourism-solution-poverty-alleviation/
4. Frontiers | A Study on the Efficiency of Tourism Poverty Alleviation in Ethnic Regions Based on the Staged DEA Model (frontiersin.org). Available at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.642966/full
5. Explore the data – Global Sustainable Tourism Dashboard. Available at: https://www.tourismdashboard.org/explore-the-data/
6. Wang K, Gan C, Chen L, Voda M. Poor Residents' Perceptions of the Impacts of Tourism on Poverty Alleviation: From the Perspective of Multidimensional Poverty. *Sustainability*. 2020; 12(18):7515. https://doi.org/10.3390/su12187515
7. Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia (kemenparekraf.go.id). Available at: https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia
8. ROMBE, Elimawaty et al. Marine Tourism-Based Sustainable Community Empowerment Model in the New Normal Era. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 513 - 521, mar. 2023. ISSN 2068-7729.
9. A Joint Statement on Tourism and COVID-19 - UNWTO and WHO Call for Responsibility and Coordination. Available at: https://www.who.int/news/item/27-02-2020-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19---unwto-and-who-call-for-responsibility-and-coordination
10. Bappenas: Pentingnya Peningkatan Kesehatan Reproduksi untuk Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia | Kementerian PPN/Bappenas. Available at: https://bappenas.go.id/id/berita/bappenas-pentingnya-peningkatan-kesehatan-reproduksi-untuk-kualitas-dan-daya-saing-sdm-indonesia
11. Marmion, M., Hindley, A. (2020). Tourism and Health: Understanding the Relationship. In: Leal Filho, W., Wall, T., Azul, A.M., Brandli, L., Özuyar, P.G. (eds) Good Health and Well-Being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95681-7_16
12. Pebrianti, R. / Jurnal Keluarga Berencana Vol.5 No.01 (2020) 27-37 DOI : https://doi.org/10.37306/kkb.v4i2
13. Health Tourism – Rumah Sakit Akademik UGM. Available at: https://rsa.ugm.ac.id/health-tourism/
14. BERITA | Bobby Nasution: Perlu Komitmen Kolaborasi Wujudkan Medical Tourism Medan (pemkomedan.go.id). Available at:

https://portal.pemkomedan.go.id/berita/bobby-nasution-perlu-komitmen-kolaborasi-wujudkan-medical-tourism-medan read986.html
15. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id). Available at: https://kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat

Biodata Penulis

Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, M.Ked (OG), Sp.OG, Sub.Sp.FER, lahir di Medan, 30 Mei 1964. Jabatan fungsional saat ini adalah Profesor/Guru Besar, dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan IVd.

Beliau menjalani pendidikan formal Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran USU (lulus 1988). Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran USU (lulus 1997), Magister Kedokteran Klinis di Fakultas Kedokteran USU (lulus 2011), Spesialis II Konsultan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas, Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (lulus 2012) dan Doktor dalam bidang Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran USU (lulus 2012), kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar/Profesor pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan: sebagai Dokter BKKA Pertamina Pusat, Jakarta (1989-1990), Dokter Puskesmas Jayapura Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura-Provinsi Irian Jaya (1990), Kepala UPT Poliklinik Kantor Gubernur Irian Jaya, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya, Jayapura (1990-1993), Staf Medis UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Sorong (1998-2008), Dosen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Program Studi D III Ilmu Keperawatan Universitas Cendrawasih di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Sorong (1998-2000), Dosen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sorong (2003-2008), Dosen Ilmu Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran USU (2008-Sekarang), Dosen D4 Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan USU (2010-2014), Dosen Magister/S2 Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU (2012-2021), Sekretaris Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran USU (2009-2016), Sekretaris SMF Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUP H Adam Malik Medan (2009-2016) dan Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan USU (2016-2021), Plt. Ketua Program Studi Subspesialis (Sp2) Obstetri dan Ginekologi FK USU (2021-2026), Sekretaris Universitas (2021-2026).

Sebagai seorang dosen yang menjalankan Tridharma mempunyai10 HaKI yang terdiri dari 8 Hak Cipta dan 2 Hak Paten. Tercatat ada puluhan publikasi ilmiah internasional baik sebagai penulis pertama maupun lainnya dengan 34 di antaranya terindeks Scopus. Dalam 8 tahun terakhir, telah menghasilkan karya dalam bentuk buku sebanyak 11 buah, dan ikut terlibat lebih dari 13 kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagai mantan pesepakbola tercatat sebagai Pemegang Lisensi C Coaching Certificate dari Asian Football Confederation (AFC) dan juga aktif sebagai Komite Eksekutif Asprov PSSI Sumut (2018-2022), wakil ketua Asprov PSSI Sumut (2022-2026), Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI Sumut (2021-2025).

Beberapa organisasi yang aktif diikuti di antaranya untuk tingkat internasional sebagai Co-Chair Council of Affiliated Menopause Societies (CAMS) - International Menopause Society (IMS) (2022-2024), Presiden Asia Pacific Menopause Federation (APMF) (2021-2023), Presiden Perkumpulan Menopause Indonesia (PERMI) (2018-2022), Komisi Pemenuhan Pelayanan dan Pemerataan Penempatan Spesialis dan Subspesialis, Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (2022-2025), Pengurus Pusat Himpunan Fertilitas dan Endokrinologi Indonesia (HIFERI-POGI) (2022-2025), Ketua Dewan Pertimbangan POGI Sumut (2019-2024).

Beberapa penghargaan yang diraih untuk tingkat internasional di antaranya Asia Pacific Menopause Federation (APMF) TG Award di Tokyo Jepang (2013), dan di tingkat nasional antara lain Dokter Medicalthlete Fakultas Kedokteran USU (2012), Dosen berprestasi Fakultas Kedokteran USU (2013), Dosen Berprestasi II USU (2013), Satyalancana Karya Satya XX Tahun, Presiden Republik Indonesia (2014), dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, Presiden Republik Indonesia (2019)

STRATEGI DESTINASI WISATA DANAU TOBA DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Noverita Sprinse Vinolina
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak daerah yang memiliki pemandangan memukau. Indonesia dengan berbagai objek wisata merupakan destinasi dunia dengan keunggulannya masing-masing. Kekayaan alam yang indah ini, bila dikelola secara terintegrasi maka akan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Berbagai program dilakukan untuk memikat wisatawan mancanegara lebih banyak hadir untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar sektor pariwisata Indonesia tumbuh bangkit diantaranya dengan membangun sirkuit MotoGP dan F1 pertama di Indonesia. Pemerintah juga menetapkan destinasi 10 Bali Baru, serta pengimplentasian sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) bagi para pelaku dan pengelola industri wisata.

Beberapa destinasi wisata yang menjadi unggulan di Indonesia saat ini diantaranya Bali, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bunaken, Raja Ampat, Derawan, Wakatobi, Gili Trawangan, Bukit Warinding, Waingapu, Pulau Tanjung Pandan, Lombok Mandalika, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, Pulau Morotai,Kawah Ijen, Ngarai Sianok, Danau Tiga Warna, Candi Borobudur, Tana Toraja, Yogyakarta dan Danau Toba. Kiat sukses yang diperoleh objek wisata andalan Indonesia adalah Pulau Dewata Bali dapat dicontoh oleh berbagai daerah lainnya.

Danau Toba terletak di provinsi Sumatera Utara. Lokasi Danau Toba merupakan destinasi wisata yang merupakan unggulan Sumatera Utara dengan memadukan antara keindahan alam serta keunikan tradisi budaya. Pemandangan yang sangat indah ditemukan pada daerah ini. Danau Toba termasuk satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP) oleh Kementerian pariwisata dan perekonomian kreatif saat ini. Danau Toba memiliki keunikan geografi alam yang berbeda dengan obyek lainnya. Ciri alam ini menjadi keunggulan Danau Toba dibandingkan dengan Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia seluas sekitar 2.700 kilometer persegi. Danau ini terbentuk dari letusan tektonik gunung api raksasa Toba yang diperkirakan terjadi pada masa kuarter geologi bumi. Bekas letusan itulah yang menciptakan kaldera luas yang pada akhirnya terisi oleh air dan menjadi danau.

Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara yang secara administratif wilayah danaunya berada di delapan kabupaten. Secara geografis Danau Toba dimiliki oleh delapan kabupaten, yakni Kabupaten

Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Toba Samosir, Samosir, Karo, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan. Lokasinya yang beririsan dengan delapan kabupaten menjadikan pemerintah pusat harus relatif merata dalam mengembangkan daya dukung pariwisata Danau Toba.

2. Masalah

Apa potensi wisata alam Danau Toba, nilai-nilai keunggulannya dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan agar terjadi percepatan lebih intensif dalam pengembangan pariwisata Danau Toba.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, perlu menyamakan pemikiran dan pendapat pada berbagai pihak. Komitmen yang kuat dari masyarakat untuk bisa menyamakan pendapat, menyatukan tujuan dan juga menyatukan persepsi dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan melalui keunggulan yang ingin ditampilkan dari suatu lokasi. Turis yang menjadi sasaran program super prioritas ini adalah wisatawan asing yang akan membelanjakan uang relatif lebih banyak daripada wisatawan lokal. Arus wisatawan ke Danau Toba sedapat mungkin memberi andil ekonomi yang merata bagi setidaknya delapan daerah penyokong obyek wisata itu. Tujuannya, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi antar daerah pariwisata tersebut.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Tempat Wisata yang menjadi unggulan dan yang pertama mendunia di Indonesia adalah Bali. Ratusan penghargaan yang didapatkan Bali sebagai destinasi wisata terbaik dan favorit dari kancah internasional. Bali memiliki semua, selalu ada tempat wisata yang baru setiap tahunnya. Wisata alam hingga budaya ada di sana.

Lokasi andalan di Indonesia yang tak kalah indah dan unik adalah Danau Toba. Tepatnya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia memiliki salah satu danau vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba. Terbentuknya Danau Toba diperkirakan berasal dari letusan dahsyat gunung berapi Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dari letusan tersebut, terbentuklah kawah seluas 1.145 km2 dan mempunyai kedalaman 450 meter yang saat ini bernama Danau Toba. Di tengah Danau Toba terdapat pulau berpenghuni yaitu Pulau Samosir yang juga menjadi daya tarik utamanya. Danau Toba juga merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia yang memiliki histori dan mitos yang kental.

Langkah-langkah strategis diharapkan terjadi percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba. Pertama, faktor penunjang lingkungan (sanitasi, kebersihan, dan teknologi informasi) dibenahi. Kebijakan dan kondisi terkait regulasi, penetapan kewajaran harga, dan kelestarian

lingkungan. Infrastruktur seperti bandara, pelabuhan penyeberangan, terminal, jalan lintas/terusan, lahan parkir, listrik, telekomunikasi, dan air tawar serta sumber daya alam seperti pemandangan, budaya, dan kearifan local perlu ditata dengan baik. Kedua, perbaikan akses seperti prasarana jalan, transportasi antar kota, dan pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan modern, atraksi unik yang ditonjolkan, kalender tahunan kegiatan berskala internasional; serta fasilitas sanitasi, kesehatan, dan restoran atau kedai makanan, akomodasi kelas dunia, termasuk akses informasi dan layanan internet yang handal pada berbagai lokasi. Ketiga, perlu penataan ulang tata ruang, keramba, dan kelola; serta memelihara obyek wisata dan meminimalisir kerusakan lingkungan perairan, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan keamanan perairan bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

5. Rencana Tindak Lanjut

Tahun 2016 Bapak Presiden Republik Indonesia, menetapkan 10 destinasi tujuan wisata, salah satu yang menjadi kebanggaan Indonesia adalah Danau Toba. Penetapan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan potensi-potensi wisata daerah dengan memaksimalkan objek wisata yang ada. BPS (Badan Pusat Statistika) mencatat devisa 2016 dari sektor pariwisata di Indonesia mencapai 190 trilliun terbesar kedua penyumbang devisa sesudah devisa hasil ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Crude Palm Oil.

Pembangunan ruas jalan tol di Sumut Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 41,65 Kilometer merupakan target pembangunan infrastruktur dan keseriusan pemerintah pusat dalam pengembangan potensi wisata Danau Toba. Setiap tahunnya diselenggarakan Festival Danau Toba oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di sekitar daerah Danau Toba, kegiatan tersebut untuk memperkenalkan Danau Toba, seni budaya Batak, pemeliharaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat kepada turis asing maupun lokal.

Danau Toba sebagai instrumen penunjang ekonomi harus dioptimalkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar hendaknya dilibatkan dalam hal perancangan wisata guna menghindari penyimpangan seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak-pihak pengusaha dan pemerintah. Keadaan ini akan mengawasi dan berperan baik untuk mensejahterahkan masyarakat, wisatawan, pengusaha dan pemerintah melalui kegiatan pelatihan dan promosi wisata

Pelatihan bagi masyarakat setempat menjadi sangat penting dengan melibatkan pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, cara mengelola pariwisata sesuai dengan peraturan pemerintah desa, manajemen tamu dan lain sebagainya. Potensi wisata alam di suatu lokasi daerah, nilai keunggulan yang menarik yang ingin ditampilkan. Pelatihan dilakukan oleh seluruh komponen desa.

Promosi wisata merupakan strategi dalam mensosialisasikan agar potensi wisata alam menjadi berkembang. Kegiatan melakukan promosi dengan aktif melalui media-media sosial. Banyak tempat wisata menjadi terkenal disebabkan tempat tersebut begitu instagramable. Semakin banyak pengguna instagram yang mengupload fotonya ketika sedang berada di tempat wisata tersebut maka semakin mudah wisata alam itu terkenal. Adanya akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya dengan nama tempat wisata yang sedang dikembangkan. Kegiatan promosi wisata, dibutuhkan dokumentasi yang menarik sebagai daya tarik utama. Berbagi foto-foto menarik pada Instagram atau media sosial lainnya akan menarik penonton atau pembaca untuk datang.

Wisatawan lazimnya selalu mencari sesuatu cendera mata dari daerah tersebut untuk oleh-oleh yang akan dibawanya pulang pertanda kenangannya. Produk souvenir di daerah Danau Toba cukup beragam dan menarik seperti ulos, alat musik, pakaian, dan berbagainya. Semakin bertambahnya wisatawan yang berkunjung tentu permintaan akan semakin meningkat. Dalam pengentasan kemiskinan di sekitaran Danau Toba, ekonomi kreatif yang diberdayakan untuk memproduksi barang-barang unik kearifan lokal khas Danau Toba, penataan lokasi souvenir yang tertata dengan baik maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan.

Kendala-kendala yang perlu diberi perhatian tentang potensi Danau Toba adalah keramahtamahan masyarakat yang terus harus dibangun, kendala sarana prasarana, rendahnya mutu pelayanan prima, dan komunikasi pariwisata. Pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar wilayah Danau Toba dan campur tangan pemerintah. Keberhasilan seperti yang telah dicapai di daerah wisata seperti Bali dan lainnya tidaklah mustahil bagi Danau Toba. Danau Toba wisata negeri indah kepingan surga.

Danau Toba merupakan salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Samosir Sumatera Utara. Danau Toba dikenal dari keindahan alamnya, budaya dan adat istiadat masyarakat sekitar. Wisatawan pada dasarnya berkunjung karena keindahan alam, iklim, sejarah, budaya, kuliner, dan keramahtamahannya. Beberapa objek wisata unggulan yang sering dikunjungi wisatawan di Kabupaten Samosir adalah Makam Raja Sidabutar, Kawasan Tuktuk Siadong, Batu Kursi Parsidangan Siallagan, Museum Hutabolon, Pantai Pasir Putih Parbaba, Aek Rangat Pangururan, Dolok Holbung Sipege, Aek Sipitu Dai, Batu Sawan, Air Terjun Effrata, Air Terjun Naisogop, Air Terjun Pangaribuan (2).

Peranan destinasi wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak pariwisata terhadap ekonomi masyarakat adalah peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatnya distribusi manfaat dan keuntungan, kepemilikan dan kontrol ekonomi masyarakat, dampak pada pembangunan daerah. Dampak pembangunan pariwisata yaitu penyerapan tenaga kerja, menciptakan kesempatan usaha, mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan investasi di sektor pariwisata.

Citra destinasi Danau Toba sebagai danau terluas di Asia Tenggara merupakan point penting dalam keputusan wisatawan melakukan kunjungannya, citra destinasi yang baik dan dikenal maka memudahkan wisatawan untuk merencanakan liburannya. Citra destinasi yang baik akan meningkatkan kunjungan wisata hal ini disebabkan karena citra mempengaruhi keputusan berkunjung dan minat untuk melakukan kunjungan ulang (3). Faktor pembentuk citra dengan cara meningkatkan kualitas dan mutu, dapat dipercaya dan dihandalkan, kegunaan dan manfaat, pelayanan, risiko, dan harga (4). Dimensi yang digunakan adalah untuk mengukur citra destinasi adalah perilaku ramah, posko keamanan, aktivitas wisata, informasi wisata, peta wisata, kebersihan, fasilitas wisata, restoran, penginapan, kegiatan seni, souvenir. Dimensi pengukuran citra adalah atribut, kepribadian, manfaat. Citra destinasi dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan karena memudahkan wisatawan untuk melakukan pencarian informasi tempat yang akan dikunjungi.

Kepercayaan wisatawan terhadap penyelenggara wisata Danau Toba dianggap sudah baik dengan nilai 74%. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan-kegiatan wisata yang dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Samosir maupun pihak swasta beberapa kegiatan tahunan yang yang terdapat pada kalender kegiatan seperti festival gondang naposo, samosir band festival, sigalegale karnaval, samosir harverst, horja bius, samosir music international, samosir ultra marathon, festival ulos, festival solu bolon, christmast season dan festival sipinggan. (1)

Kepercayaan responden terhadap masyarakat sekitar dianggap cukup dengan persentase 62,4%. Hal ini dikarenakan wisatawan masing menganggap masyarakat masih ada yang tidak jujur dalam hal pemberian harga produk dan jasa yang ditawarkan. Contoh lain ketidak jujuran masyarakat adalah ketika membeli buah mangga di objek wisata dimana timbangan tidak sesuai, kualitas buah yang kurang baik. Hal lain yang membuat penilaian wisatawan cukup disebabkan kurangnya keramahan penduduk terhadap wisatawan. Dalam melakukan kunjungan wisata, wisatawan berpendapat bahwa mereka merasa nyaman dan tidak mengalami gangguan dari masyarakat sekitar. Kepercayaan responden terhadap agen perjalanan yang menawarkan jasa dianggap sangat baik dengan persentase 86,0%. Hal ini dikarenakan agen perjalanan menawarkan layanan yang baik dan informasi yang cukup kepada wisatawan mulai dari akomodasi, restoran dan alat transportasi yang digunakan selama melakukan kunjungan wisata. Tanggapan responden terhadap kepercayaan petugas wisata yang siap membantu wisatawan dianggap kurang dengan persentase 50.8%. Hal ini dikarenakan wisatawan merasa sulit untuk mencari petugas wisata ketika membutuhkan informasi tentang objek wisata atau keperluan selama melakukan kunjungan ke Danau Toba. Kepercayaan responden terhadap produk dan jasa yang ditawarkan dianggap kurang dengan persentase 52,6%. Hal ini disebabkan karena kualitas produk dan layanan yang diberikan dianggap tidak sesuai atau terlalu mahal terutama untuk makanan dan minuman yang ditawarkan. Kepercayaan responden terhadap sarana dan

prasarana dianggap sangat baik dengan persentase 86.4%. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sedang gencar melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana seperti pengadaan bus pariwisata Samosir yang bisa diakses gratis yang di fasilitasi oleh dinas pariwisata Kabupaten Samosir dan dinas perhubungan Kabupaten Samosir, adanya kapal wisata berbentuk rumah adat batak dan patung sigale-gale, pembagunan dermaga jetty, perbaikan dermaga Ambarita, dermaga Simanindo, pelebaran jalan lingkar samosir dan pembangunan jembatan tano ponggol yang menghubungkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera di Kecamatan Pangururan. Kepercayaan wisatawan terhadap iklan, brosur yang diberitakan dianggap baik dengan persentase 76.6%, dimana wisatawan merasa mendapatkan informasi dari https: samosirkab.go.id yang berisi informasi kegiatan-kegiatan tahunan yang akan dilakukan dan brosur yang diperoleh dari hotel. Kepercayaan wisatawan terhadap citra Danau Toba sebagai Monaco of Asia dianggap baik dengan persentase 75% dengan rentang nilai 3.75. Danau Toba dianggap sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi wisata yang luar biasa baik dari alam, budaya dan kuliner. Kepercayaan responden terhadap kredibilitas dinas pariwisata dalam mengembangkan pariwisata dianggap baik dengan persentase 73.2% dengan rentang nilai 3.66 hal ini dinilai dari pembangunan pariwisata yang sedang berlangsung di Kabupaten Samosir.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat dapat diambil kesimpulan bahwa citra destinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kunjungan wisatawan di Danau Toba Kabupaten Samosir. Artinya semakin tinggi dan baik citra destinasi Danau Toba sebagai objek wisata maka semakin meningkatkan keputusan kunjungan wisatawan. Besarnya pengaruh variabel citra destinasi sebesar 25.8% dan sisanya 74.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi covid-19, kualitas jasa, kinerja wisata, dan lainnya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Samosir perlu meningkatkan citra destinasi agar wisatawan domestik maupun mancanegara memutuskan memilih liburan ke Danau Toba Kabupaten Samosir. Hal yang perlu diperhatikan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan seminar baik kepada masyarakat maupun petugas wisata. Disamping itu adanya penetapan standar harga dan kualitas terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di kawasan objek wisata Danau Toba. (1).

Beberapa strategi pengembangan Desa Wisata diatas dikatagorisasi kedalam empat aspek strategi pengembangan (aspek destinasi, aspek industri, aspek pemasaran dan aspek kelembagaan & SDM) sebagai berikut : I) Strategi pengembangan dalam aspek destinasi meliputi : a) strategi penciptakan brand image destinasi pariwisata, b) strategi penciptaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata, c) strategi penciptaan lingkungan sekitar daya tarik wisata. II) Strategi pengembangan dalam aspek industri meliputi : a) strategi pengembangan ragam produk wisata perdesaan berbasis keunikan potensi setempat, b) strategi peningkatan sertifikasi produk industri pariwisata. III) Strategi pengembangan dalam aspek pemasaran meliputi : a)

strategi peningkatan aktivitas pemasaran produk wisata perdesaan. IV) Strategi pengembangan dalam aspek kelembagaan dan SDM meliputi : a) strategi memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa dibidang pariwisata b) strategi membangun tatakelola kelembagaan c) strategi peningkatkan sistem keamanan berbasis desa adat, d) strategi peningkatkan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan, e) strategi peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata dan sapta pesona. (2, 5)

6. Kesimpulan dan Saran

Danau Toba memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata dunia baik potensi alam dan budaya, ditambah dukungan dari faktor eksternal yang memberikan peluang yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi desa wisata yang berbasis masyarakat. Strategi pengembangan meliputi: menciptakan brand image destinasi pariwisata, penciptaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata, penciptaan lingkungan sekitar daya tarik wisata, pengembangan ragam produk wisata pedesaan berbasis keunikan potensi setempat, peningkatan sertifikasi produk industri pariwisata, peningkatan aktivitas pemasaran produk wisata pedesaan, memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa dibidang pariwisata, membangun tatakelola kelembagaan, peningkatan sistem keamanan berbasis desa adat, peningkatan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata dan sapta pesona.

Saran

Adanya komitmen masyarakat, pelatihan dan promosi yang intensif akan berdampak pada meningkatkan pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Simarmata HMP, Saragih RS. Brand image sebagai Strategi Peningkatan Jumlah Wisatawan Danau Toba “Monaco of Asia” di Kabupaten Samosir. J Educ Hum Soc Sci. 2020;3(2):533–7.
2. Mahadewi NPE, Sudana IP. Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. J Anal Pariwisata. 2017;17(1):41–5.
3. Isnaini, P. R. & Abdillah, Y. (2018). Pengaruh Citra Merek Destinasi Terhadap Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Serta Dampaknya Pada Minat Kunjungan (Survei pada Pengunjung Taman Rekreasi Selecta Kota Batu yang termasuk dalam Kategori Generasi Millennial). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 5(2): 122–129.
4. Lubis, F. R. A., Suharyanto, A., Effendy, R., Meidasari, V. E., & Shahnaz, L. (2020). Role of Facebook Advertising in Promoting Tourism in Asia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1).
5. https://www.bfi.co.id/id/blog/20-tempat-wisata-di-indonesia-yang-populer-dan-mendunia

Biodata Penulis

Noverita Sprinse Vinolina, Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Penulis bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai dilaksanakan berturut-turut pada tahun 1992, 1997 dan 2014 dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Penulis tertarik untuk menulis tentang Strategi Destinasi Wisata Danau Toba dengan Pemberdayaan Masyarakat. Pelatihan dan pendampingan intensif kepada masyarakat sekitar Danau Toba dan pelaksanaan dan evaluasi di lapangan secara berkala sehingga pencapaian yang diharapkan akan lebih maksimal. Semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat diharapkan saling bersinergi untuk pencapaian yang lebih baik pada masa kini dan mendatang. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas ide untuk kemajuan Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju. Bersama kita bisa.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN : PENGEMBANGAN POTENSI BUDAYA WISATA KULINER PASAR KAMU (PEKAN SARAPAN KARYA ANAK MUDA) DESA DENAI LAMA, PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG

Pujiati
Fakultas Ilmu Budaya

1. Latar Belakang

Tulisan ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran berkaitan persoalan-persoalan sustanaible development pembangunan pariwisata dalam pengentasan kemisikinan yang terjadi di nasyarakat Indonesia. Satu diantara masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata, dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan dimana Lembaga-lembaga donor internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional mengakui bahwa pariwisata sebagai industri yang telah berhasil mempercepat pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, dan telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan di negara-negara berkembang.

Berbagai hasil studi di beberapa negara berkembang, seperti Namibia, Costa Rica, dan Tanzania juga menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata terbukti telah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainya. Community-Based Tourism (CBT) merupakan strategi yang dianggap tepat dalam pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangan pariwisata, khususnya pariwisata alam dan budaya, yang bisa dijadikan modal dalam upaya mengurangi kemiskinan (Sukmana, 2018).

Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah kota/kabupaten telah berhasil menggunakan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Namun pemanfaatan sumber daya pariwisata juga mesti selaras dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya pariwisata berlandaskan budaya lokal dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan berdasarkan studi

literature. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan (Setijawan, 2018).

Badan Pusat Statistik (Marhaeni, 2018: 1), pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia, yakni penduduk dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan mencapai 27,77 juta orang (sekitar 10,64 persen), bertambah sebesar 690 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang jumlahnya sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017. Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Kemiskinan dikategorikan ke dalam empat bentuk yakni: yakni: Pertama, Kemiskinan absolute, yaitu apabila tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; Kedua, Kemiskinan relative, yaitu kondisi di mana pendapatanya berada pada posisi di atas garis kemiskinan namun relative lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya; Ketiga, Kemiskinan struktural yaitu kondisi atau situasi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; dan Keempat, Kemiskinan kultural yaitu mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, boros, tidak kraetif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya (Jamasy,2004: 30-31).

World Bank membagi dimensi kemiskinan kedalam empat hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan low capacity. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidak berdayaan. Terdapat enam modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. Pertama, modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang pertanian, industri termasuk industri jasa. Ketiga, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, sanitasi dan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat menyediakan pelayanan

lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia. Kelima, modal institusi publik, seperti peraturan-peraturan perdagangan komersial, sistem hukum, pelayanan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam, modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam (Kurniawan, 2017: 16).

Penanganan masalah kemiskinan telah menjadi perhatian dunia yang tercermin dari:(1) Pada tahun 1995 dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (High Level Conference) di Copenhagen, tentang pentingnya pembangunan sosial (sosial development), yakni“Emphasizing poverty reduction efforts, building sosial solidarity, andcreatingjobs”; (2) Pada tahun 2000 dilaksanakan “The Millennium Declaration of the MGDs”, atas inisiatif Perserikatan Bangsa- Bangsa (Uinted Nations) yang diikuti oleh 189 negara. Deklarasi ini menyepakati 8 poin kesepakatan untuk mengurangi kemiskinan; dan (3) Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) di Washington pada tahun 2004, yang diikuti oleh 55 negara. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk miskinnya cukup banyak, juga memiliki komitmen untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dituwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran dan program. Dalam kebijakan anggaran, pemerintah Indonesia untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, mengalokasikan dana sebesar Rp 1.454,5 Triliun untuk anggaran pengurangan kemiskinan. Jumlah keseluruhan APBN Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 1.454,5 Triliun. Dengan demikian persentase alokasi anggaran khusus untuk mengurangi kemiskinan dalam APBN 2018 sebesar 20,13%.

Pemerintah di negara- negara berkembang meyakini bahwa pariwisata mempunyai potensi besar untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Dari berbagai analisis yang pernah dilakukan, para ahli akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam tiga bentuk, yakni: Pertama, perluasan kesempatan kerja; Kedua, peningkatan pendapatan (devisa); dan Ketiga, pemerataan pembangunan antar- wilayah. Strategi yang perlu dilakukan agar pengembangan pariwisata fungsional bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara melapangkan jalan bagi kaum miskin untuk menjadi pelaku usaha pariwisata (Damanik, et all, 2005: 17).

Pengembangan wisata kuliner penting dapat menjadi aset wisata dan menaikkan income pendapatan masyarakat Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang. Oleh karena itu pengembangan sadar wisata bagi masyarakat Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang dan Sumatera Utara perlu ditanamkan dan dikomitmenkan yang berguna untuk mensejahterakan dan memartabatkan masyarakat Sumut dan pemerintahannya secara bersinergi untuk mensukseskan

pariwisata sumatera Utara. Hal ini perlu dicontoh masyarakat Bali dan masyarakat Yogyakarta yang begitu antusias dan merasa penting melayani wisatawan dengan baik, ramah dan jujur serta penuh bantuan sehingga wiasatawan merasa gembira dan senang selama berekreasi di tempat-tempat tersebut.

Sulitnya bagi wisatawan domestik apalagi wisawatan muslim untuk menemukan kuliner halal ketika berekreasi ke Pulau Samosir dan Tuk Tuk merupakan salah satu contoh kendala besar, ketika kebutuhan dasar manusia untuk makan tidak terpenuhi maka akan menjadi permasalan besar kenyamanan seseorang/masyarakat untuk berwisata.

2. Masalah

1. Apakah sustanaible development pembangunan pariwisata dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah pasar kamu sebagai salah satu sample dan icon wisata kuliner ada di Sumatera Utara dapat membantu kesejahteraan masarakat desa Pantai Labu?

Pengembangan wisata kuliner di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang terkesan masih terabaikan, padahal jika mampu dikelola secara maksimal dapat medongkrak kunjugan wisatawan. Bagi rakyat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang. Istilah wisata sebenarnya tidak asing lagi, karena mayoritas daerah mempunyai potensi wisata, hanya perlu dibangkitkan dan dikembangkan. Selama ini pemerintah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata cenderung hanya fokus pada wisata alam dan lainnya kadang kala berbagai pengembangan wisata budaya kuliner yang minim belum maksimal diberdayakan.

Adapun identifikasi permasalahan yang terdapat pada masyarakat Pasar kamu yaitu:

- terdapat jumlah pengunjung yang banyak namun fasilitas untuk mengantisipasi hujan turun belum ada karena ruang terbuka tanpa ada bangunan yang melindungi pengunjung dari terpaan hujan.
- Minimnya fasilitas toilet yang menyebabkan antrian panjang para pengunjung.
- Layanan wisatawan yang masih perlu ditingkatkan karena pelayanannya masih seadanya,pemasarannya masih amatiran,
- manajemennya dan kulinernya perlu ditingkatkan mengikuti standar kualitas kuliner yang sedap dan lezat dan hiegienes.
- Warung jualannya dihalaman kampung Pasar Kamu tsb unik, sederhana,
- Perlu ditingkatkan penataannya supaya lebih menarik menjadi wisata kuliner yang yang nyaman, asri dan bersih dan indah serta lahan lokasi parkir yang masih terbatas.
- Pembelian tempu (alat tukar uang untuk belanja yang terbuat dari batok) mengalami antrian panjang
- Kemasan makanan masih tradisional, namun perlu dibuat menarik

- Kiosnya sederhana
- Pemasarannya masih amatiran
- Manajemennya belum baik
- Varian rasa belum beragam. Seharusnya ada pilihan sausnya bisa coklat, keju, mocca, pandan, buah mengikuti selera pasar khususnya kaum milineal dsb
- Masih berserak-serak kiosnya belum tertata rapi dan indah menjadi kampung wisata
- Belum menjadi tempat wisata yang nyaman, asri dan bersih.
- Tempat parkir masih sulit dan kamar mandi yang terbatas sehingga antrianpanjang

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Ada 2 pemecahan masalah yang ditawarkan :

(1) Sustanaible development pembangunan pariwisata sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia

(2) Pasar kamu sebagai salah satu sample dan icon wisata kuliner ada di Sumatera Utara dapat membantu kesejahteraan masarakat desa Pantai Labu

3.1 Sustanaible development pembangunan pariwisata dapat membantu pengentasan kemiskinan di dunia

Sustanaible development pembangunan pariwisata dapat membantu pengentasan kemiskinan di semua belahan dunia baik di negara maju maupun berkembang salah satunya seperti Indonesia. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan memiliki potensi besar untuk mengentaskan rakyat dan masyarakat dari kemiskinan. Sumbangan pariwisata yang secara signifikan bagi perkembangan kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam tiga bentuk, yakni: **Pertama, perluasan kesempatan kerja Kedua, peningkatan pendapatan (devisa); dan Ketiga, pemerataan pembangunan antar- wilayah.** Strategi yang perlu dilakukan agar pengembangan pariwisata fungsional bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara memudahkan infrasturuktur dan birokrasi bagi kaum miskin sebagai pelaku usaha pariwisata (Damanik, et all, 2005: 17).

Pembangunan pariwisata dapat memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis yang berkunjung pada suatu negara membawa devisa ke negara tersebut. Pengeluaran wisatawan merupakan devisa di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan.

Pemasukan devisa, maka negara akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Karena itu, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian dalam berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global. Adapun kemiskinan merupakan

permasalahan nasional, regional dan global yang selalu harus ditangani secara serius. Mengentaskan kemiskinan memerlukan dana besar. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan rakyat adalah melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan yang integratif dengan bisnis pariwisata.

Keterkaitan antara Pengembangan Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja, dan pengurangan Kemiskinan. Pariwisata dalam arti modern merupakan gejala zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan manusia akan kesehatan dan pergantian hawa udara dan suasana, penilaian yang sadar terhadap keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan alam semesta, dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas sosial dalam masyarakat. Tentunya ini didukung hasil perkembangan era digitaisasi, perniagaan, industri dan perdagangan serta penyempurnaan alat-alat transportasi, maka industri pariwisata Indonesia berkembang semakin pesat dan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah (Freuler, Pendit, 2006:34).

Sektor pariwisata telah mampu memberikan dampak ganda *(multiple effect)* pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Gelgel, 2006: 2). Banyak kegiatan yang biasanya ditimbulkan oleh pariwisata pada suatu negara, akan mendatangkan lebih banyak kesempatan kerja dari suatu sektor ekonomi lainnya. Alasanya karena industri pariwisata umumnya berorientasi pada penjualan jasa (Wahab,2003: 88-89)

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industry (Pendit, 2006: 32).

Pariwisata sebagai suatu sistem dapat disinergikan dengan kegiatan apapun termasuk kegiatan ekonomi kerakyatan bahkan dengan kehidupan sehari-hari di desa atau dusun yang paling terpencil sekalipun. Kondisi tersebut tentunya mendudukkan pariwisata menjadi salah satu jawaban untuk masalah kemiskinan (Setijawan, 2018).

Tujuan utama dari kegiatan pariwisata yang dilakukan adalah untuk memperoleh kesenangan atau menghilangkan perasaan tertekan karena rutinitas kerja. Pada kondisi ini perolehan kepuasaan dari kegiatan yang dilakukan wisatawan menjadi sangat penting. Konsep wisatawan berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta, wisata yang berarti perjalanan yang sama atau dapat disamakan dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Kata wisatawan dalam beberapa hal berbeda dengan tourist dalam bahasa Inggris (RG. Soekadijo,2000). Pariwisata menurut Yoeti (2001;47) adalah kegiatan bersenang-senang. Syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan wisata, apabila (1) perjalanan di lakukan dari suatu tempat ke tempat lain, di luar tempat kediaman orang itu biasa tinggal; (2) perjalanan yang dilakukan

minimal 24 jam atau lebih; (3) tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak untuk mencari nafkah atau bekerja di tempat atau negara yang dikunjungi; dan (4) orang tersebut semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya dan uang yang dibelanjakannya dibawah dari negara asalnya atau tempat tinggalnya semula dan bukan dicari atau diperoleh di tempat kota, atau negara yang dikunjunginya

3.2 Pasar kamu sebagai salah satu sample icon wisata kuliner ada di Sumatera Utara dapat membantu kesejahteraan masarakat desa Pantai Labu

Pasar Kamu dimunculkan sebagai salah satu sample dan icon tempat wisata kuliner yang perlu dikembangkan dan pernah dikunjungi penulis khususnya dalam program pengabdian masyarakat USU tahun 2022 . Pariwisata berbasis kuliner merupakan komponen di bidang pengembangan kepariwisataan yang saat ini makin gencar dilakukan karena pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki wisata budaya yang berbeda dan unik yang tidak dimiliki daerah lain. Orientasi pengembangan pariwisata berbasis kuliner sangat menarik untuk dikembangkan, di satu sisi memberikan dampak positif bagi penerimaan daerah dan memberikan manfaat bagi penumbuh-kembangan industri kreatif yang berpengaruh bagi peningkatan pendapatan perkapita di daerah dan khususnya masyarakat di kampung tsb. Wisata berbasis kuliner dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan, misalnya dari aspek historis, keterlibatan atau partisipasi publik, cost budgeting, managemen marketing, sosio-ekonomi-budaya, literasi digital bagi pengelola dan mitra dan juga eksibisi yang dipromosikan.

Indonesia negara kaya wisata alam dan wisata budaya yang perlu dikembangkan di masa depan termasuk wisata kuliner. Beraneka ragam suku dan budaya menimbulkan ciri khas tersendiri di masing-masing daerah. Begitu pula dengan ciri khas di bidang kuliner. Tidak hanya beragam jenisnya, kelezatan kuliner Indonesia juga telah diakui oleh dunia internasional dengan pengakuan nasi goreng dan rendang sebagai makanan terenak sedunia untuk nomor satu dan nomor dua versi CNN, hal ini memperkuat branding kuliner nusantara (https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/441759/rendang-dan-nasi-goreng-jadi-makanan-terenak-di-dunia).

Kabupaten Deli Serdang tidak hanya terkenal dengan kekayaan budaya lokal dan ragam wisata kuliner. Setiap kota memiliki ciri khas wisata kuliner sepertikota Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi memiliki aset wisata kuliner lemang dan langkat kuliner dodol yang harus dikembangkan menjadi lokasi wisata kuliner. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan peningkatan pengetahuan wisata kuliner dan pelestarian wisata yang diterapkan melalui keterampilan pelayanan wisata, model pendekatan berbasis wisata sejarah antara aspek arsitektur, arkeologi, historis, keterlibatan atau partisipasi publik,

kelayakan, konservasi, sosio-ekonomi-budaya dan juga eksibisi yang dipromosikan bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi.

Kata wisata kuliner berasal dari bahasa asing yaitu *Voyages Culinaires* (Prancis) atau *Culinary Travel* (Inggris) yang artinya perjalanan wisata yang berkaitan dengan masak- memasak. Menurut Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional (*International Culinary Tourism Association*/ICTA), wisata kuliner merupakan kegiatan makan dan minum yang unik dilakukan oleh setiap pelancong yang berwisata. Berbeda dengan produk wisata lainnya seperti wisata bahari, wisata budaya dan alam yang dapat dipasarkan sebagai produk wisata utama, tetapi pada wisata kuliner biasanya dipasarkan sebagai produk wisata penunjang (Eri Besra, 2012:82).

Menurut Undang-undang Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Jenis wisata dibagi menjadi tujuh jenis yaitu wisata olahraga, wisata religius, wisata agro, wisata gua, wisata belanja, wisata ekologi dan wisata kuliner (Ismayanti, 2010). Wisata kuliner sendiri merupakan jenis wisata yang tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dengan memakan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan juga mendapatkan pengalaman menarik dengan memakan dan memasak aneka ragam makanan khas tiap daerah.

Wisata kuliner merupakan wisata yang dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk melakukan kunjungan terhadap tempat pembuatan makanan, festival makanan, restoran, atau suatu lokasi dengan tujuan mencoba makanan (Hall *et al*., 2003). Selain itu, terdapat juga definisi lain mengenai wisata kuliner, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan sebagai subjek dan media, tujuan dan kendaraan untuk wisata, dan kegiatan dalam wisata yaitu mencicipi makanan di restoran-restoran etnik, mengunjungi festival makanan, mencoba makanan pada saat melakukan perjalanan wisata dan bahkan memasak di rumah (Pendit, 2003).

Pada dasarnya makanan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan mentah dari alam sekitar, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas makanannya masing- masing. Menurut Harmayani, Santoso, dan Gardjito (2017), makanan tradisional adalah makanan yang diolah dari bahan pangan hasil produksi setempat, dengan proses yang telah dikuasai masyarakat dan hasilnya adalah produk yang citarasa, bentuk dan cara makannya dikenal, dan menjadi ciri khas kelompok masyarakat tertentu.

Seiring perkembangan zaman, makanan tradisional tidak hanya diproduksi secara konvensional, melainkan juga diproses menjadi suatu pangan olahan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan adalah makanan hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan, produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan mengubah bentuk pangan. Selain makanan, kekayaan kuliner terdiri dari minuman dan hidangan penutup (Yustisia Kristiana, 2018).

Wisata kuliner Pasar Kamu hanya untuk sarapan dan mencicipi aneka jajanan tradisional. Lokasi wisata kuliner yang mereka tuju beralamat di Jalan Perintis, Dusun II, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera UtaraSuasana perdesaannya sangat terasa dan makanan tradisional yang dijual enak-enak, harganya merakyat. Berada di Pasar Kamu bisa membuat bernostalgia ke masa kecil. Di pasar kuliner seluas satu hektare itu, bisa menemukan jajanan pasar yang susah ditemukan di Kota Medan. Di antaranya gatot, tiwul, dodol, grontol, dan apem gula merah, lontong sayur, apem, wedang jahe, dan kolak pulut durian. (https://travel.tempo.co/read/1507597/wisata-kuliner-pasar-kamu-deli-serdang-obat- kangen-jajanan-tradisional)

Dibuatlah konsep dagang UMKM tradisional dengan kearifan lokal menyajikan panganan sehat tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna kimia, semua dibuat secara alami. Begitu juga piringnya dibuat dari bambu dan lidi dianyam. Cangkirnya juga dari bambu atau tempurung. Disini dilakukan pengurangan penggunaan plastik. Pasar Kamu buka hanya hari Minggu pagi mulai jam 06.00 sampai jam 10.00 WIB. Anggota yang berjualan secara umum menggunakan pakaian tradisional, Pedagang saat ini lebih kurang 70 orang dengan jenis panganan lebih kurang 200 jenis seperti getuk, gotot, tiwul, grontol jagung dan kue rasida, juga minuman cendol serta lainnya yang enak dan alami cita rasanya. Ditambahkannya dagangan yang sisajikan di bawah pepohonan yang rindang dan sejuk, serta bisa dinikmati dengan duduk bertikar bersama keluarga. Untuk membeli panganan harus menukar uangnya dengan tempu atau tempurung yang dibentuk bulat yang harganya Rp 2000/tempuh. Harga panganan cukup terjangkau untuk kalangan menengah kebawah. (https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/family-style/17131-Wisata-Kuliner-Panganan-Tradisio nal-Pasar-Kamu-di-Deli-Serdang).

Pendiri Pasar Kamu, Dedy Sofyan mengatakan, banyak orang yang datang ke Pasar Kamu hanya untuk bernostalgia. Pasar Kamu memang didesain layaknya pasar rakyat tradisional yang menjajakan penganan tempo doeloe dengan dominasi selera Jawa dan Melayu, sesuai mayoritas suku yang tinggal di Kampong Lama, nama lawas Desa Denai Lama. Wisata kuliner Pasar Kamu merupakan usaha bersama masyarakat dengan berbasis kebudayaan yang ada di Kampong Lama. Usaha yang dikelola adalah pekan sarapan yang buka setiap hari Minggu. selain kue tradisional khas Jawa, pengelola Pasar Kamu juga menawarkan penganan tradisional khas Melayu yang sudah sangat jarang ditemukan. Bahkan sebagian sudah terlupakan dan cuma hidup dalam ingatan orang-orang tua. Misalnya kue rasida, kue dangai, kue kekaras, kue lempeng torak, kue pulut panggang, dan kue makmur (https://travel.tempo.co/read/1507597/wisata-kuliner-pasar-kamu-deli-serdang-obat- kangen-jajanan-tradisional)

Convention of the Safeguard of Intangible Cultural Heritage, UNESCO, tahun 2003 dan rekomendasi Konvensi UNESCO tahun 2008 mengidentifikasi dan menginventarisir warisan budaya tak benda yang meliputi *oral traditions* (tradisi-tradisi lisan) dan ekspresi budaya melalui bahasa, seni pertunjukan,

praktik sosial, ritual, perayaan, festival, pengetahuan lokal tentang alam, dan tradisi kerajinan adalah warisan budaya vital, karena terkait diversitas budaya dan kreatifitas manusia (Matodang dan Setiawan, 2015).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai dasar hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya dalam pemberdayaan masyarakat, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh. Manfaat UU pemajuan kebudayaan bagi masyarakat merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional (https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-5-2017-pemajuan-kebudayaan).

4. Strategi Pemecahan Masalah

Ada 4 stategi pemecahan masalah : 1. Sosialisasi Pengembangan wisata kuliner Pasar Kamu 2. Peningkatan servis dari pelayanan yang seadanya dengan konsep menggunakan 5 S (senyum, sapa dan salam, sopan dan santun) 3. Pemberdayaan Masyarakat melalui wisata kuliner ; salah satunya pasar kamu 4. Pelatihan kewirausahawanan membantu ekonomi kerakyatan dalam pengentasan kemiskinan di desa Pantai Labu tersebut.

1. Sosialisasi Pengembangan wisata kuliner Pasar Kamu

Perlu sosialisasi bagi tentang keberadaan padar kamu melalui youtube dan medsos. Hal ini supaya dapat dikenal masyarakat dam populer. Selama ini pengunjungnya yang datang dari kota Medan, Binjai, Deli Serdang dan Tebing. Keunikan mkanan tradisonalnya beraneka ragam tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Suasananya seperti suasana kampung, warung-warung kuliner berada dibawah-bawah pohon dan pembeliannya dengan alat tukar tempu.

Kemudian dibarengi ada musik life tradisional melayu dengan gendang dan arkodion dan pemain music dan penyanyinya menggunkan pakaian Melayu Teluk Belanga dan kebaya. Begitu juga dilokasi yang sama di tempat yang terpisah ada kesenian tradisonal Jawa dengan music life gending jawa dan pakaian jawa yang digunakan para pemain dan penyanyi.

Sosialisasi ini dapat dilakukan juga sebagai motivator oleh dan dari para dosen, mahasiswa dan para tokoh terdidik dan kaum cendekiawan supaya timbul kesadaran bersama untuk membangun dan mengembangkan wisata kuliner yang indah, bersih, asri, sehat dan nyaman bagi masyarakat pedagang kuliner dan pengunjung Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa Pantai Labu tsb.

2. Pelayanan yang seadanya dapat ditingkatkan melalui pelatihan ini dengan konsep 5 S ; **senyum, sapa dan salam, sopan dan santun**. Pelatihan manajemen diberikan secara baik, professional dan berkelanjutan serta bisa di monitoring oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Deli Serdang untuk memonitor Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi adakah menaikkan dan meningkatkan taraf ekonomi penjual lemang dan jika dikelola secara professional pengembangan wisata kuliner lemang ini dapat berkontribusi bagi pemasukan ekonomi pendapatan masyarakat dan pemerintah kabupaten dengan pengembangan wisata Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang. Pelestarian kuliner tradisional ini jika dikelola dengan manajemen yang baik maka akan menimbulkan rasa suka bagi generasi muda untuk memakan tradisional dan menyukai pelestarian kuliner tradisional tersebut sebagai asset budaya dan mendatangkan keuntungan yang menjanjikan.

3. Pemberdayaan Masyarakat melalui wisata kuliner ; salah satunya pasar kamu

Ada lebih kurang 100 KK yang ikut wirausaha UMKM dengan menjadi pedagang kuliner tradisional yang dibuka setiap hari minggu. Galeri Wisata Kuliner ini terpadu dan bersatu dengan taman edukasi sehingga anak-anak sekolah dan masyarakat umum dapat belajar menjadi pengrajin yang professional untuk memasak makanan, minuman dan kue tradisional dengan berkualitas dan higienes dan kemasan yang menarik tetap bercirikan tradisional dan hiasan yang menarik dan potongan kecil-kecil atau alternatif kemasan yang menarik serta rasa yang lezat, kualitas makanan yang bersih dan berkualitas enak dan lezat dengan cita rasanya serta varian yang beragam-ragam sesuai dengan trend minat konsumen. Pemasarannya tidak lagi amatiran, bisa menggunakan media onine untuk seputar kota Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang dan pengunjung yang berminat dari manapun.

4. Pelatihan kewirausahawanan membantu ekonomi kerakyatan dalam pengentasan kemiskinan di desa Pantai Labu tersebut.

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata ratai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memeliki ciri-ciri unik serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut:

1) Pariwisata berbasis masyarakat menemukakan rasionalitsnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karekter yang lebih unik diorganisasi dalam skala kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis wisata konvensional,
2) Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas- komunitas dan

pengusaha-pengusaha lokal,

3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvesional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

5. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu diwujudkan **wisata edukasi** yang baik, terpadu dengan tempat - tempat wisata yang telah terkenal di kawasan lainnya, maka akan terwujudlah pengembangan wisata kuliner yang apik, nyaman, asri, edukasi dan menarik bagi pengunjung lokal masyarakat Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi dan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia dan wisatawan asing dengan ditambahkan hiburan tradisional musik- musik dan tarian tradisional Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi, maka akan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dengan keamanan yang terjaga dengan baik. Perlu disosialisasikan gerakan komunitas pencinta wisata kuliner tradisional untuk melestarikan kuliner yang sedap dan lezat sebagai warisan nenek moyang kita menjadi bagian kearifan lokal yang berguna bagi pengembangan wisata kuliner khususnya masyarakat Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang dan umumnya bagi masyarakat Sumatera Utara, Indonesia dan wisatawan asing.

Wisata kuliner yang semakin berkembang tidak lagi hanya sekedar melakukan wisata kemudian makan apa saja yang ada dan kenyang. Namun, wisatawan juga ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai latar belakang sebuah makanan khas daerah tersebut (*story telling*) misalnya makanan apa, siapa yang membuat, mengapa dibuat dan bagaimana menggambarkan budaya suatu daerah melalui makanan tersebut. Adanya konsep *story telling* ini akhirnya membuat makanan khas suatu daerah menjadi salah satu konsep daya tarik wisata untuk daerah itu sendiri. Wisata kuliner telah muncul sebagai aspek sentral dari setiap pengalaman wisata. Ini mencakup praktik budaya, lanskap, laut, sejarah lokal, nilai-nilai, dan warisan budaya. Makanan berfungsi sebagai penghubung antara kita dengan warisan kita miliki, dan orang- orang di sekitar kita. Ini adalah saluran yang beragam dan dinamis untuk berbagi cerita,serta membentuk hubungan, dan membangun komunitas. Dengan menggabungkan perjalanan dengan pengalaman makan dan minum, wisata makanan menawarkan "kesan tempat" yang baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan. *(UNWTO Second Report on Gastronomy Tourism).*

2. Membentuk sadar wisata sustanaible development melalui wisatakuliner tradisional.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan pariwisata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran wisata bagi masyarakat yang berkonsekuensi pada kesejahteraan dan pelayanan optimal yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Membentuk gugus tugas bersama perangkat kampung, pemerinta daerah Kota Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi dalam FGD untuk menjalankan program komunitas pencinta Wisata Pasar Kamu untuk menjaga kebersihan,

keindahan dan keamanan serta keramahan dan kenyamanan wisata kuliner tradisional dengan berbagai tampilan seni kebudayaan. Sadar wisata bagi masyarakat Sumatera Utara perlu ditanamkan dan dikomitmenkan yang berguna untuk mensejahterakan dan memartabatkan masyarakat sumut dan pemerintahannya secara bersinergi untuk mensukseskan pariwisata sumatera Utara.

3. Pelatihan berkelanjutan manajemen pengelolaan pasar kamu yang menarik, indah dan bersih untuk membantu penjual kuliner di pasar Kamu berkaitan pembuatan kemasan yang menarik dan infrastruktur area kampung kuliner Pasar Kamu Pantai Labu Deli Serdang Tinggi.

4. Pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, tokoh masarakat dan masyarakat dalam memajukan pengembangan wisata kuliner di daerah masing-masing supaya tidak terabaikan pengelolaan wisata ini dan pengentasan kemiskinan melalui program pariwisata

6. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pariwisata (tourism) menjadi penggerak bagi perkembangan sosial- ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan berusaha, dan mengembangkan infrastruktur wilayah. Lembaga-lembaga donor internasional (international donor agencies) dan Lembaga Swadaya Masyarakat *(Non Government Organization)* mengakui bahwa pariwisata sebagai industri yang telah berhasil mempercepat pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, dan telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan di negara-negara berkembang.

Pariwisata merupakan suatu sistem yang dapat menjadi sektor andalan perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengetasan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dari keseluruhan tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi terhadap pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan pariwisata. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan pariwisata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran wisata bagi masyarakat yang berkonsekuensi pada kesejahteraan dan pelayanan optimal yang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan wisata kuliner adalah salah satu bentuk wisata budaya yang popular di berbagai belahan dunia berkaitan aneka macam makanan atau jajanan, khususnya di Pasar Kamu ini mennjual jajanan sarapan pagi yang bersifat kuliner tradisional setiap hari Minggu saja. Wisata kuliner budaya sendiri didefinisikan sebagai perjalanan destunasi wisata yang dilakukan atas dasar ketertarikan untuk kunjungan, menikmati makanan, mendengarkan musik, menyaksikan tarian tradisional dan atat permainan traisional seperti egrang, congkak atau dakon bersama, mempelajari keadaan lingkungan masyarakat kampung, susasana alam perkampungan dengan pondok kuliner

tradisonal, pepohonan kehijauan di alam terbuka seperti banyaknya di sepanjang pondok kuliner terdapat pohon kelapa, pohon nangka, pinang dsb.

Daftar Pustaka

Al-Fath, E.D. (2016). *Dari Menanam Buah menjadi Menanam Rumah: Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Batu*. Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies Vol. 1 No. 274-83.

Bahan kuliah, *Sustainable Urban Development - Future of Indian Cities : An overview*.

Badan Pusat Statistik. *Buku Berita Resmi Statistik no. 35/04/th. XVIII,* Jakarta, 2015

Damanik, J., Kusworo, H.A., & Raharjana, D.T. (Peny.). (2005). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.

Gelgel, I. P. (2006). *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO): Implikasi Hukum dan Antisipasinya.* Bandung: Refika ADITAMA.

Gerungan, W.A. (1987). *Psikologi Sosial*.Bandung: Eresco.

Giampiccolia,A., Saayman, M., and Jugmohanc,S. (2016). Are 'Albergo Diffuso' and community-based tourism the answers to community development in South Africa?. *Journal of Development Southern Africa*, vol. 33, No. 4, 548– 561.

Hakim, Luchman. (2004). *Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang: Bayumedia.

Jamasy, O. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta:Belantika.

Kurniawan, M. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin: StudiKasus di kecamatan Sungai Lilin.* Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Volume 8,No.01, JULI 2017.

Lapeyre, R. (2010). *Community-based tourism as a sustainable solution to maximise impacts locally? The Tsiseb Conservancy case*, Namibia. Development Southern Africa Vol. 27, No. 5, 757-772.

Marhaeni, H. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Mgonja, JT., Sirima, A., Backman, KF., & Backman, SJ. (2015). *Cultural community-based tourism in Tanzania: Lessons learned and way Forward*. Journal of Development Southern Africa, Vol. 32, No. 3, 377– 391.

Pendit, N.S. (2006). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PradnyaParamita.

Pitana, I Gd., & Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Purba, J. (2002). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jakarta: Republik Indonesia.

Setijawan, Arief 2018. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. Jurnal Planoearth, PWK FT UMMat | ISSNVol. 3 No. 1, Februari 2018, hal. 7-11

Soemarwoto, O. (1997). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.

Soerjono, S. (1986). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Soekadijo,R.G., *Anatomi Pariwisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Sukmana, Oman . 2018. Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata. Jurnal Sosio Informa Vol. 4, No. 03, September - Desember, Tahun 2018. Kesejahteraan Sosial

Trejos, B., & Chiang, LHN. (2009). *Local economic linkages to community-based tourism in rural Costa Rica*. Singapore Journal of Tropical Geography 30, 373–387.

UN-Habitat. (2005). *Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah*.Kenya; Nairobi GPO.

Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta: Prandnya Paramita.

Wardiyanta (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Yoeti, O. A. (2006). *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Biodata Penulis

Prof. Pujiati, M.Soc. Sc., Ph.D
Bidang ilmu dan Fakultas: Guru Besar tetap bidang Ilmu Telaah Pranata Sosial Masyarakat Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.
Riwayat pendidikan: S1 Sastra Arab USU lulus pada tahun 1986. S2 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 1996**.** S3 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 2007.
Riwayat pekerjaan: Diterima PNS sebagai staf pengajar Sastra Arab USU di Fakultas Sastra/FIB Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan menjadi guru besar USU terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia.
Dll yang dianggap perlu: Peneliti Hibah Bersaing DIKTI untuk tahun 2009 dan 2010, Mengikuti *Program Academic Recharging* (PAR - B) DIKTI dalam penulisan buku selama 3 bulan di Nanyang Technological University, Singapore pada tahun 2009. Kemudian memperoleh Hibah DIKTI Program IBIK pengabdian Masyarakat pada tahun 2011. Pembicara pada *the 16 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* 2016 atas biaya Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh berbagai peneliti kajian Islam baik dari Timur Tengah, Amerika, Eropah, Australia, Asia dan Asia Tenggara pada tanggal 1-4 November di IAIN Raden Intan Lampung. Ketua Prodi Sastra Arab pada tahun 2011-2015 dan PRODI Sastra Arab USU dengan tim borang kali kedua memperoleh dan mempertahankan akreditasi A pada BAN PT tahun 2015-2020, memperoleh sertifikat internasional ISO pada tahun 2016, melaksanak tugas-tugas edukatif di FIB USU baik strata S1, S2 dan S3; Sastra Arab USU (S1), Linguistik (S2 dan S3), Ilmu Sejarah (S2), Sosiologi (S2) Fisip USU, dan Antropologi Sosial (S2) UNIMED serta tugas-tugas penelitian dan Pengabdian masyarakat. Penghargaan yang diterima antara lain; Dosen Teladan II USU pada tahun 1997, Dosen Teladan II pada tahun 2008, Ketua Prodi berprestasi II Tingkat USU pada tahun 2015 serta memperoleh kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI pada tahun 1999. Sebagai reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat USU sejak tahun 2017 sampai sekarang dan peneliti DRPM DIKTI untuk skema PTUPT tahun 2018, serta pengurus UMM USU tahun 2019 sampai sekarang dan sekretaris Dewan Guru Besar komisi B sejak tahun 2019- sekarang. Peserta shortcourse Mesir selama sebulan 8 Januari 2020 – 8 Februari 2020. Agustus 2020 mendapat gelar kehormatan adat Melayu Gelar Datuk "Baiduri Eka Danta" dari Kesultanan Negeri Serdang. Oktober 2022 selama 2 minggu academic tour presentasi di KBRI Indonesia di Washington, ke International Institute of Islamic Thought (IIIT), Harford University, isabet academy dan berbagai kampus lainnya di Amerika.

SUSTAINABLE TOURISM: SUATU PEMIKIRAN UNTUK PENGELOLAAN WISATA DANAU TOBA

Rahmawaty
Fakultas Kehutanan

1. Latar Belakang

Sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) adalah pendekatan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang memperhatikan dan mengintegrasikan secara seimbang aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan [1-3]. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi destinasi wisata, komunitas lokal, dan lingkungan, sambil memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Adapun prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan meliputi: konservasi lingkungan, pelestarian budaya dan warisan, kesejahteraan sosial dan ekonomi, partisipasi dan keterlibatan Masyarakat dan peningkatan kesadaran wisatawan.

Prinsip-prinsip *sustainable tourism* bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta untuk menciptakan pengalaman wisata yang bermanfaat dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Pengembangan pariwisata berkelanjutan telah menjadi fokus utama di banyak destinasi wisata di seluruh dunia. Wisata berkelanjutan mengacu pada praktik-praktik yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan [4]. Contoh yang menarik untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Danau Toba, salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia (Gambar 1). Danau Toba amerupakn danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan daya tarik utama bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Namun, pertumbuhan pariwisata yang cepat dan tidak terkendali dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, perubahan budaya, dan ketimpangan ekonomi.

(Dokumentasi: Rahmawaty, 2022)

Gambar 1. Keindahan Panorama Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara

Masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata di Danau Toba. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum-forum komunitas (seperti Forum DAS), dialog antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi, sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang lingkungan dan sumber daya alam di sekitar Danau Toba. Dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, masyarakat perlu berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, pengendalian polusi, dan perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar danau. Dalam hal pelestarian budaya lokal, masyarakat harus berperan dalam melestarikan dan mempromosikan budaya masyarakat kepada pengunjung. Dengan memperkuat identitas budaya, masyarakat setempat dapat mendapatkan manfaat ekonomi dan pengakuan yang lebih besar. Budaya lokal seperti “Pesta Danau Toba” yang ada di masyarakat Toba merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung pengelolaan Danau Toba berkelanjutan. Tidak kalah pentingnya adalah promosi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Pendorong penting dalam hal ini adalah promosi pariwisata berkelanjutan, yang mengedepankan produk dan layanan lokal serta memberikan insentif bagi wisatawan untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba, maka perlu dikaji apa masalah, bagaimana pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Tulisan ini juga membahas bagaimana persepsi

dan partisipasi Masyarakat peran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba.

2. Masalah

Masalah dalam pengelolaan wisata dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba terkait beberapa aspek berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa informan kunci, diantaranya: terkait kesadaran dan pendidikan, partisipasi masyarakat, konflik penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, pelestarian budaya dan identitas ketimpangan ekonomi. Salah satu masalah utama, di daerah ini kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan di kalangan masyarakat masih rendah. Pertumbuhan pariwisata yang pesat dapat menyebabkan persaingan yang meningkat antara sektor pariwisata dan sektor lainnya dalam penggunaan sumber daya seperti air, lahan, dan energi. Hal ini dapat memicu konflik antara masyarakat setempat yang menggantungkan hidup masyarakat pada sektor lain seperti pertanian atau perikanan. Perkembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat mengancam kelestarian budaya lokal dan identitas masyarakat setempat. Adopsi budaya dan gaya hidup yang lebih komersial dapat menggeser budaya lokal yang autentik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat setempat untuk berperan dalam pelestarian dan promosi budaya masyarakat. Inisiatif seperti "Pesta Danau Toba", kegiatan seni tradisional, dan promosi warisan budaya dapat membantu memperkuat identitas budaya dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antara masyarakat setempat dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Merujuk dari masalah yang dikemukakan di atas, maka beberapa pemikiran pemecahan masalah terkait peran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba, antara lain: 1) Perlu adanya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan melalui kampanye penyuluhan, seminar, dan program edukasi. Melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan seperti Universitas Sumatera Utara (USU) untuk memasukkan pendidikan tentang pariwisata berkelanjutan ke dalam kurikulum; 2) Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang praktik-praktik berkelanjutan dan dampak pariwisata; 3) Perlunya melibatkan masyarakat dengan membangun forum partisipasi masyarakat seperti Forum DAS untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata dan memberikan pelatihan dan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berperan dalam pengelolaan dan pemantauan pariwisata berkelanjutan serta mendorong kemitraan antara masyarakat setempat, pelaku pariwisata, dan pemerintah untuk mengembangkan rencana

pengelolaan bersama yang berkelanjutan; 4) Perlunya pengelolaan sumber daya dengan mengembangkan rencana pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dalam pemantauan dan perlindungan ekosistem Danau Toba dan mendorong penggunaan energi terbarukan dan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di sektor pariwisata serta memfasilitasi penggunaan teknologi hijau dan inovasi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan; 5) Perlunya pemeliharaan budaya dan Identitas dengan memperkuat peran masyarakat dalam melestarikan budaya lokal dan warisan sejarah melalui program pelatihan, dukungan keuangan, dan promosi budaya, mengembangkan kegiatan budaya dan seni lokal yang dapat diakses oleh wisatawan, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan untuk melindungi dan mempromosikan budaya local; 6) Pentingnya pembagian manfaat ekonomi dengan cara mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata, dengan memberikan akses pendanaan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat setempat, memperkuat jaringan usaha lokal dan mempromosikan produk lokal yang berkelanjutan kepada wisatawan dan mengembangkan program kerja sama dengan sektor pariwisata untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat; 6) Monitoring dan evaluasi dengan cara membentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat setempat untuk mengukur dampak pariwisata berkelanjutan dan memperbaiki kebijakan dan praktik yang tidak berkelanjutan.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Merujuk dari pemikiran pemecahan masalah, maka beberapa pemikiran strategi pemecahan masalah terkait peran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba, antara lain: perlunya kolaborasi dan kemitraan pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk wisata berkelanjutan kampanye kesadaran dan pendidikan, penerapan praktik berkelanjutan, pengawasan dan evaluasi, pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas, serta pemeliharaan ekosistem. Mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat untuk merumuskan rencana aksi bersama dan tujuan pariwisata berkelanjutan penting untuk pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Membangun kemitraan jangka panjang dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga penelitian untuk mendapatkan bantuan teknis, sumber daya, dan keahlian dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan penting untuk pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Memberdayakan masyarakat setempat melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan sektor pariwisata penting untuk pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Mendorong kewirausahaan lokal dengan memberikan akses ke modal, pelatihan bisnis, dan jaringan untuk usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata penting untuk pariwisata berkelanjutan di Danau Toba.

Beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk wisata Danau Toba, seperti: pengembangan produk wisata yang berkelanjutan di Danau Toba dan berbasis budaya, memastikan bahwa produk wisata yang ada memenuhi standar berkelanjutan dalam hal lingkungan, sosial, dan budaya, melakukan kampanye kesadaran yang berkelanjutan kepada masyarakat setempat, pelaku pariwisata, dan wisatawan tentang praktik-praktik berkelanjutan dan pentingnya perlindungan lingkungan serta budaya, mendorong pelaku pariwisata untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, seperti: penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air yang efisien, pengurangan limbah, dan pengurangan polusi, memberikan insentif kepada pelaku pariwisata yang menerapkan praktik berkelanjutan, seperti pengakuan, penghargaan, dan dukungan promosi, membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak pariwisata berkelanjutan dan memastikan pematuhan terhadap standar yang ditetapkan, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas menuju Danau Toba, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum, untuk mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, memastikan bahwa pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Melakukan upaya aktif dalam pemeliharaan ekosistem Danau Toba, termasuk pembersihan enceng gondok yang banyak menutupi permukaan air Danau Toba. Salah satu obyek wisata andalan Danau Toba disajikan pada Gambar 2.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(Dokumentasi: Rahmawaty, 2022)

Gambar 2. Obyek wisata di Danau Toba yang sangat indah: a. pintu gerbang Toba Caldera Geopark Sipinsur Geosite, b. Tegakan pinus di Kaldera Toba, c. Danau Toba dilihat dari Kaldera Toba, d. Lokasi Panggung Opera Batak Sipinsur, e. Papan informasi Geosite Sipinsur dataran tinggi terpopuler, f. Resto dan Homestay di Sipinsur

Hasil penelitian terkait persepsi dan partisipasi responden terhadap pengelolaan wisata Danau Toba [4] menunjukkan bahwa 59% responden mengungkapkan bahwa dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam ekowisata dan pengembangan pariwisata dapat menyelaraskan pariwisata dengan karakteristik unik daerah, meningkatkan pengelolaan, menciptakan produk wisata baru, dan membuat ekowisata menarik bagi khalayak yang lebih luas sembari melestarikan elemen budaya dan lingkungan yang berharga. Temuan penelitian menunjukkan pengakuan dan apresiasi yang kuat terhadap peran kearifan lokal dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, khususnya di kawasan ekowisata. Mayoritas responden (59%) sangat setuju bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan potensi dan karakteristik daerah yang unik, termasuk mengakui pengaruh kearifan lokal dalam membentuk pembangunan tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal dalam konteks pengembangan pariwisata, khususnya dalam ekowisata.

Penerapan strategi ini harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku pariwisata, masyarakat setempat, dan akademisi untuk mencapai pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba.

5. Rencana Tindak Lanjut

a. Upaya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Danau Toba

Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan wisata Danau Toba yang berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan, seperti: konservasi lingkungan, pemeliharaan budaya lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan promosi ekonomi lokal, pendidikan dan kesadaran, dan pengawasan dan pelaporan. masyarakat dapat berperan dalam menjaga

kelestarian lingkungan Danau Toba dengan melakukan praktik-praktik berkelanjutan, seperti pengurangan sampah, pengelolaan limbah yang baik, dan penggunaan energi terbarukan. Masyarakat juga dapat terlibat dalam upaya pemulihan ekosistem dan menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di sekitar Danau Toba. Masyarakat memiliki peran penting dalam pelestarian budaya lokal di sekitar Danau Toba. Masyarakat dapat mempertahankan tradisi, kesenian, dan praktik budaya masyarakat sendiri, serta mempromosikan kekayaan budaya tersebut kepada wisatawan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian warisan budaya dan arsitektur, seperti rumah adat Batak. Masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata Danau Toba. Masyarakat dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memastikan kepentingan masyarakat diakomodasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata masyarakat [5-9]. Masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan dan mempromosikan produk dan jasa ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata. Masyarakat dapat mendirikan usaha mikro dan kecil, seperti homestay, restoran, toko souvenir, atau pandu wisata lokal. Dengan demikian, pendapatan dari sektor pariwisata akan mengalir ke masyarakat setempat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pariwisata berkelanjutan di kalangan lokal. Masyarakat dapat menyebarkan informasi tentang praktik berkelanjutan kepada sesama warga, pelaku pariwisata, dan wisatawan. Pendidikan tentang pentingnya lingkungan dan budaya serta cara menjaga kelestariannya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menginspirasi tindakan yang bertanggung jawab. Masyarakat setempat dapat menjadi "mata dan telinga" dalam memantau aktivitas wisata dan melaporkan potensi masalah atau pelanggaran yang terjadi. Masyarakat dapat membentuk kelompok pengawas atau sukarelawan untuk memastikan keberlanjutan pariwisata dan melindungi kepentingan masyarakat setempat.

Dengan berperan aktif dalam pengelolaan wisata Danau Toba, masyarakat dapat memastikan keberlanjutan dan kelestarian destinasi wisata tersebut. Penting bagi masyarakat untuk memiliki akses yang adil terhadap manfaat ekonomi, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan budaya masyarakat.

b. Peningkatkan peran masyarakat dalam dalam mendukung sustainable tourism

Peran masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan sangat penting. Masyarakat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan. Masyarakat dapat mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak positif dan negatif pariwisata terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat setempat. Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mengubah perilaku

wisatawan dan mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Masyarakat setempat berperan sebagai mitra dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata, termasuk dalam perencanaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan pariwisata.

Partisipasi masyarakat memastikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat diakomodasi. Masyarakat dapat berperan dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui usaha mikro dan kecil yang terkait dengan pariwisata, seperti homestay, warung makan, atau kerajinan tangan. Dengan mendorong konsumsi produk lokal dan mempromosikan peluang ekonomi lokal, masyarakat dapat mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih merata dari pariwisata.

Masyarakat berperan dalam pelestarian dan promosi budaya lokal serta identitas destinasi. Masyarakat dapat mempertahankan tradisi, bahasa, kesenian, dan praktik budaya masyarakat sendiri, sambil membagikannya dengan wisatawan secara bertanggung jawab. Melalui pelestarian budaya, masyarakat juga dapat memperkuat identitas masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas budaya. Masyarakat berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alam di destinasi pariwisata. Masyarakat dapat membantu dalam pemantauan dan pemeliharaan ekosistem, pelestarian flora dan fauna, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Masyarakat juga dapat mempromosikan praktik pariwisata yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam memantau pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dan melaporkan aktivitas yang tidak sesuai atau merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan menjadi bagian dari pengawasan, masyarakat dapat membantu menjaga kualitas dan integritas pariwisata berkelanjutan di destinasi masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu [4] menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam ekowisata dan pengembangan pariwisata. Responden yang diwawancarai mengungkapkan bahwa langkah ini dapat membantu menyelaraskan pariwisata dengan karakteristik unik daerah, meningkatkan pengelolaan, menciptakan produk wisata baru, dan menjadikan ekowisata menarik bagi khalayak yang lebih luas sambil tetap melestarikan elemen budaya dan lingkungan yang berharga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran yang kuat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terutama di kawasan ekowisata. Pengembangan pariwisata perlu melibatkan potensi dan karakteristik unik daerah, termasuk pengaruh kearifan lokal dalam proses menuju pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam konteks pengembangan pariwisata, khususnya dalam ekowisata. Dengan menggabungkan pengetahuan dan praktik tradisional dari kearifan lokal, pariwisata dapat menjadi lebih berkelanjutan, memperkaya budaya, dan menarik bagi wisatawan. Integrasi kearifan lokal menjadi kunci untuk menciptakan tujuan wisata yang lebih beragam dan berdaya Tarik [4].

Selain itu, hal ini juga dapat membantu menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan budaya yang khas dari suatu daerah. Dalam praktiknya, pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat akan membantu dalam menggali potensi kearifan lokal yang lebih dalam. Dengan demikian, pariwisata akan berdampak positif bagi masyarakat setempat, membantu mengangkat kesejahteraan ekonomi mereka, dan memperkuat identitas budaya serta tradisi yang unik.

Penting bagi masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan [2,3]. Dengan kesadaran, partisipasi, dan tindakan nyata, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Peningkatkan pendapatan masyarakat melalui sustainable tourim

Penerapan sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) di Danau Toba dapat berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat setempat. Penerapan *sustainable tourism* dapat meningkatkan pendapatan masyaraka, melaluit: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, Peningkatan Kunjungan Wisatawan, Pemeliharaan Budaya Lokal, Peningkatan Permintaan Produk Lokal, dan Pendidikan dan Pelatihan. Dengan adanya fokus pada pengembangan ekonomi lokal, sustainable tourism mendorong pendirian dan pengembangan usaha mikro dan kecil di sekitar Danau Toba. Contohnya, masyarakat dapat membuka homestay, warung makan, toko souvenir, atau usaha jasa pandu wisata. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti pelestarian alam dan budaya, masyarakat dapat memperkuat daya tarik destinasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari wisatawan yang menghabiskan uang masyarakat di destinasi tersebut.

Sustainable tourism juga mendorong pelestarian dan promosi budaya lokal. Masyarakat dapat mempertahankan tradisi, kesenian, dan praktik budaya masyarakat sendiri, yang dapat menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman budaya autentik. Dalam prosesnya, masyarakat dapat memberikan produk dan layanan yang berhubungan dengan budaya, seperti pertunjukan seni, kerajinan tangan, atau makanan tradisional. Ini menciptakan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dalam pariwisata berkelanjutan, terdapat kecenderungan untuk mendorong konsumsi produk lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wisatawan yang sadar akan dampaknya cenderung mencari produk lokal, seperti makanan, kerajinan, atau tekstil, yang dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari penjualan produk

masyarakat. Penerapan sustainable tourism sering melibatkan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat.

Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam industri pariwisata, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor pariwisata yang berkelanjutan, seperti menjadi pemandu wisata, petugas kebersihan, atau pengelola homestay. Hal ini dapat memberikan peluang pendapatan yang lebih baik dan pembangunan karir dalam industri pariwisata. Penerapan sustainable tourism tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan mengembangkan usaha lokal, meningkatkan kunjungan wisatawan, memelihara budaya, dan meningkatkan permintaan produk lokal, sustainable tourism dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.

d. Mewujudkan sustainable torism di Danau Toba

Untuk mewujudkan sustainable torism di Danau Toba, beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti, seperti: pengaktifan forum komunitas, forum komunitas yang melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, pelaku pariwisata, dan organisasi non-pemerintah seperti Forum DAS. Forum ini akan menjadi platform untuk diskusi, pengambilan keputusan, dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan program pendidikan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan. Pelatihan meliputi peningkatan keterampilan, pengenalan praktik berkelanjutan, dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya.

Mengembangkan program pengelolaan limbah dan polusi yang melibatkan masyarakat setempat juga diperlukan, seperti: peningkatan infrastruktur pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan kampanye kesadaran untuk mengurangi polusi lingkungan di sekitar Danau Toba. Meluncurkan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung usaha mikro dan kecil yang terkait dengan pariwisata, seperti kerajinan tangan, kuliner lokal, dan jasa pandu wisata sangat dibutuhkan. Program ini akan memberikan pelatihan, akses ke modal, dan bantuan pemasaran kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha masyarakat. Membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari perwakilan masyarakat setempat, pelaku pariwisata, dan pemerintah juga sangat penting. Tim ini akan melakukan pemantauan rutin terhadap implementasi praktik berkelanjutan, dampak pariwisata, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Mengembangkan kampanye promosi pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat juga penting [6,7]. Kampanye ini akan mengedukasi wisatawan tentang praktik berkelanjutan yang masyarakat dapat dukung selama kunjungan masyarakat ke Danau Toba, seperti penggunaan

air yang bijaksana, menghormati budaya lokal, dan membeli produk lokal. Konservasi Ekosistem: Melakukan upaya konservasi ekosistem Danau Toba melalui penghijauan, restorasi ekosistem, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Masyarakat setempat dapat terlibat dalam kegiatan ini, termasuk penanaman pohon (Gambar 3), pemantauan kelestarian spesies, dan perlindungan terhadap habitat alami.

(Dokumentasi: Rahmawaty, 2022)
Gambar 3. Penanaman pohon di sekitar Danau Toba

Rencana tindak lanjut ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan terkait, serta alokasi sumber daya dan waktu yang cukup. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan pariwisata di Danau Toba dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, dan melindungi keindahan alam dan budaya lokal.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Toba. Melalui partisipasi aktif, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, pelestarian budaya lokal, promosi ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan upaya kolaboratif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, dampak negatif terhadap lingkungan, budaya, dan ekonomi dapat diminimalkan, sementara manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan.

Integrasi kearifan lokal dalam ekowisata dan pengembangan pariwisata di Danau Toba memiliki manfaat signifikan, baik untuk keberlanjutan lingkungan maupun untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan menghargai dan menggali kearifan lokal, maka dapat menciptakan tujuan wisata yang berkelanjutan di Danau Toba, yang kaya akan budaya, dan menarik bagi para pengunjung.

Saran

Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan di Danau Toba, maka penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat, dalam peningkatan kesadaran dan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, pelestarian budaya lokal, promosi ekonomi lokal yang berkelanjutan, kolaborasi antar pihak, penelitian keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Danau Toba. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan, budaya, dan ekonomi, sambil meningkatkan manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian penulis yang memperoleh Hibah Penelitian Talenta USU Tahun 2022 dengan Skema Penelitian Pusat Kajian Guru Besar dengan nomor kontrak: 379/UN5.2.3.1/PPM/KP-TALENTA/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Terima kasih kepada USU yang telah memberikan bantuan dana dalam penelitian tersebut. Ucapan terima kasih juga kepada Dewan Guru Besar USU yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini.

Daftar Pustaka

[1] Assaye, G., Wolyie, J., & Endaweke, Y. (2023). Heliyon The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its implication for sustainable development in Amhara regional state. *Heliyon*, *9*(6), e17088. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17088

[2] Asmat-campos, D., & Ch, P. (2021). Heliyon Sustainable tourism policies in Peru and their link with renewable energy: analysis in the main museums of the Moche route, *7* (July). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08188

[3] Yuedi, H., Sanagustín-fons, V., Galiano, A., & Mose, J. A. (2023). Heliyon Analysis of tourism sustainability synthetic indicators. A case study of Aragon, *9*. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15206

[4] Rahmawaty, Rauf, A., Dalimunthe, R.F., Sibarani, R., Harahap, R. H., Affandi, O., Zahrah, M. (2020). Lembaga 2023. Strategi Pengembangan Hasil Hutan dan Wisata Alam Berbasis Partisipatif, Konservatif dan Kearifan Lokal di KPH Wilayah 4 Balige. Laporan Akhir Penelitian Pusat Kajian Guru Besar. Penelitian USU. Medan

[5] Tufa, A., Lemma, B., Yeshitela, K., & Endrias, M. (2022). Heliyon Community perceptions towards the impacts of ecotourism development in the central highlands of Ethiopia: the case of Lake Wanchi and its

adjacent landscapes. *Heliyon*, *8*(February), e08924. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08924

[6] Ramadhani, D., Rahmawaty., & Barus, T. A. (2022). Assessment of Objects and Attractions of Krueng Geunie, *06*(03), 354–358.

[7] Ramadhani, D., Rahmawaty., & Barus, T. A. (2022). Natural Ecotourism Development in The Krueng Geunie Lhok Keutapang Area, Pidie Regency, *06*(02), 203–205.

[8] Saraan, M., Rahmawaty, & Harahap, R. H. (2020). Analysis of community participation at Community Forestry Group (HKm) in Forest Management Unit (KPH) Region XIV Sidikalang, North Sumatera Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *454*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/454/1/012089

[9] Rahmawaty, Villanueva T R, Carandang M G. (2011) Participatory Land Use Allocation (Case Study in Besitang Watershed, Langkat, North Sumatera, Indonesia) (Germany: Lambert Academic Publishing) 199 pp.

Biodata Penulis

Rahmawaty, Guru Besar Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL), Universitas Sumatera Utara (USU). Lahir di Ujung Pandang, 21 Juli 1974. Pada tahun 1997, menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Program Magister di Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB (1998-2000), Program Doktor dari University of the Philippines at Los Banos (UPLB), Philippines (2006-2009). Saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, USU. Penulis aktif sebagai narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, serta menulis beberapa buku.

Beberapa Penghargaan dan Tanda Jasa yang pernah diperoleh, diantaranya: *High Scholastic Achievement for Academic Year* 2008-2009 oleh *Graduate School – UPLB Los Banos, Philippines, The Honor Society of Agriculture* oleh *Gamma Sigma Delta (UPLB Chapter) at Los Banos*, 2009 *Philippines*, Dosen Berprestasi I Tingkat Universitas Sumatera Utara 2012, Penghargaan *Life Style Achievement* 2013 oleh UKWI-USU, Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X 2013 Presiden RI, Akademisi Terbaik I Tingkat USU kategori publikasi terbanyak 1 Tingkat USU 2020, Akademisi Terbaik I Tingkat USU kategori peneliti terbaik 1 Tingkat USU 2021, dan Penghargaan Pelopor Insinyur Indonesia 2021. Pada Tahun 2022 terpilih sebagai salah satu peserta penerima Program *World Class Professor* (WCP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan RI. Saat ini memiliki Scopus H-index : 10; Wos H-index : 5; Google Scholar H-index : 18; SINTA Score Overall : 1937.

DISAIN PENGEMBANGAN POTENSI USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGWUJUDKAN DAERAH WISATA FOODS HALAL DI DESA PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Ramli
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Latar Belakang

Secara massif daerah wisata koliner pesisir di Sumatera Utara belum memiliki daerah wisata foods halal. Padahal daerah wisata pesisir mempunyai potensi yang kuat untuk di jadikan daerah wisata food halal. Desa Percut Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli serdang yang berjarak lebih kurang 20 KM dari titik nol Kota Medan memiliki kekayaan sumber daya alam yang belum dibuat utility secara ekonomis.Sesuatu yang potensi dapat berguna, apabila mengalami proses perubahan ada 4 bentuk utility :1)Bentuk (utility form) Utility ekonomis ini bisa dibuat dalam perubahan bentuk dari fisik natural, contoh ikan Nila dirubah jadi fillet ikan atau jadi abon ikan.2)Tempat (utility place) yaitu perubahan tempat fisik dari sesuatu loaksi ketempat lain yang membutuhkan contoh ikan di laut diambil dipindahkan ketempat daerah yang membutuhkan 3) Waktu (utility time) Utility times yaitu Perubahan penggunaan di waktu akan datang, contoh ikan /udang yang ditawarkan pada waktu perayaan hari raya/pesta 4)Pemilikan (utility owner) yaitu adanya perubahan status pemilikan yang dapat dimanfaat pemilik baru. Perubahan utility secara prinsip ekonomis diperlukan suatu proses kegiatan value addad oleh pemangku kepentingan.

Kekayaan sumberdaya alam pesisir desa Percut secara massif belum di manfatkan secara ekonomis oleh masyarakat setempat, mungkin disebakan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan informasi, keterbatasan modal. Sehingga potensi kekayaan sumberaya alam belum menjadi basis usaha kecil menengah keluarga, Usaha kecil menengah keluarga yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam perlu driven dari Universitas Sumatera Utara melalui fakultas terkait .Universitas gudang berbagai ilmu khusus prinsip ekonomis sangat terbatas dalam membuat skanario bagaimana suatu desa pesisir pantai menjadi fundamental ekonomi yang berbasis dengan kekayaan sumberdaya alam pesisir pantai.

Terbentuk berbagai usaha kecil menengah yang memfaatkan kekayaan potensi daerah yang berbasis halal pada desa destinasi wisata precut, dapat mengwujudkan Kawasan daerah foods halal di desa Percut . Nantinya sebagai icon desa Percut yang perlu direalisasikan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang berbasis pada usaha kecil menengah yang halal. Dampak multipler yang di muncul dengan adanya

daerah destinasi wisata koliner precut dengan icon food halal memberikan linkage kegiatan ekonomi ke depan (forword linkage) dan lingkage kegiatan ekonomi kebelakang (backword linkage)

Mensiasati usaha menhwujudkan usaha kecil menengah yang berbasis hilirisai sumber kekayaan sumberdaya alam, dengan terwujudnya berbagai usaha kecil dan menengah dapat sebagai emberio food halal di desa Percut . Untuk merealisasi fundamental ekonomi daerah Percut dibuat suatu perencanaan Proyek yang dikemas dengan judul : DISAIN PENGEMBANGAN POTENSI USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGWUJUDKAN DAERAH WISATA FOODS HALAL DI DESA PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

2. Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1) Belum ada perencanaan pengembangan usaha kecil menengah berbasis kekayaan sumberdaya alam dalam mengwujudkan foods halal 2) Secara masif masyarakat desa belum memanfaatkan potensi kekayaan sumberdaya alam pesisir secara ekonomis usaha kecil menegah. Tujuan kegiatan perencanaan ini adalah 1. Mendisain perencanaan pengembangan usaha kecil menengah berbasis kekayaan sumberdaya alam dalam mengwujudkan foods halal. 2) Secara massif ada acuan pemangku kepentingan dan masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi kekayaan sumberdaya alam pesisir secara ekonomis melalui usaha kecil menegah yang dapat diproses secara industry rumah tangga. Manfaat dari kegiatan ini adalah : 1) Dapat mengwujudkan usaha kecil menengah masyarakat desa yang berbasis kekayaan sumberdaya alam di daerah destinasi wisata 2) Membentuk komonitas atau kelompok – kelompok usaha kecil menengah yang berbasis kepada kekayaan sumberdaya alam 3) Membentuk kawasan sentra produksi usaha kecil menengah yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam 4) Mengoptimalkan Kekayaan Sumberdaya pesisir dalam memperkuat struktur ekonomi daerah 5) Dapat mengwujudkan icon destinasi wisata foods halal pada desa precut.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Masyarakat di pesisir pantai umumnya bekerja sebagai nelayan yang tergantung dengan hasil tangkapan, dan hasil tangkapan nelayan sangat tergantung pada musim , cuaca dan teknologi yang diterapkan. Kalau kuantitas hasil tangkapan yang banyak, maka tentu penerimaan sebagai disposible income juga banyak, sedangkan kuantitas hasil tangkapan sedikit maka disposable income sedikit dan tidak dapat memenuhi pengeluaran konsumsi kebutuhan rumah tangganya. Kondisi seperti ini yang mereka alami yang terus menerus yang akhir masuklah mereka dalam perangkap kemiskinan tak berujung pangkal (visious cycle of poverty). Kemiskinan tak

berunjung pangkal tidak sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan meningkat pendapatn per kapita dan mengetas kemiskinan

Keterbatasan masyakat pesisir berusaha bisnis yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam pesisir, secara umum : 1) Modal Terbatas 2) akses ke bank terbatas,3) aplikasi teknologi terbatas 4) pengetahuan statik 5) terkunkung pada market local orientet. Kondisi ini yang membuat masyarakat terbelenggu untuk kreaktif dalam usaha kecil menengah, Sehingga alternative income bagi masyarakat pesisir tidak tergali dari potensi kekayaan sumberdaya alam pesisir dan berdampak pada struktur fondasi ekonomi daerah pesisir tidak dinamik dengan kekayaan sumberdaya yang dimiliki.

Kepastian sumber penerimaan nelayaan dari hasil tangkapan yang tidak pasti memberi kontribusi terhadap jumlah kemiskinan yang menjadi beban proses pembangunan. Kaya dengan sumberyadaya alam pesisir pantai tidak sejalan dengan struktur ekonomi daerah pesisir yang lemah. Kondisi dapat dimaknai belum optimal memanfaatkan kekayaan sumberdaya untuk memperkuat sumber pendapatan masyarakat pesisir dan memperkuat struktur ekonomi daerah pesisir. Menurut Zuhal (2010) Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak dapat diandalkan dengan kekayaan sumberdaya alam, akan tetapi di era globalisasi adalah knowledge menjadi keuatan utama penggerak kekayaan sumberdaya alam. Perguruan tinggi sebagai gudang Knowledge belum membuata dukumen membangun desa pesisir yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam pesisir. Untuk memanfaat kekayaan sumberdaya alam pesisir perlu disain exit kebijakan usaha kecil menengah yang berbasis dengan kekayaan sumberdaya alam pesisir. Upaya strategis pembangunan khusus di daerah pesisir perlu didisain yang berbasis pada usaha kecil menegah yang memanfaatkan secara optimal dan keberlanjutan sumber kekayaan alam pesisir pantai. Driven strategis pembangunan seperti ini dalam operasional perlu keterlibatan akademisi, pengusaha dan pemerintah. Dimasing masing peran belum terkordinasi, intergrasi, sinkronisasi sehingga belum menimbulkan sinergitas dalam mendorong usaha sektor rial yang berbasis kekayaan sumberdaya alam pesisir pada usaha kecil menengah masyarakat pesisir. Pemerintah belum terbuka sistem anggaran yang multi sub sektor dalam mendukung usaha kecil menengah yang bersifat kontineunitas. Perguruan tinggi USU melalui fakultas dalam menyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, umumnya mengarah pada kegiatan jangka pendek yang hanya sub sektor tertentu. Mendisain strategi pengembang pemanfaat sumber kekayaan alam pesisir yang optimal yang memberi kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah pesisir , diharapkan Bank Sumut dapat mengalokasikan mentalangi biaya opersional kegiatan melalui dana Corporate Social Responsibility (CRS). Perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa, Dosen dan alumi (IKAFEBSU dan ISEI cabang Medan) dapat partisipasi ikut menyelenggarakan proses pelaksanaan pembangunan usaha kecil menengah di desa Percut. Perusahan tentunya ikut serta sebagai bapak angkat yang memberikan informasi tentang pasar dan aplikasi teknologi dalam proses produksi.

Untuk memberikan gambaran tindakan disain exit kebijakan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam pesisir pada pengembangan usaha kecil menengah di daerah pesisir precut, dapat dilihat pada bagan berikut ini

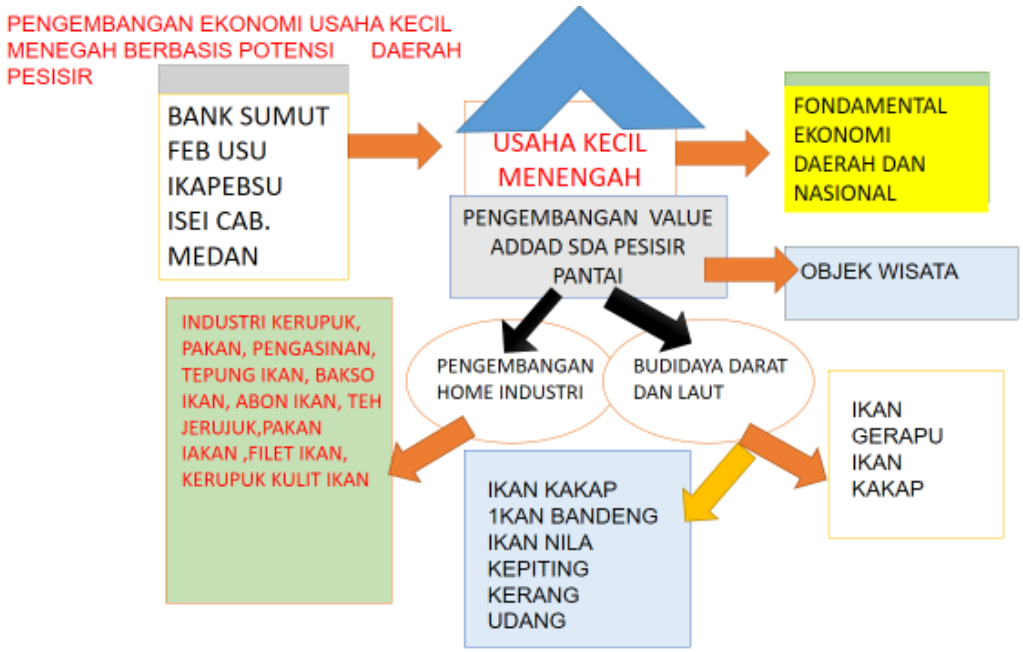

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pengembangan berbagai ekonomi usaha kecil menengah berbasis kekayaan pada sumber kekayaan alam pesisir melalui Langkah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk menyiapkan usaha kecil menengah , dengan strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sasaran daerah Pengembangan Usaha kecil Menengah
   Studi awal telah dilakukan di daerah desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, memberi peluang untuk dijadikan lokasi pengembangan ekonomi berbasis kekayaan sumber daya alam. Pertimbangan ini di dasarkan pada : 1. letaknya di pesisir pantai yang tumbuh dengan keragaman hayati dan dialiri muara sungai Percut. 2.Tempat wisata Koliner 3. Belum di kelola secara optimal Kekayaan Sumber daya Alam 4. Belum optimal pemanfaatan lahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sasaran daerah adalah Dusun XVI, Dusun XVII dan Dusun XVIII.
2. Kemitraan
   Pelaksaan kegiatan mulai mendisain sampai pelaksanaan kegiatan ,evaluasi dan laporan dilakukan dengan KISS (Koordinasi, Intergrasi,Sinkronisasi dan sinergitas) dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dan bekerjasama dengan pemerintah setempat melalui FGD

3. Menetapkan pendamping dari Perguan tinggi, Iatan Alumni Fakultas Ekonomi USU, ISEI cabang Medan , instansi terkaitdan aparat di pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian bidangnya dan memberikan teranpormasi pengetahuan dan etika berbisnis pemahaman aspek bisnis dan aplikasi degitalisa
4. Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan usaha kecil menengah yang berkoordinasikan dengan instasi yang terkait dengan Melakukan konsultasi dengan pemangku Kepentingan dan mitra kerja melalui FGD
5. Melaksanakan Trainer Of Trainer (TOT) untuk pendamping
6. Pembentukan Kelompok usaha kecil menengah mayarakat pesisir sesuai sub sektor pengembangan usaha ekonomi kecil menengah
7. Pembinaan kelompok oleh pendamping dan instansi terkait.
8. Melaksanakan program aksi kelompok usaha kecil memenengah
9. Memonitori dan evaluasi kegiatan usaha yang dilakukan.
10. Pemberdayaan ini dilakukan intergrasi kekuatan Bank sebagai penyandang dana CRS, Fakultas ekonomi USU, sebagai koordinasi, IKAFEBSU dan ISEI Cabang Medan sebagai Tenaga Pendamping
11. Penyerahan Laporan kegiatan

5. Rencana Tindak Lanjut

Disain exit kebijakan usaha kecil dengan paradigma yang berbasis pada kekayaan sumberdaya pesisr akan memunculkan effek multiplayer baik linkage kedepan berbagai kegiatan ekonomi maupun lingkage kebelakang kegiatan ekonomi. Perlu action Plan agar Penerima manfaat pada kegiatan pengembangan usaha kecil menengah yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam pesisir : pertama adalah masyarakat khususnya keluarga nelayan terlibat langsung pada sub sektor kegiatan tertentu. Kedua pada nelayan yang mempunyai luang waktu ketika tidak melaut dapat berpartisipasi pada sub sector kegiatan usaha kecil menengah dan menjadi peluang pasar dari hasil tangkapan.Ketiga, Bagi perusahaan yang terlibat dengan usaha kecil dan menengah menerima atau mensupplay bahan tertentu ke pasar tertentu. Keempat. Bagi pemerintah daerah akan menerima manfaat upaya pembangunan usaha kecil menengah yang berbasis pada pemanfaatan kekayaan sumberdaya pesisir pada kekuatan struktur ekonomi daerah pesisir dalam memperkuat ekonomi nasional. Kelima, pemerintah daerah percut dapat menjadi icon foods halal dalam mengembangkan destinasi wisata koliner di daerah Percut kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Upaya tindak lanjut dalam mendorong peluang kegiatan usaha kecil menengah sesuai dengan disain pengembangan usaha kescil menengah dapat diusulkan berbabagai kegiatan usaha, secara umumnya meliputi (Ramli: 2022) :

1. Pengembangan home Industri

Kekayaam sumber daya pesisir di desa Percut belum diberdayakan menjadi komoditi andalan yang dapat diolah oleh home industri. Seperti :

1) Kerupuk Udang Lipan
2) MinumanTeh Jeruju
3) Filet Ikan
4) Tepung Ikan
5) Abon Ikan
6) Bakso Ikan
7) Perlemkapan Pernik pernik dan hiasan
8) Cemilan dan minuman Bakau
9) Herbal tanaman bakau
10) Pembuatan Breket
11) Pembuatan ikan asin

2. Budidaya Perikanan Darat

Potensi pengembangan budi daya ikan sangat menjanjikan, karena pada lahan yang ada belum optimal di intensifikasi sebagai sarana factor produksi. Usaha budidaya yang dapat dikembangkan di Bagan Percut.

1) Budi Daya Ikan Nila
2) Budi Daya Udang Vaname dan Tiger
3) Budi Daya Kepiting Bakau
4) Budi Daya Kerang Batu
5) Budi Daya Ikan Sakap
6) Budi Daya Kemudi Kapal
7) Benih Ikan Nila
8) Pakan Ikan

3. Budi Daya Ikan di laut

Laut di sekitar daerah pesisir Bagan Percut belum belum menjadi pertimbangan penggelolaan budi daya ikan dalam rangka meningkat pendapatan masyarakat dan memenuhi permintaan pasar di Bagan Percut. Sebagian Nelayan sudah membuat perangkat tangkat ikan Sembilang dan kepiting Ranjungan. Extensifika budi daya perikanan yang dapat dilakukan di daerah perairan bagan Percut adalah :

1). Budi Daya Ikan Kakap
2). Budi daya Ikan Gerafu
3). Budi Daya Udang
4). Budi Daya Kemudi Kapal

4. Extensifikasi Penangkapan

Banyak nelayan di bagan Percut belum melakukan extensifakai penangkapan .yang umumnya dilakukan penangkapan hasil laut dengan pukat layang, Pukat Gembung, Pukat Senangin, pancing di tuasan dengan teknologi konvensional. Extensifikasi dapat dilakukan dengan jarak penangkapan semakin jauh ke daerah ZEE yang didukung oleh : teknologi penangkapan,alat tangkap dan armada yang sesuai dengan keamanan.

Exit Strategi Aksi

5. Pengembangan Destinasi Wisata

Desa pesisir Percut memiliki potensi pengembanga destinasi wisata yang belum menyempurnaan dan perluasan daya tarik berwisata di desa pesisir Percut untuk menambah kepuasan dan kenyamanan wisatawan dari berbagai

proses dengan inovasi teknologi. Sasaran besarnya rencana aksi ini adalah mengwujudkan Visi dan Misi Sumatera Utara yang dibingkai dengan membangun Desa berorientasi ke kota. Untuk melaksanakan pengembangan destinasi wisata desa precut akan memberikan effek dampak positif terhadap usaha kegiatan ekonomi . Menurut Ramli (2011) Pengembangan destinasi wisata akan berdapak kepada Value Addad ekonomi baik untuk ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat. Pengembangan destinasi wisata memberi efek kaitan usaha ekonomi baik linkage kedepan maupun kebelakang dan sektor kegiatan ekonomi tersebut dapat diklasfikasi ;1) Keberangkatan 2) Ketibaan dan 3) Kepulangan.

Gambar: Industri Kreatif – Destinasi Wisata Bahari

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

1. Gagasan besar ini merupakan berkontribusi nyata dalam trobosan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis kepada pemanfaatan secara optimal kekayaan seumber daya pesisir. Upaya realisasi pengembangan potensi usaha kecil menengah dalam mewujudkan daerah wisata foods halal di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. akan terealisasi dengan adanya driven tali temali kekuatan Bank atau perusahaan sebagai penyandang Dana CRS , Fakultas Ekonomi USU (FEB USU) sebagai koordinasi, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi USU (IKAFEBSU), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Medan (ISEI Cabang MEDAN) sebagai Tenaga

pendamping pelksanaaan operasional pengembangan usaha kecil menengah di pesisir precut.
2. Siasat pengembangan knowledge masyarakat pesisir pantai untuk pemanfatan kekayaan sumberdaya alam pesisir menjadi osaha ekonomi kecil menengah melalaui pemberdayaan prinsip- prinsip bisnis yang dipratekan langsung

Saran

1. Gagasan kegiatan ini merupakan pengembangan usaha ekonomi kecil menegah yang berbasis kekayaan sumberdaya alam pesisir adanya transfer knowledge dan inovasi, disarankan adanya bidang ahli berpatipasi tindakan aksi kerja sama yang berasal dari Perguruan Tinggi, Pemerintah, Bisnis
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi kecil menengah tidak akan terialisasi tanpa ada pecandang biaya operasional, disarankan kesedian pemerintah atau bank Sumut, dan bank lainnya atau perusahaan melalui dana CSR yang dialokasi ke program pengembangan usaha ekonomi kecil menengah berbasis sumberdaya alam pesisir

Daftar Pustaka

1. Ramli, (2022). Gagasan Isei Berkontribusi Nyata Dalam Trobosan Pengenbangan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Kepada Kekayaan Sumber Daya Pesisir
2. Ramli.(2022). Ekskusi Bisnis Baru Dalam Tren Peningkatan Umkm Sebagai Solusi Dari Pandemi Berkepanjangan, Disajikan Pada Acara Seminar Nasional Everest 6, Minggu 15 Mei 2022 di Aula FEB USU
3. Ramli, (2011). Perencanaan Membangun Desa Lokalitas Pesisir Pantai Dalam Upaya Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Wilayah Dan Pendapatan Nelayan .Sekretaris Program Doktor Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
4. Zuhal (2010) " Knowledge and Inovation Platform Kekuatan Daya Saying " Penerbit PT. Granmedia Pustaka Utama Jakarta

Biodata Penulis

Prof. Dr. Ramli, SE. MS., adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jenjang pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dengan program ekonomi Pembangunan. S2 KPK USU – IPB Program studi PWD. S3 di UNAIR dengan program Studi Ilmu Ekonomi. Karir pernah berjabat Dekan FEB USU, Sekretaris Program S3 Perencanaan Wilayah USU, Sekretaris S2 /S3 ilmu Ekonomi USU. Jabatan di pemerintahan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatara Utara. Dewan Agropolitan/Agromerinepolitan Provinsi Sumatera Utara dan Staf Ahli di Lingkungan hidup Sumatera Utara Sebagai peneliti dan penulis selalu memfokus mengamati keberadaan kekayaan sumberdaya alam pesisir pantai berkaitan dengan social ekonomi dan kebijakan publik maupun local.wisdom serta destinasi wisata.

SUSTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Sarma Nursani L. Raja
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian khususnya di daerah tujuan wisata. Pembangunan kepariwisataan yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan dan budaya local tempat pariwisata memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya dan konservasi sumber daya alam yang pada akhirnya merupakan dua unsur utama dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan pandangan tersebut, pengembangan pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Akbar et al., 2021;Luo & Bao, 2019). Motif ekonomi untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah menjadikan pariwisata sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Akbar et al., 2021;Jamal & Budke, 2020). Begitu pula di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus berkembang, ditandai dengan pertumbuhan positif perjalanan wisatawan mancanegara dan domestik (Akbar et al., 2021;Nurhasanah, Alvi, & Persada, 2017).

Pertumbuhan pariwisata di seluruh dunia telah menciptakan banyak masalah lingkungan yang perlu ditangani untuk mencapai keberlanjutan pembangunan pariwisata dan negara dalam jangka panjang. Sustainable tourism development merupakan elemen baru dalam konsep pembangunan pariwisata dengan tujuan mengurangi dampak negatif pariwisata dan meningkatkan keuntungan positifnya bagi industri guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara, kondisi kehidupan penduduk setempat, dan mengungguli struktur pembangunan lainnya dengan menjaga sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di tempat wisata tersebut (Irawan and Nara, 2020;Muhanna, 2006). Pariwisata saja mungkin tidak membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, sehingga diperlukan rencana sustainable tourism development sebagai kontributor untuk mengurangi kemiskinan (Harrison & Schipani, 2007;Irawan& Nara, 2020). Selain itu, pariwisata berkelanjutan memainkan peran penting sebagai pemeran utama yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal dan bisnis lain yang terkait dengan pariwisata. Banyak bukti telah menunjukkan bahwa tujuan wisata yang mengurangi dampak lingkungan telah menghasilkan lebih banyak keuntungan, menjadi lebih kompetitif, meningkatkan nilai, dan menjadi lebih berkelanjutan (Hardy & Beeton, 2001; Irawan& Nara, 2020).

Saat ini sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang diminati dan memberikan prospek yang menjanjikan dari segi ekonomi. Setiap daerah seakan berlomba-lomba dalam mengelola pariwisatanya. Setiap daerah berusaha menggali segala potensinya yang dapat “dijual” dan menjadi kawasan bisnis yang menjanjikan (Rahmawati et al.,2021). Sektor pariwisata juga membuka lapangan kerja, membuka peluang produk lokal masuk ke tingkat internasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Farhan & Wardani, 2022)

Pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih baik dari peluang pengembangan pariwisata dan memanfaatkan peluang tersebut secara efektif. Pariwisata berkelanjutan tidak dapat dicapai sampai anggota masyarakat secara aktif mendukung pengembangan pariwisata. Pemerintah dan pasar membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menerapkan strategi sustainable tourism development. (Khalid et al., 2019)

Kemiskinan adalah masalah sosial yang menuntut pendekatan multifaset untuk pengurangannya termasuk upaya bersama di tingkat global, nasional, regional dan komunitas untuk mengatasi momok yang tidak manusiawi ini. Merupakan tantangan bagi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat internasional untuk terlibat dalam langkah-langkah yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. (Sutawa, 2012)

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, mengembangkan budaya, meningkatkan citra bangsa, dan mempererat hubungan dengan negara lain. (Sutawa, 2012)

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Tujuan Community Based Tourism adalah untuk memverifikasi apakah individu, organisasi dan komunitas telah membangun kemampuan mereka untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata di daerah mereka di mana komunitas mereka berada. Pengembangan pariwisata tidak akan berhasil tanpa tokoh masyarakat dan semua masyarakat terlibat. (Sutawa, 2012)

2. Masalah

Pada SDGs terdapat 17 tujuan yaitu, menghapus kemiskinan; mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan; pendidikan bermutu; kesetaraan gender; akses air bersih dan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; infrastruktur, industri dan inovasi; mengurangi ketimpangan; kota dan komunitas yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; menjaga ekosistem laut; menjaga ekositem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat; dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan.(UN, 2015;).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan yang dikeluarkan untuk

menyempurnakan agenda pembangunan sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Sekitar 70 persen indikator yang mengukur target MGDs telah dicapai oleh Indonesia, namun beberapa permasalahan di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus, diantaranya tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi dan ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa permasalahan lingkungan. Kemiskinan menjadi indikator nomor satu dalam SGDs, karena kemiskinan bisa menjadi gerbang awal timbulnya masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan masih dipandang sebagai masalah yang serius khususnya bagi negara berkembang. .(UN, 2015;).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian khususnya di daerah tujuan wisata. Pembangunan kepariwisataan yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan dan budaya local tempat pariwisata memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya dan konservasi sumber daya alam yang pada akhirnya merupakan dua unsur utama dalam pembangunan kepariwisataan. Berdasarkan pandangan tersebut, pengembangan pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Akbar et al., 2021;Luo & Bao, 2019). Terlepas dari pentingnya sektor pariwisata dan bagaimana hal itu berkembang sebagai aliran pendapatan bagi pemerintah daerah, ada masalah kesadaran dalam konteks kesiapan pemasaran. Sejauh ini, daerah telah berhasil memanen potensi wisatanya berupa peningkatan kunjungan dan penerimaan.Kecenderungan sebagian besar daerah dalam menggali dan mengeksploitasi potensi wisata melalui strategi branding dan promosi sudah sangat terlihat sebagai kebutuhan dasar. Kesiapan bagaimana destinasi pariwisata harus berpromosi masih kurang tergali. (Wilopa et al., 2020) Selain itu masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi sektor pariwisata di Indonesia: peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi. (Nugroho, 2020)

Dengan sumber daya alam dan budaya yang melimpah serta potensi pasar domestik dan internasional yang besar, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dalam pemanfaatan aset-aset tersebut secara berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan dan administrasi pariwisata masih kurang terintegrasi di antara banyak kementerian dan unit pemerintah yang berbeda. Perekonomian informal Indonesia yang cukup besar, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pariwisata dan perhotelan mengancam tujuan pembangunan nasional dan melemahkan daya saing negara secara keseluruhan, sementara orientasi manfaat ekonomi jangka pendek dari sektor ini, terlepas dari pertumbuhan kuantitatifnya, menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung ancaman terhadap kesejahteraan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pariwisata berkelanjutan, jika direncanakan dan dikelola dengan baik dapat

memberikan kontribusi langsung dan positif bagi pencapaian pembangunan Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi inti dari strategi ini dengan mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan yang layak untuk pengembangan produk, layanan, dan pekerjaan umum yang ramah lingkungan. Rencana strategi sustainable tourism development mengeksplorasi bagaimana pariwisata dapat berperan dalam meningkatkan mata pencaharian dan meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. (Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012)

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Potensi destinasi pariwisata Indonesia sebagian besar didorong oleh kekayaan sumber daya alamnya yang menghasilkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Kementerian Pariwisata RI merealisasikan potensi tersebut dengan memberlakukan Undang-Undang (UU) negara (No. 50/2011) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010-2025 sebagai pedoman pengembangan pariwisata bagi Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan 50 Destinasi Pariwisata Nasional secara luas. tersebar di 34 provinsi di Indonesia, terdiri dari 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai salah satu aktor yang bertanggung jawab, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengidentifikasi potensi untuk menciptakan nilai ekonomi bagi perekonomian lokal. Oleh karena itu, mereka perlu mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai strategi pemasaran untuk memaksimalkan daya tarik tujuan wisata mereka.

Kompetensi dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya menjadi entry point untuk membangun keunggulan dalam mengoptimalkan kekayaan daerah yang didayagunakan melalui destinasi wisata potensial. Hubungan antara pengembangan pariwisata dan daya saing sejalan dengan konteks Resource-Based View (RBV) yang dibahas oleh seorang sarjana terkemuka (Barney, 1991), dengan alasan bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui keberhasilan penciptaan sumber daya yang sulit diduplikasi oleh pesaing. (yaitu, aset, kemampuan, proses organisasi, atribut, informasi, pengetahuan). Selanjutnya, untuk menjadi sumber keunggulan kompetitif yang potensial, paket sumber daya yang mendasarinya harus langka, berharga, tidak dapat direplikasi, dan tidak tergantikan (Barney, 1991). Aspek sumber daya lainnya untuk organisasi khususnya bagi pemerintah daerah sebagai organisasi manajemen tujuan/destination management organization (DMO) adalah pengetahuan. Sebagai aspek krusial, pengetahuan memiliki peran untuk memperkuat posisi dan peran organisasi, meskipun ada gangguan lingkungan (Iqbal et al. 2020). Selain itu, pengetahuan melengkapi sumber daya tak berwujud dalam mendukung kinerja kelembagaan (Muwardi et al., 2020). Dengan demikian,

pemerintah daerah harus menyadari bahwa kinerja destinasi pariwisata merupakan representasi dari kemampuan dan keunggulan DMO. (Wilopa et al., 2020).

Dalam dekade terakhir, Organisasi Pariwisata Dunia telah meluncurkan kampanye pariwisata dan program pengentasan kemiskinan/sustainable tourism development sebagai alat untuk mengangkat manfaat ekonomi di komunitas yang terpinggirkan. Secara khusus, telah diakui secara luas bahwa pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat. Masyarakat setempat telah melestarikan budaya dan masyarakat tradisional mereka, yang mengarah pada peningkatan minat wisatawan terhadap budaya lokal. Selain itu, kesadaran lingkungan penduduk yang meningkat melalui berbagai spesies unik dan tidak biasa telah menciptakan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam guna memberikan pengalaman wisata yang indah kepada wisatawan. Artinya, pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang efektif untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan (STD) melalui proses berbagi manfaat di antara semua anggota masyarakat dan konservasi sumber daya alam. Di negara-negara kurang berkembang, pariwisata berbasis masyarakat merupakan alternatif untuk pariwisata massal, yang tidak hanya menghasilkan sumber daya keuangan tetapi juga membantu mengurangi efek negatif dari pariwisata massal seperti kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, pariwisata berbasis masyarakat yang berhasil membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan mengurangi kemiskinan dan melestarikan sumber daya alam dan budaya di masyarakat. (Khalid et al., 2019)

Di masyarakat yang kurang berkembang, proyek pariwisata berbasis masyarakat sebagian besar diprakarsai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau pemerintah. Namun, karena proyek pariwisata memiliki risiko kegagalan yang tinggi jika masyarakat tidak mengontrol atau mendukung pasca implementasi, warga harus berpartisipasi dalam proses STD. Selain itu, untuk keterlibatan warga masyarakat dalam STD, konsep pemberdayaan warga harus dipertimbangkan. (Khalid et al., 2019)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan pariwisata untuk memastikan keberlanjutan karena masyarakat memainkan peran sentral dalam perencanaan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inisiatif PMS tidak akan berhasil tanpa kerjasama, dukungan, itikad baik, dan partisipasi warga setempat, peneliti masih mengeksplorasi dan mengkategorikan sikap warga yang disaksikan dan dilaporkan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dengan jelas hubungan sebab akibat antara pemberdayaan dan partisipasi warga yang mengarah pada keberhasilan pendirian STD. (Khalid et al., 2019)

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling cepat berkembang di dunia, dan memiliki peran yang cukup besar dalam

memberikan pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Pada saat yang sama, hal ini harus dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan alam dan budaya yang menjadi tempat bergantungnya. Dalam strategi pemecahan masalah ini terdapat 5 hal yang harus diperhatikan. (World Tourism Organization (UNWTO), 2013)

Hal pertama dari lima pilar dalam Metodologi menyangkut kebijakan dan tata kelola pariwisata. Untuk memastikan bahwa sektor ini ditempatkan dengan benar sebagai kekuatan untuk pembangunan berkelanjutan, sektor ini harus dipertimbangkan sepenuhnya dalam studi dan kerangka kerja pembangunan untuk negara dan diberikan pengakuan yang semestinya di seluruh pemerintahan. Semua negara harus menyetujui kebijakan, strategi, atau rencana induk pariwisata yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan diterapkan secara efektif. Perundang-undangan dan peraturan yang memadai harus tersedia yang cukup untuk mengontrol dan memandu pengembangan pariwisata sambil peka terhadap kebutuhan sektor ini. Tanggung jawab untuk pariwisata harus secara jelas diberikan kepada kementerian tertentu dan didukung oleh lembaga pemerintah yang memiliki keahlian dan sumber daya yang tepat. Terakhir, persyaratan mendasar dari tata kelola yang baik di sektor multidimensi ini adalah adanya struktur dan proses yang memungkinkan dan mendorong kepentingan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata. Ini seharusnya tidak hanya berlaku di tingkat nasional tetapi sama pentingnya di daerah tujuan wisata, di mana banyak tindakan yang mempengaruhi sektor dan dampaknya diambil.(World Tourism Organization (UNWTO), 2013).

Hal kedua meliputi kinerja ekonomi, investasi dan daya saing. Ia mengakui bahwa sektor ini harus kompetitif jika ingin berhasil sebagai kekuatan untuk pembangunan. Kinerja dan dampak sektor ini perlu diukur dan dipantau dengan baik, dengan banyak negara berkembang membutuhkan bantuan dalam membangun sistem statistik pariwisata nasional yang andal. Perjanjian perdagangan dan kebijakan investasi yang mengarah pada pembukaan pasar dapat bermanfaat bagi pariwisata, asalkan ditangani dengan hati-hati untuk memenuhi tujuan pariwisata berkelanjutan nasional. Pada saat yang sama, tindakan harus dilakukan yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan usaha lokal kecil, termasuk meningkatkan hubungan antara pariwisata dan sektor lain, seperti pertanian, kerajinan tangan dan industri kreatif lainnya, dan antar bisnis. Yang terpenting, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa produk dan layanan pariwisata sejalan dengan persyaratan pertumbuhan pasar, dengan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas, mengisi kesenjangan produk, dan mengejar strategi pemasaran yang efektif, termasuk penggunaan media baru, yang telah mengubah promosi perjalanan dan pariwisata. Kebutuhan untuk mendukung ketahanan sektor ini juga harus diperhatikan. (World Tourism Organization (UNWTO), 2013)

Hal ketiga, yang mencakup lapangan kerja, pekerjaan yang layak, dan sumber daya manusia, mencerminkan fakta bahwa pariwisata pada dasarnya

adalah kegiatan berbasis masyarakat. Perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati, yang melibatkan konsultasi dengan perusahaan swasta dan perwakilan karyawan, diperlukan untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memenuhi potensi penciptaan lapangan kerja dan memiliki persediaan tenaga kerja terampil yang memadai untuk memenuhi pertumbuhan di masa depan. Agenda pekerjaan yang layak, menangani pendapatan, kondisi kerja, pengembangan pribadi, kebebasan berekspresi dan kesempatan yang sama, harus didukung oleh undang-undang ketenagakerjaan yang dihormati di seluruh sektor. Akhirnya, ada kebutuhan untuk memahami dengan jelas letak kesenjangan keterampilan di sektor publik dan swasta, dan memastikan bahwa pelatihan yang dapat diakses tersedia untuk memenuhinya, baik di tingkat manajerial maupun kejuruan dan dengan perhatian yang diberikan pada penyediaan keterampilan di bidang yang relevan. terhadap keberlanjutan pariwisata dan kontribusinya terhadap ekonomi hijau, seperti dalam pengelolaan lingkungan. (World Tourism Organization (UNWTO), 2013)

Hal keempat, tentang pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial, berfokus pada peluang khusus yang dihadirkan oleh pariwisata, sebagai sektor padat karya dan beragam, untuk memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan kurang beruntung. Hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah dan sektor swasta di tingkat destinasi nasional dan lokal, dengan kebijakan dan alat yang relevan, seperti analisis rantai nilai, untuk menentukan intervensi mana yang paling baik dilakukan untuk mendukung masyarakat miskin. Serangkaian mekanisme telah diidentifikasi untuk meningkatkan proporsi pendapatan pariwisata yang menjangkau dan menguntungkan masyarakat miskin, yang melibatkan pekerjaan, rantai pasokan, bekerja dengan pedagang informal dan pembentukan usaha dan, lebih luas lagi, penerapan dan penggunaan biaya pariwisata, pemberian sukarela, dan jaminan manfaat dari investasi pariwisata. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan perempuan, minoritas, orang cacat, dan orang tua dan muda, yang semuanya dapat terlibat secara efektif di sektor pariwisata. Pilar ini juga berkaitan dengan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampak sosial negatif dari pariwisata, seperti persaingan untuk tanah, air dan sumber daya lainnya, dan perubahan sosial yang tidak diinginkan, termasuk kejahatan dan eksploitasi seksual. Hal ini menekankan perlunya memastikan bahwa masyarakat lokal diajak berkonsultasi, dilibatkan dan diberdayakan untuk mempengaruhi keputusan pengembangan dan pengoperasian pariwisata yang dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka dan masyarakat. (World Tourism Organization (UNWTO), 2013)

Hal kelima mencakup keberlanjutan lingkungan alam dan budaya, menyadari bahwa pariwisata memiliki alasan unik untuk memperhatikan masalah ini karena ketergantungannya pada daya tarik bentang alam yang murni dan warisan lokal yang dapat diakses, termasuk pentingnya konsumsi sumber daya alam yang berkelanjutan seperti air dan energi. Kebijakan dan tindakan untuk melestarikan aset budaya dan alam serta keanekaragaman hayati, termasuk melalui perluasan dan pengelolaan kawasan lindung yang efektif, penting bagi pariwisata. Demikian pula sektor itu sendiri harus

memastikan bahwa tindakannya membantu melestarikan dan melindungi aset-aset ini daripada mengancamnya. Kontribusi pariwisata terhadap perubahan iklim, terutama melalui emisi dari perusahaan transportasi dan akomodasi, membutuhkan langkah-langkah mitigasi yang diambil secara global dan lokal. Pada saat yang sama, sangat penting bagi sektor ini untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, dengan cara merencanakan pariwisata, misalnya di pantai, dan dalam hal pengaruhnya terhadap pasar. Secara umum, tindakan harus diambil untuk mempromosikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di sektor tersebut, termasuk mengurangi penggunaan sumber daya seperti air dan energi. Instrumen seperti kontrol perencanaan, penilaian dampak, sertifikasi dan insentif keuangan harus digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan baik dalam pengembangan maupun pengoperasian bisnis pariwisata, dengan mempertimbangkan pengalaman, standar dan konvensi internasional. Pada gilirannya, hal ini memerlukan pengukuran dan pemantauan yang efektif terhadap dampak sektor tersebut, melalui penggunaan indikator yang tepat. (World Tourism Organization (UNWTO), 2013)

5. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengentas kesmiskinan dengan sustainable tourism development dan pemberdayaan masyarakat diperlukan tindak lanjut dalam beberapa aspek. Yang pertama dalam sisi kebijakan yang perlu dikaji ulang untuk membuat peraturan-peraturan agar tidak terdapat tumpeng tindih antara pemerintah daerah dan pusat.

Hal kedua, perlunya peningkaran kualitas sumber daya manusia teruta dalam hal kepariwisataan. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat memiliki peran penting dalam pengembangan objek pariwisata setempat. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan peluang untuk membangun kapasitas lokal. Artinya, masyarakat yang diberdayakan lebih siap untuk mendapatkan manfaat potensial dari sector pariwisata.

Selain itu perlu juga diertajam promosi untuk objek pariwisata di Indonesia. Promosi ini guna menarik turis dari mancanegara. Selain itu perlu juga peningkatan infrastruktur pada daerah pariwisata di Indonesia hal ini guna meningkatkan akses ke objek pariwisata tersebut. Selain itu untuk meningkatkan investor yang meu menanamknan modal pada sector pariwisata diperlukan pengaturan kebijakan kembali agar mempermudah investor untuk berinvestasi.

Selain manfaat dari pariwisata yang sangat banyak, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tegas untuk menyikapi pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan pariwisata di Indonesia.

6. Kesimpulan dan Saran

Dengan sumber daya alam dan budaya yang melimpah serta potensi pasar domestik dan internasional yang besar, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dalam pemanfaatan aset-aset tersebut secara berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan dan administrasi pariwisata masih kurang terintegrasi di antara banyak kementerian dan unit pemerintah yang berbeda. Perekonomian informal Indonesia yang cukup besar, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pariwisata dan perhotelan mengancam tujuan pembangunan nasional dan melemahkan daya saing negara secara keseluruhan, sementara orientasi manfaat ekonomi jangka pendek dari sektor ini, terlepas dari pertumbuhan kuantitatifnya, menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung ancaman terhadap kesejahteraan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pariwisata berkelanjutan, jika direncanakan dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi langsung dan positif bagi pencapaian pembangunan Indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi inti dari strategi ini dengan mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan yang layak untuk pengembangan produk, layanan, dan pekerjaan umum yang ramah lingkungan. Rencana strategi sustainable tourism development mengeksplorasi bagaimana pariwisata dapat berperan dalam meningkatkan mata pencaharian dan meningkatkan kualitas hidup di Indonesia.

Dalam bidang pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat merupakan elemen vital dalam pelaksanaan sustainable tourism. Selain itu, terdapat hubungan yang kuat antara pemberdayaan masyarakat lokal dan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Meskipun beberapa penelitian berfokus pada kekuatan umum dan partisipasi masyarakat tanpa mempertimbangkan pemberdayaan masyarakat dan kontribusinya terhadap pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan penduduk merupakan prasyarat untuk STD . Pemberdayaan masyarakat identik dengan pemberian kekuatan dan suara kepada kelompok marginal dan komunitas lokal, sehingga didasarkan pada tindakan kolektif dan keterlibatan semua anggota masyarakat daripada tindakan Pemberdayaan masyarakat harus mencakup pemenuhan kebutuhan nyata dan dirasakan masyarakat, akses yang lebih baik ke sumber daya, mengelola organisasi lokal, dan mengendalikan aspek lingkungan secara sosial melalui pengembangan kapasitas masyarakat

Oleh karena itu sektor pariwisata harus mempertimbangkan hal-hal seperti metodologi menyangkut kebijakan dan tata kelola pariwisata, kinerja ekonomi, investasi dan daya saing, sumber daya manusia, manfaat bagi rakyat setempat, keberlanjutan lingkungan hidup dan alam guna menciptakan pembagunan pariwisata yang berkelanjutan guna mengentas kemiskinan. Kedepannya diharapkan nilai-nilai ini diperhatikan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

Daftar Pustaka

Akbar, S. et al. (2021) “Community Empowerment in the Context of Sustainable Tourism Development in Surodadi Village,” (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 8(2). doi: 10.21831/jppm.v8i2.39164.

Farhan, M. and Wardani, P. A. (2022) “The Role of Institutional Entrepreneur in Realizing Sustainable Tourism Development in Kelor Tourism Village,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 4(7). doi: 10.32670/fairvalue.v4i7.1320.

Hardy, A.L, & Beeton, R.J.S. (2001). Sustainable tourism as maintainable tourism: Managing resources for more than average outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168–192.

Harrison, D., & Schipani, S. (2007). Lao tourism and poverty alleviation: Community-based tourism and the private sector. Current Issues in Tourism, 10(2-3), 194-230.

Irawan, N. and Nara, V. (2020) “Managing women empowerment through participation in sustainable tourism development in Kampong Phluk, Siem Reap, Cambodia,” International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 4(02). doi: 10.29040/ijebar.v4i02.1053.

Jamal, T., & Budke, C. (2020). Tourism in a world with pandemics : local-global responsibility and action. https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014

Khalid, S. et al. (2019) “Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism,” Sustainability, 11(22), p. 6248. doi: 10.3390/su11226248.

Luo, X., & Bao, J. (2019). Exploring the impacts of tourism on the livelihoods of local poor: the role of local government and major investors. Journal of Sustainable Tourism, 27(3), 344–359. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1578362

Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia (2012) Strategic Plan Sustainable Tourismand Green Jobs for Indonesia. Jakarta: ILO Country Office.

Muhanna, E. (2006). Sustainable Tourism Development and Environment Management for Developing Countries. Problems and Perspectives in Management 4 (2), 14-30

Nations United. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, NY, USA: United Nations; 2015

Nugroho, S. B. M. (2020) “Beberapa Masalah dalam Pengembangan Parawisata di Indonesia,” Jurnal Pariwisata, 7(2).

Nurhasanah, I. S., Alvi, N. N., & Persada, C. (2017). Perwujudan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung. Tataloka, 19(2), 117. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.117-128

Rahmawati, P. I., Nugraha, I. G. P., Saskara, G. A. J., Andi, P., & Wirasetia, D. C. L. (2021). Peningkatan Kapasitas Travel Awareness Group dalam

Pengembangan Kepariwisatan Desa Lokapaksa Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Proceeding Senadimas Undiksha, 185.
Sutawa, G. K. (2012) “Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development,” Procedia economics and finance, 4, pp. 413–422. doi: 10.1016/s2212-5671(12)00356-5.
Wilopa et al. (2020) “Strategic Issues of Tourism Destination In Indonesia: Are They Market Ready?,” International Journal of Entrepreneurship, 24(2).
World Tourism Organization (UNWTO) (ed.) (2013) Sustainable Tourism for Development Guidebook - Enhancing capacities for Sustainable Tourism for development in developing countries. World Tourism Organization (UNWTO).

Biodata Penulis

Prof. Dr. dr. Sarma Nursani Lumbanraja, M.Ked(OG), SpOG Subsp.K.Fm merupakan Guru Besar Tetap Departemen Obstetri dan Ginekologi FK USU. Setelah menamatkan pendidikan dokter umum dari FK USU tahun 1985, penulis bertugas di Puskesmas Sei Agul, Medan/ Dinas Kesehatan Kota Medan. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan spesialis Obstetri dan Ginekologi di fakultas yang sama dan tamat pada tahun 1998, lalu bertugas di RS Pirngadi Medan. Pada tahun 2000, penulis melanjutkan Pendidikan subspesialis fetomaternal di FK UI sampai tahun 2003. Tahun 2004, penulis kemudian beralih dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pada tahun 2013 penulis menamatkan program doktor dari FK USU, dan setelahnya mengikuti Pendidikan Magister Kedokteran Obstetri dan Ginekologi. Pada 1 Agustus 2018, penulis diangkat menjadi guru besar tetap Departemen Obstetri dan Ginekologi FK USU. Hingga saat ini, penulis aktif sebagai anggota berbagai macam organisasi seperti IDI, POGI, HKFM, ISUOG.

SUTAINABLE TOURISM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGETASKAN KEMISKINAN (PERSPEKTIF KOMUNIKASI)

Suwardi Lubis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Latar Belakang

Sustainable tourism atau wisata berkelanjutan adalah suatu cara yang dimaknai paling sesuai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di satu sisi, desa sebagai objek wisata dan di sisi lain masyarakat desa adalah pihak yang paling tepat untuk diberdayakan karena berbagai kondisi yang dialami. Perspektif komunikasi melihat bagaimana konsep pembangunan ini dikomunikasikan ke ruang publik maupun melalui saluran privat yang sering disebut dengan koordinasi antar lembaga. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang dapat dilihat yaitu:

Pertama, konsep *sustainable tourism* yang ditawarkan harus meliputi berbagai sektor yang krusial. Semisal desa wisata sebagaimana dikemukakan Santoso (2022) adalah wisata yang dapat membuat masyarakat dari luar mau berkunjung disebabkan adanya ciri khas, daya tariknya, serta nilai edukasi yang dimiliki. Pada kenyataannya seringkali tidak semua indikator dapat berjalan dengan mulus karena akan ditemukan berbagai kendala dalam indikator tahap pendayaan seperti dalam hal pembagian kerja yang belum sepenuhnya sesuai keinginan masyarakat.

Kendala dalam program Desa Wisata yaitu: Santoso (2022)

1) Partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat karena adanya pandangan negatif terhadap tempat wisata yang biasanya digunakan untuk berbagai hal negatif seperti bolos sekolah bagi siswa yang masih sekolah, pacaran tidak sehat, melakukan kegiatan mesum, dan lainnya;

2) Permasalahan dana. Adanya masalah terkait pendanaan dalam berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata dapat menjadi faktor kendala;

3) Permasalahan pemasaran. Dalam konsep desa wisata diperlukan pemasaran yang intens untuk mempromosikan desa wisata. Kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh pelaku akan membuat desa wisata tidak dikenal.

2. Masalah

Masyarakat mengalami ketidakberdayaan antara lain di pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor lingkungan dan sektor-sektor lainnya. (Wikantosa, 2022). Pada kenyataannya desa merupakan objek dari

pembangunan, karena program-program pembangunan menjadikan desa sebagai hulu dan sebagai hilir dari pembangunan itu sendiri.

Ada dua karakteristik yang menjadi ciri masalah dalam hal pemberdayaan masyarakat yaitu di tingiat makro dan ditingkat mikro. (Wikantosa, 2022).

Pertama, di tingkat makro, pembangunan bersifat proyek dan tidak berkesimbangunan. Selanjutnya lokasi yang tidak merata disebabkan oleh peran dari faktor politik aik di level lokal maupun di level nasional.

Kedua, di tingkat mikro, fragmentasi atau terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilakukan lintas kelembagaan, manakala juga terjadi fragmentasi dalam hal perencanaan dan keuangan sehingga pada akhirnya menyebabkan tumpang tindih kelompok sasaran.

Karena itu diperlukan untuk melakukan penguatan-penguatan dalam berbagai sektor seperti sistem pemerintahan desa, perbaikan sektor gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan di bidang fundamental pembangunan sumber daya manusia adalah suatu hal pokok yang perlu diperhatikan para pengambil keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan dari pengabaian hal ini akan berimbas ke berbagai sektor seperti pembangunan desa yang terhambat, tingkat kriminalitas, tidak termanfaatkannya sumber daya alam secara efektif dan maksimal serta berbagai dampak turunan lainnya.

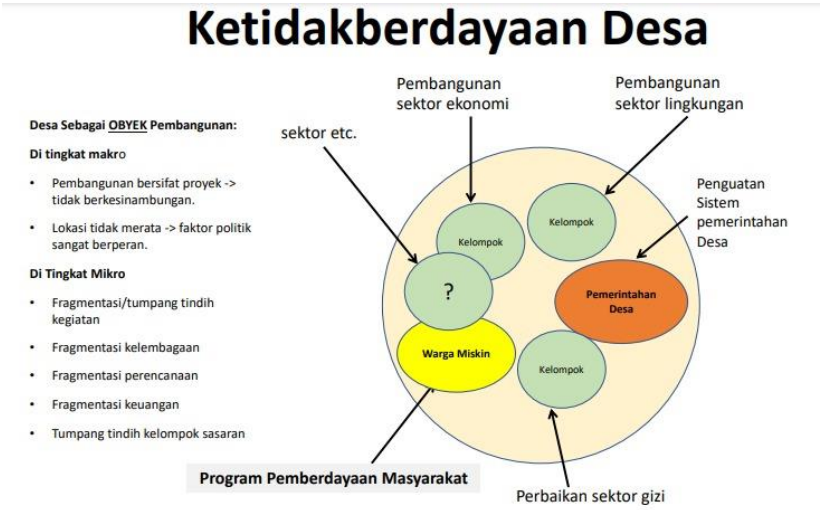

Sumber: Bito Wikantosa, 2022

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang cukup kompleks dan perlu diurai secara mendalam dan rinci. Secara sederhana konsep ini setidaknya dibagi dalam dua dimensi yang berbeda yakni: *Pertama,* dimensi waktu disebabkan adanya keberlanjutan yang tentunya terkait dengan masa berlaku yaitu di masa mendatang. *Kedua,* dimensi interaksi yang berlangsung antara beberapa variabel seperti iklim

politik, kondisi sosial, sistem ekonomi dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.(Fauzi,2004)

Konsep pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dari pengertian statik seta dinamik yang terjadi. Pezzey (1992) Dari segi statik maknanya sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang terkait dengan laju teknologi yang berlangsung secara konstan, sedangkan keberlanjutan dari segi dinamik maknanya yaitu pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan dengan tingkat teknologi berubah sepanjang masa.

Sementara Komisi Brundtland memberikan defenisi yang menjadi acuan terhadap konsep pembangunan berlanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari defenisi ini perhatian ditujukan pada pentingnya kendala sumber daya alam juga lingkungan terhadap pola pembangunan serta konsumsi. Selain itu perhatian menyangkut kesejahteraan (*well-being*) generasi yang akan datang kemudian.

Menurut Suparmoko (2020), pada prinsipnya, konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteaan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan. Sedangkan pilar pembangunan berkelanjutan berupa;

a. Berkelanjutan ekonomi,
b. Berkelanjutan sosial dan
c. Berkelanjutan lingkungan.

Ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan

Sekaitan dengan ini keberlajutan dapat diasumsikan pada hal-hal yang mendasar yang meliputi beberapa bagian. (Hall, 1998)

1) Pada jangka panjang, suatu kondisi positif dilihat dari bagaimana perlakuan masa kini dan masa datang;
2) Adanya kesadaran bersama tentang lingkungan sebagai kekayaan yang memberikan sumbangan besar bagi *economic well-being*;
3) Pemahaman dan pengetahuan atas hambatan yang dialami manakala tidak secara rapih menjaga dan memelihara kekayaan lingkungan yang dimiliki.

Dari ragam pengertian tentang konsep pembangunan di atas, maka dalam perspektif komunikasi, pemecahan masalah dapat dimulai dari pemahaman bersama tentang konsep ini. Karena efektivitas komunikasi bermakna kesamaan makna di antara unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Manakala terjadi kesamaan makna maka akan tercapai derap langkah bersama yang memberikan ruang keluasaan yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya ruang akan sempit dan tanpa keleluasaan dalam

mencapai tujuan bersama jika tidak terdapat kesamaan makna tentang pesan komunikasi yang disampaikan. Singkatnya pemaknaan konsep pembangunan berkelanjutan harus dimakna secara seragam, demikian pula halnya dalam pemaknaan pemberdayaan masyarakat dan tentang kewisataan. Seluruh stakeholders pembangunan memiliki kesamaan makna dalam pembangunan yang dijalankan.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam mereduksi kendala yang terjadi, konsep pembangunan keberlanjutan dalam Perman et al.,(1997 dalam Fauzi, 2004) terdapat beberapa alternatif:

1. Adanya ketersediaan utilitas yang diperoleh masyarakat tidak dan tidak mengalami penurunan (*non-declining consumption*),
2. Adanya sumber daya alam yang dikelola untuk memelihara kesempatan produksi di masa depan
3. Adanya sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*nondeclining*)
4. Adanya kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Hedebro (dalam Runtiko, 2023) mengidentifikasi adanya tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang saling berhubungan, yaitu:

1. Sebuah pendekatan yang berfokus pada pembangunan bangsa dan kontribusi media dalam upaya ini. Politik dan aktivitas media dalam pengertian umum dibahas di sini, serta isu-isu yang berkaitan dengan struktur organisasi dan kepemilikan serta kontrol media. Kajian ini menggunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan umum.
2. Pendekatan yang lebih rinci memahami peran media massa dalam pembangunan. Menurut pendekatan ini, media adalah pendidik atau guru, dan gagasannya adalah penggunaan media untuk mengajarkan berbagai keterampilan kepada orangorang dan dalam kondisi tertentu memengaruhi sikap mental dan perilaku mereka. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah bagaimana media dapat digunakan secara efektif untuk mengajarkan informasi tertentu kepada publik.
3. Suatu pendekatan yang berorientasi pada perubahan masyarakat setempat atau desa. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana kegiatan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan ide, produk, dan praktik baru di desa atau wilayah.

5. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut adalah untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan memberdayakan masyarakat desa dalam s*ustainable tourism* atau pembangunan wisata yang berkelanjutan dalam perspektif komunikasi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman para *stakeholders* di tingkat masyarakat desa dengan melakukan sosialisasi, diseminasi informasi tentang makna dan tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor wisata. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa akan keberlanjutan wisata untuk pemberdayaan maka akan terjalin gerak langkah bersama. Masyarakat desa sasaran pembangunan pembangunan harus mendapatkan edukasi secara reguler dan terprogram secara terjadwal dalam bentuk yang inovatif.
b. Meningkatkan pemahaman para *stakeholders* di tingkat pengelola pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pelatihan dan target-target dengan rewards khusus. Dengan demikian akan merangsang peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengelola konsep pembangunan ini. Rencana tindak lanjut dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola pariwisata berkelanjutan ini dapat bekerjasama dengan berbagai pihak seperti swasta dan perguruan tinggi.
c. Meningkatkan pemahaman para *stakeholders* di tingkat masyarakat umum. Masyarakat domestik adalah pasar terbesar bagi wisata berkelanjutan yang dapat menumbukan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu masyarakat secara umum perlu diedukasi untuk menjadi pelancong yang mendukung konsep pembangunan berkelanjutan di sektor ini melalui informasi tentang wisata di media massa. Perlu menjalin kerjasama dengan media massa dan berbagai platform media lainnya untuk diseminasi informasi wisata berkelanjutan yang berisi konten yang berbobot edukasi serta pembelajaran wisata.

6. Kesimpulan dan Saran

Dari paparan yang disampaikan atas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam perspektif komunikasi dalam hal pemberdayaan masyarakat desauntuk s*ustainable tourism* adalah perlunya kesamaan makna dalam memaknai semua variabel dalam konsep pembangunan ini, yaitu pemberdayaan masyarakat desa; dan s*ustainable tourism.* Hal ini menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Karena dengan terciptanya pemaknaan yang sama maka seluruh potensi akan bergerak ke arah yang sama mendukung terwujudnya tujuan pembangunan. Sebaliknya manakala pemaknaan masih berlangsung secara parsial maka koordinasi pembangunan akan menjadi beban berat yang akan menjadi faktor tidak tercapainya tujuan pembangunan.

Daftar Pustaka

Fauzi.A. 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hall, C.M. 1998. Historical antecedents of sustainable development and ecotourism:new labels on old bottles. In: Hall, C.M. & Lew, A.A. (eds.). Sustainable tourism:a geographical perspective. Longman, New York. p. 13–24.

Santoso, M. A. (2022). Dampak Pengembangan Wisata Danau Tangkas Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(2), 188–199. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1205

Pezzey, John. (1992). Sustainable Development Concepts, An Economic Analysis. The World Bank Paper. Washington, D.C.

Runtiko, Agus Ganjar. (2023). Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Smart Village menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Dalam Muhammad Yamin (Editor). Sustainable Development Goals Dalam Perspektif Intermestik (Internasional Domestik). Satria Indra Prasta Publishing (Anggota IKAPI). Banyumas. ISBN: 978-623-337-906-9

Suparmoko, Muhammad. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol.9. No.1. hl.39-50.

Wikantosa, Bino. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Materi Persentasi: Jakarta 30 November 2022.

Biodata Penulis

Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS lahir di Rantau Parapat, 10 Agustus 1958. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Komunikasi pada tahun 2003. Pada tahun 1989 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Komunikasi pada tahun 1994 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi FISIP USU Sejak 1 Januari 1986, dan sejak tanggal 10 agustus 2002 menjadi Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP USU Medan dan pada saat ini memiliki H-Index google scholar 18. Banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional serta penulis 15 buku yang diterbitkan secara nasional terutama bidang komunikasi pembangunan.

PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

T. Silvana Sinar
Fakultas Ilmu Budaya

1. Latar Belakang

Pariwisata telah muncul sebagai strategi yang efektif untuk menangani perkembangan ekonomi global (*global economy*) (Mowforth, Munt, 2015), menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak kota dan wilayah, dan dalam beberapa kasus bertindak sebagai satu-satunya katalisator pembangunan *acting as the only catalyst for the development* (Chatzigeorgiou & Christou, 2016; Amerta et al., 2018). Istilah 'keberlanjutan' atau *sustainability* dipilih untuk menekankan pentingnya menilai masa depan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan berkelanjutan (SDGs) oleh UNESCO tahun 2015 sebagai peta jalan untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi memastikan masa depan yang sejahtera bagi masyarakat dunia pada tahun 2030. Menurut Heal (2001), konsep keberlanjutan setidaknya mengandung dua dimensi: yaitu keberlanjutan dimensi waktu menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, dan kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Istilah 'berkelanjutan' disandingkan dengan 'pariwisata' sehingga membentuk konsep 'Pariwisata Berkelanjutan' (PB) yang merupakan program pemerintah dalam dimensi waktu yang berlanjut dalam masa panjang yang dikaitkan dengan pelaksanaan pelestarian lingkungan, sosial budaya, dan kelayakan ekonomi. Banyak negara di dunia memasukkan pariwisata sebagai salah satu instrumen dan kebijakan sektoral dalam pembangunan, yang proyek di bidang ini didanai dan dilaksanakan oleh lembaga kerja sama di negara masing-masing (Fayos, Moraleda, & Isabel, 2015).

Pemberdayaan masyarakat adalah istilah penting yang dikaitkan dengan pariwisata berkelanjutan karena beberapa hal. Pertama, perjalanan, praktik pariwisata, dan industri pariwisata melibatkan masyarakat apalagi jika usaha pariwisata berbasis masyarakat dan partisipasi setempat memberdayakan masyarakatnya untuk memperbaiki situasi dan kondisinya secara berkelanjutan. Yang kedua, dalam proses pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan kemiskinan karena kebutuhan dasar utama seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi secara layak dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Font & Ahjem, (2007) berpendapat dengan memberdayakan masyarakat, mereka ikut bertanggung jawab dalam mendukung ekonomi lokal melestarikan warisan budaya sebagai destinasi

pariwisata sekaligus menjaga keseimbangan alam semesta, sumber daya alam dan lingkungan.

Selanjutnya, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, penciptaan peluang untuk pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas dan usaha lainnya sekaligus penjagaan keseimbangan alam semesta, sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Yoeti, 2006) yang melibatkan masyarakat tidak terjadi begitu saja. Pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi sumber daya alam sehingga partisipasi masyarakat bisa dilibatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Hubungan antara pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan berkaitan dalam pelaksanaannya di Indonesia sebagai strategi yang efektif untuk menangani pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan dan pembangunan sosial. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (2022) mengungkapkan pariwisata berkelanjutan menjadi tren terbaru dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dunia di Indonesia. Perhatian yang signifikan terhadap pariwisata berkelanjutan digunakan pemerintah Indonesia sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan ekonomi sambil melestarikan sumber daya alam dan budaya. Hal ini juga dinyatakan Sandiaga dengan meminjam istilah dari Felipe Calderon "*make money while you preserve the environment*'…".

Dengan adanya tinjauan penting di atas, tulisan ini perlu mengungkapkan masalah, pemecahan dan strategi penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2. Masalah

Masalah dalam bidang kepariwisataan berkelanjutan yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah belum dikelolanya industri pariwisata Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai destinasi global yang diunggulkan. Permasalahan ini melibatkan kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal (SDM) (Susilo & Dharmawan, 2021), timpangnya pendapatan, sosial dan kebijakan pemerintah (Sumarjiyanto BM, 2020), derasnya urbanisasi dan modernisasi dan rusaknya secara signifikan sumber daya alam dan ekosistem Indonesia. Nyatanya pariwisata yang diunggulkan masih berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal sampai saat ini belum ikut berpartisipasi aktif dan pengambilan keputusan dalam bidang kepariwisataan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan sosial dalam konteks akses ke pendidikan masyarakat masih belum membumi sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Akses yang terbatas ke pendidikan berkualitas ini tetap melanggengkan siklus kemiskinan, karena individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah tidak dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk kesempatan kerja yang

lebih baik. Individu-individu dari komunitas yang terpinggirkan ini merasa sangat sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman kemiskinan.

Pesatnya urbanisasi dan modernisasi berujung pada tergerusnya nilai-nilai budaya tradisional. Masyarakat desa berbondong-bondong bermigrasi ke kota untuk mencari peluang yang lebih baik, namun banyak di antara mereka meninggalkan praktik budaya mereka, yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya. Fenomena ini pada akhirnya berujung pada ketimpangan sosial dan tingginya daya saing dalam lapangan kerja. Di samping itu, budaya dan kearifan lokal yang sebenarnya adalah salah satu daya tarik wisatwan asing secara perlahan tergerus. Padahal apabila hal itu bisa dipertahankan dan dimanfaatkan dengan sefektif, maka peluang kerja bisa diperluar dan urbanisasi serta kemiskinan memungkinkan untuk dicegah.

Selain itu, masalah lingkukan tidak bisa diabaikan karena pariwisata juga sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Misalnya, masalah lingkungan dalam bidang industri pertambangan dan penggundulan hutan telah menyebabkan ancaman bagi penghidupan masyarakat lokal di Indonesia yang bergantung pada sumber daya tersebut dan memperparah kesenjangan sosial khususnya kemiskinan. Hal ini pernah terjadi di beberapa bagian di Indonesia seperti Karst Raja Ampat, Pantai Kuta Bali, dan Pulau Gili Trawangan akibat limbah domestk dan pertambangan.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Upaya-upaya pemikiran untuk memecahkan masalah pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dalam pandangan Cortez (2010) melibatkan kerjasama antar pemangku kepentingan, sinergi, keseimbangan, tanggung jawab sosial dan budaya. Pemerintah mempersiapkan praktik pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan anggaran keuangan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya untuk industri pariwisata global agar tujuan destinasi pariwisata merata di seluruh provinsi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata berbasis masyarakat partisipatif menciptakan peluang untuk pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas sebagai usaha pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan.

Untuk mewujudkan keberhasilan program pariwisata berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan sejumlah pelatihan, sosialisasi dan promosi yang berkelanjutan yang bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif ikut mengambil keputusan dalam usaha pariwisata berbasis masyarakat yang partisipatif, membina kepemilikan usaha dan sumber daya sosial budaya masyarakat.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Masyarakat lokal dapat mengikuti pelatihan, sosialisasi dan promosi yang berkelanjutan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan

pariwisata berkelanjutan. Misalnya, anggota masyarakat dapat menerima pelatihan di bidang perhotelan, bimbingan, atau pemasaran. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada mata pencaharian tradisional. Metode pelatihan, promosi dan sosialisasi sangat penting untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang memupuk rasa tanggung jawab dan kepedulian yang kuat terhadap lingkungan. Beberapa pelatihan yang perlu sebagai berikut:

1. Pelatihan bagi pemilik *homestay* dan hotel, pengrajin tangan lokal, dan pemandu tur. Aspek signifikan dari strategi pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat lokal dilibatkan dalam industri pariwisata untuk menghasilkan pendapatan melalui mengakomodasi berbagai peluang seperti pelatihan *homestay*, kerajinan tangan lokal, dan tur berpemandu.
2. Pelatihan peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pelestarian budaya di kalangan generasi muda untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang utama Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya budaya, dalam mencapai budaya sosial yang berkelanjutan di Indonesia, perlu fokus pada interaksi antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
3. Sosialisasi pelestarian lingkungan. Indonesia adalah rumah bagi beragam ekosistem, termasuk hutan hujan, terumbu karang, dan spesies yang terancam punah. Untuk memastikan pelestarian kekayaan alam ini dalam jangka panjang, penting untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif dari kegiatan pariwisata. Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti mempromosikan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, melestarikan sumber daya air, dan mempromosikan pilihan transportasi yang ramah lingkungan.
4. Pemberian akses ke sekolah dengan menambah guru yang berkualitas meminimalkan kesenjangan pendidikan di daerah pedesaan, mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dengan pemahaman yang mendalam diperoleh dari pelatihan-pelatihan mengandalkan masyarakat menambah pengetahuan yang berharga dan semakin sadar bertindak sebagai pemelihara tanah, memastikan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan pengetahuan yang tak ternilai dapat diwariskan ke generasi muda secara berkelanjutan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Aspek signifikan dari strategi pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yaitu metode promosi, pelatihan dan sosialisasi sebagai metode dan cara

peningkatan ekonomi masyarakat setempat, menyadarkan akan pentingnya memahami pelestarian budaya di kalangan generasi muda dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan di Indonesia.

1. Pengadaan Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat di Indonesia. Badan Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBTEs) memainkan peran penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini, yang digerakkan oleh komunitas lokal, bertujuan untuk menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif terhadap lingkungan mereka. Pentingnya CBTE di Indonesia dan kontribusinya bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata. CBTE memberdayakan masyarakat lokal dengan memberi mereka kesempatan untuk berwirausaha dan kemandirian. Dengan terlibat dalam kegiatan pariwisata, komunitas ini dapat menghasilkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. CBTE sering melibatkan kerajinan tradisional, pertunjukan budaya, dan akomodasi *homestay*, yang memungkinkan wisatawan untuk merasakan budaya lokal yang otentik sambil memberi manfaat langsung kepada anggota masyarakat. Pemberdayaan ini menimbulkan rasa bangga dan memiliki dalam melestarikan warisan budaya mereka. Selain itu, CBTE mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Komunitas lokal sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka.
2. Pengadaan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, melestarikan sumber daya air, dan mempromosikan pilihan transportasi yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif dari kegiatan pariwisata. Pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan beragam, menyadarkan masyarakat dalam jangka panjang melestarikan dan menjaga kekayaan alam hutan hujan, terumbu karang, dan spesies yang terancam punah. masyarakat lokal memainkan peran penting dalam konservasi dan perlindungan alam sekitar negara. Komunitas ini memiliki hubungan yang mendalam dengan lingkungan mereka dan memiliki kepentingan dalam pelestariannya. Untuk menyoroti pentingnya masyarakat lokal dalam menjaga sumber daya alam Indonesia dan manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi aktif mereka.
3. Pemberian akses ke sekolah dan menambah guru yang berkualitas memaksimalkan pendidikan di daerah pedesaan. Melakukan identifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia dengan mendistribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Pemerintah berusaha mengatasi pendistribusian pendapatan yang tidak merata memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang. Ukuran ketimpangan pendapatan yang umum digunakan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara.

5. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Distribusi pendapatan yang tidak merata memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang, membuat sebagian besar penduduk berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ukuran ketimpangan pendapatan yang umum digunakan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara. Untuk hal ini dapat menggunakan sistem zakat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang tidak proporsional secara keseluruhan. Sistem zakat merupakan salah satu cara utama mencapai peningkatan kapasitas untuk penyediaan kebutuhan masyarakat lokal dengan yang diperlukan untuk mengurangi siklus kemiskinan. Pentingnya mengadakan modal, program pemberdayaan masyarakat lintas generasi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
6. Penggunaan sistem zakat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang tidak proporsional, agar individu dan masyarakat secara keseluruhan yang berpenghasilan rendah mencapai peningkatan kapasitas untuk penyediaan kebutuhan masyarakat lokal dengan yang diperlukan dan mengurangi siklus kemiskinan lintas generasi
7. Menggiatkan promosi, sosialisasi dan menyediakan platform bagi masyarakat tentang pelestarian budaya, warisan lokal, dan sumber daya alam untuk menunjukkan tradisi mereka kepada dunia global tentang ekosistem lokal, termasuk tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam yang ditemukan di Indonesia.
8. Masyarakat lokal bertindak sebagai penjaga tanah dan sumber daya alam dalam melestarikan dan mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah dan mengandalkan sumber dayanya untuk penghidupan mereka sekaligus memiliki kepentingan dalam penggunaan sumber daya ini secara berkelanjutan karena mereka secara langsung bergantung padanya untuk penghidupan mereka.
9. Upaya mengembangkan potensi desa-desa wisata yang ada di Indonesia diperkenalkan dalam Akun Twitter Resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dikelola oleh Biro Komunikasi menayangkan berbagai visual sebagai destinasi dan inspirasi dalam berkarya seperti keindahan Bali, Lombok, Persembahan Tarian Ratoh Jaroe Khas Nanggroe Aceh Darussalam yang unik, perkembangan musik yang beragam menghadirkan banyak musisi baru bertalenta, dan lainnya. Peringatan Hari Pariwisata Sedunia, UNWTO mengangkat tema “Pariwisata dan Pembangunan Pedesaan” untuk menggali potensi lokal dengan pengembangan ekosistem industri pariwisata misalnya Likupang.
10. Mengelola pembudidayaan dengan menggandeng Dinas di kabupaten setempat sebagai fasilitator untuk memberikan penyuluhan membudidayakan dan perawatan terhadap budidaya tertentu dengan

baik. Sebagai contoh bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pihak perusahaan perajin untuk menjadi fasilitator, kerja sama promosi pariwisata dengan biro perjalanan, agen transportasi, hotel, rumah makan, bahkan dengan tempat-tempat wisata lain

Pemerintah dan swasta ikut bertanggung jawab memberikan kontribusinya dan rasa aman serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan berlangsung dengan baik di masa kini dan pada masa yang mendatang.

6. Kesimpulan Dan Saran

Perencanaan pelatihan dan sosialisasi, promosi, pengadaan fasilitas untuk masyarakat dapat memberdayakan dan menyadarkan masyarakat akan tanggung jawab terhadap menjalankan praktik sosial secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Promosi tentang keanekaragaman hayati, dan pelestarian praktik tradisional akan berdampak sangat signifikan terhadap lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan sangat penting untuk program pariwisata berkelanjutan. Masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan karena melalui pelatihan dan sosialisasi, dipupuk rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam kepariwisataan berkelanjutan. Sebagai penjaga lingkungan, masyarakat mengelola sumber daya berkelanjutan masyarakat lokal yang mana keanekaragaman kearifan lokal budaya, tanah lingkungan ekosistem mereka dapat diandalkan sebagai sumber daya untuk penghidupan mereka. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, berhasil untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, memberantas kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan masa depan yang sejahtera bagi semua masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Arida, I Nyoman Sukma. *BUKU AJAR PARIWISATA BERKELANJUTAN*, Sustain-press https://simdos.unud.ac.id

Fayos, E., Moraleda, L., & Isabel, A. (2015). Knowledge Management in Tourism : Policy and Governance Applications Tourism for Development Article information :Bridging Tourism Theory and Practice (Vol. 4). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2012)0000004004

Heal, Geoffrey M. 2001. *Optimality or Sustainability?* Presentation at the EAERE Conference 2001 Southampton.

Susilo, R. K. D., & Dharmawan, A. S. (2021). Paradigma pariwisata berkelanjutan di indonesia dalam perspektif sosiologi lingkungan. *Jurnal Indonesia Maju*, *1*(1), 49–64.

Sutamihardja. 2004. *Perubahan lingkungan global*, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sumarjiyanto BM, N. (2020). Beberapa Masalah dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, *7*(2).

Website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) https://kemenparekraf.go.id/

Analoui, F., & Akram, S. (2013). Strategic management : the case of NGOs in Palestine. Management Research Review, 35(6), 473– 489. https://doi.org/10.1108/01409171211238 253.

Cortez, S. L. (2010). Strategies for the development of sustainable tourism in the Amazon rainforest of Bolivia. Worldwide Hospitality and Tourism, 2(2), 136–143. https://doi.org/10.1108/17554211011037 822

Fayos, E., Moraleda, L., & Isabel, A. (2015). Knowledge Management in Tourism : Policy and Governance Applications Tourism for Development Article information :Bridging Tourism Theory and Practice (Vol. 4). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2012)0000004004

Fazenda, N., da Silva, F., & Costa, C. (2010). Douro Valley Tourism Plan. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 2(4), 428–440. https://doi.org/10.1108/17554211011074 074

Font, X., & Ahjem, T. E. (2007). Searching for a balance in tourism development strategies. Contemporary Hospitality 11(2/3), ttps://doi.org/10.1108/09596119610152 041

Heath, E. (2014). Tourism as an Instrument for Development : A Theoretical and Practical Study Article information :Bridging Tourism Theory and Practice (Vol. 5). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S2042- 144320140000006021

Wheelen. (2008). Strategic Management and Business Policy. London: Prentice Hall. Pechlaner, H., & Sauerwein, E. (2008). Strategy implementation in the Alpine tourism industry. Contemporary Hospitality Management, 14(4), 157–168. https://doi.org/10.1108/09596110210427003

Biodata Penulis

Tengku Silvana Sinar adalah dosen senior di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (USU). Gelar MA-nya dalam Linguistik Terapan di Universitas Sydney, Australia pada tahun 1986 dan gelar Ph.D dalam Analisis Wacana pada tahun 2003 dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia. Pernah menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I SUMUT dan Dikti NAD tahun 2003-2008. Tahun 2006-2016 menjabat sebagai Ketua Program Magister Linguistik dan Doktor dan sebagai Ketua Jurusan Bahasa Inggris USU pada tahun 2018 hingga 2021. Penelitiannya (2018 dan 2019) didanai oleh DRPM Dikti dengan fokus pada Fitur Fungsional Kasus Korupsi Forensik di Indonesia, dan dana penelitian dari TALENTA USU (2018 hingga sekarang) yang berfokus pada pengajaran Bahasa Inggris.

LANDAK RIVER WISATA SUNGAI DAN ALAM BERBASIS MITOS DAN PELERAI KONFLIK

Wan Syaifuddin
Fakultas Ilmu Budaya

1. Latar Belakang

Pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi, sekaligus jembatan menyampaikan informasi tentang kebudayaan dan pengebangannya. Maka karya sastra pun melalui isi teksnya dapat dipahami sebagai bahasa tertentu yang berbeda dari bahasa umumnya. Artinya apa yang dimaksud susastra tidak hanya dimaknakan sebagai bahasa yang indah, bahasa yang berirama mempunyai pola-pola bunyi tertentu, seperti persajakan dan ritme. Namun, sesungguhnya teks sastra seni kemasan pengungkap ide, gagasan, dan pemikiran, bahkan mempesona serta membahagiakan. Oleh karena, bahasa sebagai medium sastra menjadi bahasa dan realitas yang begerak akur dan terkadang bertentangan dengan realitas. Maknanya, dapat dikatakan bahwa realitas pun lahir dari ruang statis yang tenang, sementara bahasa sastra lahir dari ruang kacau dan penuh muslihat. Seiring dengan itu bahasa sastra pun menjadikan realitas sebagai objek kemauan yang melangkau kepada perkara - perkara manusia yang mustahil dalam realitas itu sendiri.

Sejalan dengan itu teks sastra diikat dua prinsip, yaitu *de facto* dan *de jure*. Tidak heran isi teks sastra demi mengikat pemikiran khalayaknya lahir bersama dengan mitos-mitos yang sangat terkait dengan kehidupan suatu Masyarakat. Sejalan dengan hal demikian kaum formalis pun menyimpulkan bahwa kekhasan teks karya sastra terletak pada bentuk dan bahasanya, bukan pada isinya. Selain itu, bahasa karya sastra di samping dianggap berbeda dari bahasa sehari-hari, tetapi bahasanya itu utamanya bukan berfungsi sebagai alat ekspresi pengarang, melainkan alat untuk memengaruhi dan mengikat pembaca. Kemudian bukan pula untuk menyampaikan sesuatu semata,tetapi untuk mempererat ikatan antar manusia demi menjelaskan kaidah-kaidah kehidupan baik yang nyata ataupun abstrak. Maka menarik perhatian pada diri pengarang dan isi teks karya sastra itu sendiri, demi kesejahteraan dan keharmonisan khalayaknya, manusia. {1}

Pada prinsipnya isi teks sastra, apalagi sastra tradisi,seperti cerita cerita mitos adalah bagian dari kebudayaan yang sangat memengaruhi sikap dan perilaku warga masyarakat, bahkan dapat dikatakan lumbung orientasi nilai budaya, seperti tentang sistem kepercayaan, keyakinan, takhayul, mistis, dan kebiasaan serta magig. Oleh karena itu, program pembangunan di suatu daerah kerap gagal bila tidak memperhatikan dan memahami faktor budaya yang terkandung di dalam literasi budaya masyarakatnya. Sebaliknya, bila memahminya tentu akan menuai kesuksesan. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan misalnya, tidak bisa

hanya mengandalkan satu sisi cara pandang saja, tetapi juga harus memahami aspek-aspek lain seperti, makna mitos-mitos yang ada di lingkungan warga masyarakatnya.

Sesungguhnya, memanfaatkan konsep yang sudah ada dalam pengetahuan lokal masyarakat bukanlah sesuatu yang terlalu asing dilakukan untuk pembangunan. Oleh karena, semua pranata di dalam kehidupan masyarakat memiliki kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama. Kearifan lokal pada tradisi lisan, cerita-cerita keramat dan peribahasa masyarakat Melayu di Bahorok – Langkat yang dibalut dengan keistimewaan mitos-mitos sangat kaya sekali dan memengaruhi pola-pola perilaku dan kebijakan warga masyarakatnya. Hal inilah yang dijadikan pilar untuk mendongkrak kesejahteraan, bahkan pelerai konflik Masyarakat. Maka melalui keberadaannya di destinasi wisata Sungai *Landak River* berkenaan dengan mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat memanfaatkannya sebagai pilar aktivitas yang ada.

Destinasi Wisata Sungai *Landak River* berada di Sungai Landak Kecamatan Bahorok Langkat. Sungai Landak berdampingan dengan Sungai Bahorok yang hulunya berada di Bukit Lawang, sedangkan hilirnya berada di Sungai Wampu langkat. Kedua Sungai dibalut dengan hutan trofis rimba yang alami. Nama dari Wisata Sungai *Landak River* berbasis pada mitos dan keadaan dan keistimewaan alam dari rangkaian isi teks cerita-cerita mitos keramat Kubah Datuk Landak tentang seorang ulama yang dipercayai masyarakat sebagai peneroka dari wilayah Bahorok dan Bukit Lawang.

2. Masalah

Mitos Keramat Kubah Datuk Landak dan alam lingkungannya adalah bagian dari kearifan lokal berupa tradisi lisan masyarakat yang menunjukkan sebagai media untuk meningkatkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, ia sebagai falsafah untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan kearifan lokal tersebut memiliki filosofi yang bernilai tinggi di Masyarakat saat menjalani kehidupan. Maknanya berkaca pada kearifan lokal berupa mitos-mitos Kermat Kubah Datuk Landak dan alam lingkungan yang melekat pada destinasi wisata sungai *Landak River* pada masyarakat Melayu Bahorok – Langkat menunjukkan bahwa ; i) tidak ada satu norma kebudayaannya pun yang membiarkan seorang kerabat di kalangan masyarakat terjadi konflik; dan filosofi budaya Melayu di Baharok Langkat yang tidak membiarkan berkonflik dan saling bantu-membantu dengan ikatan kekeluargaan yang terus dijaga dan dipelihara, demi kesejahteraan masyarakatnya.

3. Pemikiran Pecahan Masalah

Tradisi Mitos

Pada dasarnya pengetahuan tentang sistem kepercayaan dan agama, khususnya masyarakat Melayu, khususnya di Bahorok Langkat direkonstruksi

kembali sebagai suatu kebutuhan, sehingga punya pegangan untuk memberi makna dalam bentuk seni atau produk yang dihasilkan. Tanpa bekal ini, pemaknaan estetika seni dan budaya Melayu tradisi berupa mitos hanya berarti pengalaman praktis masa lalu. Oleh karena itu, rupa budaya tradisi Melayu seolah bernilai netral dan boleh semaunya memberikan makna padanya. Padahal, seni sastra tradisi masyarakat Melayu, apalagi berupa mitos sama sekali bukan bebas nilai, melainkan diciptakan dengan maksud mengekspresikan nilai-nilai tertentu yang bersifat religious dan mistis. Walaupun sesungguhnya, tak'bisa siapa pun melarang seseorang' memberikan makna estetika terhadap seni dan budaya Melayu.

Seharusnya, seni dan budaya tradisi memang kreasi masyarakat, tetapi individu seniman creator, lebih merupakan makhluk sosial, makhluk budaya masyarakatnya yg bukan makhluk individu-eksistensial. Maka, karya seni dan budaya tradisi Melayu, seperti mitos lebih layak disebut sebagai produk budaya masyarakatnya daripada produk kreativitas senimannya. Karya seni dan budaya tradisi adalah produk sebuah budaya yang menjadi sistem nilai suatu masyarakat, maka pemaknaan dan estetikanya, harus berdasarkan konsep budaya masyarakat tersebut. Dan, konsep budaya masyarakat mistis itu dasarnya adalah agama, yaitu Islam. Dengan mengetahui sistem kepercayaannya, terbukalah sistem pemaknaan dari semua hasil budayanya, termasuk mitos cerita Kubah Keramat Datuk Landak, mempertimbangkan hal-hal di ataslah cara dan metode pelestarian dan pengembangan yang melekat pada destinasi wisata *Sungai Landak River* di Bahorok Langkat yang digandrungi oleh masyarakatnya.

Selain itu sastra tradisi berupa mitos cerita Kubah Datuk Landak bagi masyarakatnya di Bahorok Langkat bukan sekadar kenyataan keindahan dan kisah yang sacral. Maknanya bukan sekadar persoalan estetika, tetapi terutama persoalan, jalan keselarasan dengan kosmos, yaitu alam dan yang illahi. Pengalaman estetik sekaligus merupakan pengalaman religius. Target Wisata Sungai Landak River kepada pengunjung atau penikmatnya adalah mencapai pengalaman estetik dan religious. Kemudian pengalaman estetik adalah suatu ekstase dengan kosmos. Peleburan diri dalam budaya adalah peleburan diri dalam pengalaman agamis. Artinya estetika budaya mistis, berbeda dengan estetika budaya ontologis. Dalam budaya ontologis, pengalaman estetik bukanlah pengalaman religius. Namun, pengalaman estetik dapat membantu mencapai pengalaman religius. Artinya, pengalaman religius dapat dicapai setelah proses pengalaman estetik selesai.

Pengejawantahan dari pengalaman itu, sebagaimana kajian para sarjana baik Timur maupun Barat pada awalnya mitos merupakan cerita-cerita yang hidup dalam masyarakat Melayu secara umum, sekaligus sastra adalah objek yang diamalkan oleh raja-raja Melayu untuk memperkuat kekuasaan dengan nilai sakral. Manakala mitos ini pula diangkat ke dalam karya-karya tu-lis vang kerap disebut hikayat. Sesungguhnya genre ini sarana kaum bangsawan dan orang-orang besar serta sultan-sultan Melayu untuk membangun sosio-politik Melayu.

Maknanya, hikayat tersebut adalah standarisasi mitos yang merupakan bahan bacaan bagi rakyat dan bangsawan - Pada umumya dalam alam Melayu hikayat adalah kisah kekuasaan politik magis raja yang merupakan media pengabdian rakyat. Fase berikutnya perubahan perubahan sosial budaya dalam kehidupan Melayu menyebabkan terjadinya transformasi dari kekuasaan raja yang absolut kepada supremasi kekuasaan Tuhan. Hal ini menyebabkan terjadinya transisi dalam dunia Melayu, yakni perubahan bentuk dalam sastra dari berfokus kepada kekuasaan raja kepada kekuasaan Tuhan serta kepada kebutuhan masyarakat agar sejahtera.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Secara umum konflik merujuk kepada keadaan pertentangan atau perebutan akibat ketidaksamaan tujuan antara dua atau lebih pihak dalam sesuatu isu atau keadaan. Secara khusus melalui prespektif psikologi-sastra mendefinisikan konflik sebagai satu keadaan "ketidaksamaan tujuan diantara dua atau lebih pihak" dan ia juga boleh disebut sebagai *"Social conflict exists when two or more parties believe they have incompatible objectives*. Konflik berlaku dalam situasi saling ketidaksesuain keinginan atau kepentingan di antara di antara dua atau lebih pihak." Ditegaskann bahwa asas konflik merujuk kepada suatu proses yang melibatkan sentimen keinginan, harapan atau keperluan.{2}

Sementara itu menurut De Bono konflik adalah suatu keadaan pertentangan, kepentingan, nilai, tindakan atau arah tuju. Dalam keadaan ini biar pun kita sekedar menyatakan kemungkinan berlakunya potensi untuk berkonflik, ia membawa maksud telah berlaku arah tuju konflik walaupun konflik sebenarnya belum berlaku. Lazimnya, konflik sering dikaitkan dengan situasi keganasan. Oleh itu, ia sering kali dilihat sebagai suatu elemen negative yg cuba di elakkan. Sementara itu, teori konflik dalam dua tema utama. Pertama, kebanyakan konflik mempunyai kecukan pelbagai motif. Pihak yang berkonflik masing masing mempunyai kepentingan baik untuk berkerja sama atau bersaing. Kedua, konflik boleh membawa kesan membina (positif) dan kesan kemusnahan (negatif). Kecelaruan sosial dikaitkan dengan unsur negatif, manakala rangsangan untuk perubahan adalah antara kesan positif konflik. Ia akan mengelakkan masyarakat atau individu terbelenggu dalam kebekuan dan kelesuan. Oleh itu dalam sesuatu konflik menjadi pemangkin kepada penyesuai atau pengubahsuaian sesuatu system social dan budaya.{3}

Beberapa pendekatan dalam menanganin konflik, secara ringkasnya kaedah penyelesaian konflik mempunyai beberapa tatacara dan peringkat yang terendiri. Menurut Miall, proses dinamik konflik bergerak berperingkat seperti konflik tersembunyi berkembang menjadi konflik ketara yang membinasakan. Justeru, untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, menggariskan enam peringkat keadaan bagi mencapai penyelesaian secara aman ketika konflik masih di peringkat awal. Pertama, mewujudkan saluran bagi komunikasi pihak yang berkonflik untuk menyuarakan rasa hati masing-

masing, ketiga, mewujudkan pihak ketiga yang dihormati dan berkeupayaan meredakan ketegangan pihak yang berkonflik; keempat, pihak yang berkonflik mempunyai hasrat untuk mencari penyelesaian secara aman; kelima, menggunakan prosedur sedia ada atau membentuk prosedur baru dalam penyelesaian konflik; dan keenam mewujdkan gerak timbal balas lagi mengurangkan tekanan hidup demi keamanan,yaitu meningkatkan kesejahteraan.{4}

5. Rencana Tindak Lanjut

Realitas yang selalu hadir seiring dengan dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat pada destinasi wisata Sungai Landak River adalah konflik, konflik dapat terjadi baik pada individu maupun berkelompok, seperti antara organisasi pemuda dan pemuda setempat . Oleh karena itu konflik dalam kehidupan sosial warga masyarakat tentang keberadaan destinasi wisata Sungai dan alam *Landak River* sulit untuk dihindari. Kehadiran konflik di tengah-tengah masyarakat bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak sosial bagi Masyarakat dan ketentraman di destinasi wisata Sungai **Landak River.** Adapun dampak tersebut diantaranya adalah terhambatnya proses pertumbuhan pembangunan dan pengembangan baik itu pembangunan infra struktur maupun pembangunan sumber daya alam .Apalagi sumber ekonomi yang ada, seperti terselenggaranya Pekan Sungai Landak River yang ada di wilayah destinasi wilayah Landak river.

Dewasa ini masalah sosial yang paling rentan terjadi di masyarakat Melayu Bahorok adalah konflik horizontal antara lain masalah-masalah yang berhubungan dengan akibat perlakuan krisis moral, etika, pergaulan bebas, pertikaian antar suku atau pemuda setempat serta organisasi pemuda, bahkan pertikaian antar desa. Bila permasalahan ini tidak diatasi secara bijak dan konfrehensif, maka konflik akan berlarut yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Beberapa pertikaian antar kelompok pemuda yang terjadi akhir ini diawali oleh masalah-masalah sepele seperti kesalah pahaman antar pemuda (ejek-ejekan), kemudian berkembang menjadi perkelahian antar organisasi pemuda, pada akhirnya meluas juga menjadi perang antar kampung. Pertikaian ini tentu tidak hanya memakan korban jiwa saja, akan tetapi juga harta benda masyarakat kedua belah pihak, masalah ini mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah. Makan ditingkatkan kesadaran tentang nilai dan norma yang terkandung pada ceita-cerita mitos yang ada pada Masyarakat, tentu terkait dengan solusi yang tepat, separti rasa kebersamaan dan persaudaraan yang diikat dengan rasa religious dan mistis sehingga konflik tidak berkembang serta berlarut-larut.

Bila kebersamaan dan persaudaraan tidak dibangun dengan baik maka yang terjadi antara lain pertama akan terkuras tenaga dan fikiran masyarakat hanya untuk mengatasi konflik yang kedua pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan inpra struktur, khususunya di destinasi wisata Sungai Landak Rivers. Pada akhirnya akan

sulit untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berdomisili di daerah Bahorok. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat adalah dengan cara membangun sebuah komitmen yang kuat dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu dengan mengedepankan pendekatan kearifan local dari nilai-nilai dan norma mitos-mitos yang sesuai dengan karakter dan anatomi masing-masing wilayah setempat, kemudian berusaha mengoptimalkan peran para tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Di samping itu tidak mengabaikan norma hukum yang berlaku sebagai konsekwensi dari pelanggaran norma sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik harus ditinggalkan dan diperangi sebagai musuh peradaban bagi masyarakat Melayu. Selain model penyelesaian masalah sosial yang sudah ada secara teoritis sebagai hasil kajian empirik, harus diingat pula bahwa masyarakat memiliki keragaman nilai-nilai, sistem, struktur kekuasaan, model manajemen sumberdaya dan pola perubahan yang khas. Hal ini juga akan memberikan pengaruh terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap tepat bagi masyarakat. Artinya, setiap daerah memiliki kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya bagaimana suatu kelompok atau komunitas tertentu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi.

Sesungguhnya, isu kearifan lokal yang dirupakan dengan mitos-mitos berkaitan dengan alam lingkungan menjadi solusi penyelesaian masalah yang seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang atau masa depan. Dampaknya banyak nilai-nilai budaya, kebiasaan yang baik dan perlu dipertahankan sebagai cara untuk melakukan perubahan yang lebih baik terabaikan keberadaannya. Adapun kearifan lokal pada ungkapan Masyarakat Melayu di Bahorok Langkat yang dapat dimanfatkan sebagai media untuk menjaga kedamaian di dalam Masyarakat di persekitaran wisata Sungai Landak River.

Ketika manusia dengan rasio modernnya telah bingung berhadapan dengan alam dan perilaku masyakat karena sudah tidak mampu lagi menguasainya, maka kearifan local, khususnya yang berupa mitos-mitos dan alam lingkungan akan memperoleh tempatnya kembali. Pada hakikatnya keharmonisan dengan alam dan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja telah dibuktikan lewat proses panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal untuk mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijaksana. Dalam beberapa kasus, tentang masalah sosial yang terjadi di Bahorok Langkat, tepatnya pada destinasi wisata Sungai Dtuk Landak, ketika kemampuan pengetahuan ilmiah dalam hubungan dengan manajemen konflik soaial sepertinya sudah tidak mampu menemukan jalan keluar atau solusi terbaik, pada akhirnya hanya kearifan lokal tersebut yang menjadi titik balik dari penyelesaian semua itu.

Seiring dengan fungsi mitos dan alam lingkungan yang dkemaskan dalam cerita Kubah Datuk Landak di destinasi Landak River Bahorok Langkat adalah sandaran berbagai peranata dan aktifitas masyarakat atau social institusi. Kemudian mitos akan mempunyai rujukan yang serupa kepada

bahan-bahan yang serupa di sisi berbagai budaya. Namun, harus diistimewakan yang di destinasi Landak River. Selain itu, menanamkan kesadaran bahwa kita berhadapan dengan satu corak cerita yang isi kandungannya aneh dan kadang-kadang susah dimengerti, tetapi sungguh berarti pada Masyarakatnya.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Semua pranata di dalam kehidupan masyarakat memiliki kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama. Kearifan lokal pada tradisi lisan berupa cerita-cerita keramat dan peribahasa masyarakat Melayu di Bahorok – Langkat yang dibalut dengan keistimewaan mitos-mitos sangat kaya sekali dan memengaruhi pola-pola perilaku dan kebijakan warga masyarakatnya.

Sikaf Masyarakat terhadap nilai dan norma yang terdapat pada cerita - cerita berupa mitos dan alam lingkungan pada rupa Landak River harus diukur dari satu perilaku bahasa dan budaya Masyarakat Melayu di wilayah destinasi wisata Bahorok Langkat. Oleh karena, nilai dan norma itu hendaklah dipandang dari kacamata yang berlainan. Seiring dengan bahwa orang Melayu aturan-aturan yang dikatakan berawal dari mitos dianggap mempunyai kekeramatan tertentu, dan ini adalah berbeda dari cerita-cerita yang dianggap untuk hiburan. Beberapa pendekatan dalam menanganin konflik. Secara ringkasnya kaedah penyelesaian konflik mempunyai beberapa tatacara dan peringkat yang tersendiri.

Saran

Ciri nilai dan norma dari cerita-cerita mitos harus dan tetap saja dipercayai benarnya. Seperti selalu dikatakan, anggapan kebenaran itu bukan, seperti kebenaran yang didapati pada Sejarah, tetapi kebenarannya yang subjektif dan banyak terlibat dengan struktur masyarakat yang menjadi bingkai kehidupan warga masyarakat itu. Isi cerita itu mungkin payah diterima oleh akal, tetapi apabila cerita itu ada pengesahan dari masyarakat terus melekat pada tingkah dan perilaku masyarakat, apalagi saat berada di wilayah destinasi wisata *Sungai Landak River*.

Daftar Pustaka

{1}Saleeh Rahmad, Muhammad, dkk. 2005. *Idealisme Penulis. Kuala Lumpur* : Gapena. Hlm 204

{2} Kriesberg, 1982: 17 dan Miall, 1992: 38

{3}Syaifuddin, Wan. 2018. *Hikayat Deli Sebagai Pelerai Konflik Etnik.* Yogjakarta : Gading. Hlm.18

{4}Roma Ayuni Loebis, 2022. *Bahasa dan Budaya Kemelayuan & Keindonesiaan.* Yogjakarta : Jaring. Hlm. 107.

Biodata Penulis

Wan Syaifuddin (Prof. Drs. Syaifuddin, M.A., Ph.D.) lahir 9 September 1965. Pendidikan Sarjana (S-1) di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Magister (S-2) dalam bidang kajian kesusasteraan Melayu/Indonesia Modern, *dan Doctor of Philosophy* (Ph.D) di Universiti Sains Malaysia. September 2009 memperoleh gelar profesor dalam bidang kesusasteraan. 2007 – 2010 menjadi Dekan serta pada tahun 2008-2013 Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. 2019-2021 Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Utara, 2021-2022 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan 2022- sekarang Koordinator Divisi Uji Kompetensi Pusat Bahasa USU. Tahun 2012–sekarang diangkat sebagai *external examiner* di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZa) Terengganu-Malaysia serta University of the Filipina-Diliman Manila. Memberi kuliah di Program Studi Doktor (S-3) Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU dan Fascasarjana Universitas Muslim Nusantara (UMN) dan UNILAK Riau. Menulis artikel ilmiah, khususnya tentang kebudayaan dan sastra di beberapa media surat khabar, seperti Harian “Waspada” dan jurnal ilmiah terindeks yang terbit di Malaysia, Berunei Darussalam, dan Filipina. Di antara beberapa buku yang telah diterbitkan; Bahasa dan Budaya Kemelayuan & Keindonesiaan, Mutiara Etnik di Sumatera Utara, Medan Beranda Budaya Nusantara, dan *Negeri Bertuah Dari Kearifan serta Dimensi Politis Hikayat Deli , Pemikiran Kreatif & Sastra Melayu Tradisi, Menjulang Tradisi Etnik*, *Khazanah Kebudayaan Melayu Sumatera Utara,* dan *Taat Ajar Taat Hukum Orang Melayu.* Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI) Komda Sumatera Utara periode 2022-2026.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PARAWITA PESISIR PANTAI TIMUR SUMATERA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN

Zulkifli Nasution
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Teori dan praktik pendekatan pembangunan keberlanjutan yang berevolusi berawal pada pilar pembangunan berkelanjutan dalam dimensi lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi dan lebih lanjut ditambahkan dimensi kelembagaan dalam prisma keberlanjutan (Eddins and Cottrell, 2013)[1]; Spangenberg and Valentin, 1999)[2] diikuti oleh Ruggerio, (2021)[3], Interaksi dari dimensi dimensi ini membentuk suatu sistim nyata yang kompleks sebagai konsep multidimensiyang saling terkait dalam pembangunan berkelanjutan.

Komitmen global 193 negara pada tahun 2015 dalam pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui penetapan Agenda 2030 dalam SDGs dalam 17 tujuandan 169 target pembangunan berkelanjutan terhadap masyarakat, ekonomi dan lingkungan. Huan et al., (2021)[4], melakukan penilaian pencapaiannya global beberapa negara kawasan Eropa Timur, memperoleh hasil tingkat pencapaian SDGs dalam 4 (empat) dimensi : masyarakat, ekonomi, lingkungan, sarana implementasi dan kerjasamaadalah berbeda tiap negara dalam range yang cukup besar hingga tahun 2020. Beberapametoda disarankan dalam penyelesaian adalah mempertahankan kinerja yang ada untuk dikembang menuju kualitas yang lebih tinggi; memprioritaskan pencapaian dimensi SDGs tertentu; mempromosikan kemajuan pencapaian semua dimensi SDGs secara simultan.

Pariwisata adalah industri yang berkembang di hampir semua negara di duniamemberikan seperlima pekerjaan baru yang tercipta secara global selama lima tahun terakhir (Alamineh et al., 2023)[5]. Sektor pariwisata pada tahun 2018, berhasil tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu ke sembilan di dunia, peringkat ke tiga di Asia dan peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara menurut The World Travel & Tourism Council (WTTC). Dalam WTTC Report pada World Economic Forum Tahun 2019, pada tahun 2018 menghasilkan $8,8 triliun untuk ekonomi global yang setara dengan 10,4% dari PDB global, dimana industri pariwisata tumbuh sebesar 3,9% pada tahun 2018 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi internasional sebesar 3,2%. Pada peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik dari 42 di tahun 2017 menjadi 40 di tahun 2019 dari 140 negara (Irawan dan Kurnia, 2019)[6]

Dalam dekade terakhir secara global, pariwisata telah mengalami pergeseran dari model pariwisata massal kepada ke gaya perjalanan yang lebih teliti dan skala kecil (Perez and Juaneda, 2000)[7]. Pergeseran paradigma ini terbukti dengan meningkatnya popularitas seputar bentuk-bentuk

pariwisata alternatif seperti pariwisata berkelanjutan atau ecotourism dan trend sekarang kepada bentuk geotourism yang merupakan konsep yang relatif baru, telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir sebagai bentuk wisata alam yang berfokus pada lanskap dan geologi.

Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak (Wahab, 2003)[8]. Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu gejala yang melukiskan bepergian orang-orang didalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau ke negara lain (pariwisata mancanegara). Yoeti (1996)[9] mendefinisikan sebagai berikut: pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (bussiness) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.

Pengembangan pariwisata diartikan sebagai kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan sesuatu yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 1) keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung terhadap kelangsungan pengembangan pariwisata (Pitana dan Gayatri, 2005)[10]. Menurut Pitana dan Gayatri, 4 (empat) aspek utama yang harus dimiliki adalah : Attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. 2). Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. 3). Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. 4). Ancilliary, berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut.

Hutan mangrove termasuk salah satu sumber daya alam yang berpotensi sebagai wisata alam. Potensi itu sudah mulai dikembangkan untuk memajukan pariwisata Indonesia. Indonesia punya Kawasan hutan mangrove yang disulap sebagai wisata alam dan dibuka untuk umum. Wisata hutan mangrove menyuguhkan keindahan alam yang apik. Pengunjung bisa menyusuri sungai yang membelah hutan bakau. Udara yang asri menambah daya Tarik wisata hutan mangrove.

Namun demikian, Anugrah Yang Maha Kuasa ini sudah banyak yang rusak atau dirusak. Kerusakan mangrove disebabkan oleh adanya abrasi, kurang mengindahkan daya dukung lingkungan pantai, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat disekitar pantai tentang ekosistem mangrove secara ekologis/ekonomis. Total luas hutan mangrove di Indonesia adalah 25 persen dari keseluruhan hutan mangrove dunia yang tersebar di 90 ribu kilometer garis pantai. Namun laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia merupakan yang tercepat dan terbesar di dunia.

Mengutip data Food and Agriculture Organization FAO (2007)[11], dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 40 persen luas hutan

mangrove. Kerusakan hutan mangrove lebih banyak akibat alih fungsi menjadi tambak, permukiman, industri, dan perkebunan. Bukan saja akibat alih fungsi lahan mangrove, tapi juga akibat pembalakan liar. Kayu mangrove dicuri untuk dijadikan material bangunan, kapal, batu arang, dan kayu bakar. “Termasuk akibat pembuangan limbah industri yang mematikan tanaman mangrove.

2. Masalah

Daerah pesisir dan laut merupakan salah satu dari lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi merupakan pula lokasi bermacam sumber daya alam, seperti mineral, gas da minyak bumi serta pemandangan alam yang indah, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, perairan pesisir juga penting artinya sebagai alur pelayaran.

Saat ini sumberdaya alam dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat eksploitasi yang berlebihan dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Kendati secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman kerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Salah satu akibat dari kelangkaan tersebut adalah pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang kini mulai bergeser dari SDA darat kearah pemanfaatan SDA pesisir dan laut. Kerusakan Magrove dan ekosistim pesisir berjalan sangat cepat dan bahkan yang tercepat di dunia Hakim (2016)[12]

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai, karena subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakatnya, yang mempunyai ketergantungan cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dll., maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Tidak akan ada perubahan apapun tanpa merubah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak akan berubah kalau tidak merubah persepsi danekonomi mereka. Dalam mengubah persepsi masyarakat ini salah satunya melalui budaya mejaga dan melestarikan Hutan Bakau dan Nipah. Artinya Fungsi Bakau dan Nipah terhadap produksi ikan, udang dan kepiting benar-benar mereka fahami , Selain itu mengurangi sampah plastik itu juga salah satu solusi atau adanya insentif seperti pemberian bonus jika bisa menukar sampah plastik, karena plastic juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Bakau.

Ekologi dan ekosistim yang baik dijadikan sebagai potensi wisata dan sumber daya pesisir itu sendiri diberdayakan sebagai produk Home Industri masyakat pedesaan pantai timur Sumatera. Upaya mengubah persepsi masyarakat ini, tidak hanya dari pemerintah, tetapi bisa dimulai dari masyarakat sendiri..

5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan dan samapi saat ini masih berlanjut beberapa diantaranya:

- Pembangunan tempat-tempat wisata dipinggir sungai dan pantai berupa Saung-saung-saung tempat pertemuan dan Kuliner makanan laut sebagai pusat wisata local dan pendatang dari daerah lain
- Mencarikan mitra masyarakat local untuk menoresaikan boat wisata dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- Mengembangkan wisata pesisir kepada Pelajar baik tingkat SD, SLTP dan SLTA sebagai pembelajaran Ekologi pesisir dan produksi wilayah pesisir.
- Mengembangkan Tambak berkelanjutan sebagai sumber makanan laut untuk dibeli pengunjung dan bahan baku rumah makan local di pedesaan yang akhir-akhir ini semakin diminati masyarakat perkotaan untuk mengunjungi pedesaan.
- Pengelolaan ekosistem hutan mangrove dengan pelibatan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan berbagai kepentingan (pemerintah dan masyarakat), ilmu pengetahuan dan pengelolaan, dan kepentingan sektoral dan masyarakat umum. Pengelolaan berbasis masyarakat disini adalah bahwa penggunaan dari sumberdaya yang utama yaitu masyarakat dan harus menjadi aktor pengelola sumberdaya tersebut. Pelibatan masyaraka diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara berkelanjutan pada sumber daya, dan pada umumnya kelompok masyarakat yang berbeda akan berbeda pula dalam kepentingannya terhadap sumberdaya tersebut. Pengelolaan sumberdaya tidak akan berhasil tanpa mengikutsertakan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

- Pengembangan Gula Nipah sebagai Industri Rumah Tangga, telah dilaksananakan dan menunjukkan banyak peminat . saat ini tidak mampu memenuhi permintaan pasar dari Indusri pembuatan Kecap.
- Pengembangan indusri VCO (Virgin Coconut Oil) menunjukkan hasil yang menggembirakan karena banyak pesanan dari berbagai institusi.
- Membantu masyarakat untuk pengurusan Halal dan Izin Depkes sebagai produk makanan yang selama ini tanpa Label sehingga dibeli oleh pengumpul produk seperti Kerupuk dan di Label ditampat lain untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengembangan wisata peisir Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cerah dan sangat berpotensi dikembangkan sesuai pengalaman melaksanakannya bersama beberapa instansi baik pemerintah, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat terutama untuk menjaga ekologi ekosistim pesisir agar tetap lestari tanpa mengorbankan ekonomi masayarakat dan bahkan dapat memajukannya.

Dengan pengalihan perhatian dari Penebangan Bakau (Logging) ke Parawisata dan Industri Rumah Tangga pendukung parawisata, keberlanjutan ekososstim pesisir lebih lestarai,

Saran

Untuk yang berminat memajukan masyarakat pesisir agar melukan Pendidikan masyarakat bahwa pembinaan masyarakat bukan berupa pembagian uang tunai yang akhir-akhir ini sering diartiakan demikian.

Daftar Pustaka

1. Eddins Emily and Cottrell Stuart (2013) Sustainable Development and Sustainable The International Journal of Sustainability Policy and Practice http://onsustainability.com/
2. Spangenberg, J. H., & Valentin, A. (1999). Indicators for sustainable communities. 2007, from http://www.foeeurope.org/sustainability/sustain/t-content-prism.htm
3. Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. Science of the Total Environment, 786, 147481. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481
4. Huan, Y., Liang, T., Li, H., & Zhang, C. (2021). A systematic method for assessing progress of achieving sustainable development goals: A case study of 15 countries. Science of the Total Environment, 752, 141875. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141875
5. Alamineh, G. A., Hussein, J. W., Endaweke, Y., & Taddesse, B. (2023). The local communities' perceptions on the social impact of tourism and its

implication for sustainable development in Amhara regional state. Heliyon, 9(6), e17088. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17088
6. Irawan K. I / Kurnia Erika (2019). Peringkat Daya Saing Pariwisata Indonesia Naik. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/04/peringkat-daya-saing-pariwisata-indonesia-naik
7. Perez E.A and Juaneda SC (2000). Tourist expenditure for mass tourism markets Annals of Tourism Research. Elsevier
8. Wahab, S. 2003. Manajemen Kepariwisataan. Jakarta: Paramita Pradnya.
9. Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa. Bandung
10. Pitana, I G.dan P.G. Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
11. FAO. (2007). The world's mangroves 1980-2005. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
12. Hakim, AD 2016 Laju Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia Tercepat di Dunia Tempo.co. Bicara Fakta https://travel.tempo.co

Biodata Penulis

Zulkifli Nasution, lahir di Kisaran tahun 1959. Staff Pengajar Fakultas Pertanian USU sejak tahun 1986 sampai sekarang. Dan 2005 menjadi Guru Besar dalam bidang Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian (Ir) dari Fakultas Pertanian Pertanian USU tahun 1984, Master of Science (MSc) dari Geologische Instituut Rijksuniversiteit Ghent Belgie tahun 1989, dan Doctor of Phylosophy in Land Management dari School of biological Sciences Universiti Sains Malaysia. Selain menjadi Staff pengajar pernah diberi amanah menjadi Staf Peneliti dan Kepala laboratorium Pemetaan pada Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara 1986 - 1992, Deputy Director of The Pollution and Monitotoring Control Unit of Western Indonesia. World Bank Project 1993 - 1995. Ketua Jurusan Tanah 1996 - 1999. Sekretaris Program studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pasca sarjana USU1999 – 2003. Dekan Fakultas Pertanian USU 2003 – 2010. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara 2004 – 2009. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara 2010 – 2016. Anggota Kelompok Ahli Badan Koordinasi Pengelolaan Danau Toba 2007 – 2014. Advisory Panel of Journal of Bioscience.University Sains Malaysia 2007 – 2009. Advisory Panel of Journal Life Science. University Sains Malaysia 2009 – 2016. Senior Advisor Sumatran Elephant Foundation 2019 - Sekarang dan Founder of The Indonesian Coastal Conservation Foundation 2021 -Sekarang. Pelatihan dan Penataran yang pernah diikuti antara lain: Leadership development programme Glasgow Universitty Scotland March 2013. Training of Trainers (ToT) Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. University Administration and Management. Auburn University 2007. Environmental Impact Analysis on Coastal Zone Habitats Issues and Case Studies. Muca Head Marine and Coastal Research Station 2004. Ziel Orienterte Projekt Planung (ZOPP) Training GTZ 1998. Wetland Management, Department Resource Development of Western Australia. Mandurah. Australia 1994. Training for Trainers on Environmental Impact Analysis. Mott Mac Donald Cooperation with World Bank Project.Ciloto 1991. Soil Concervation. ISRIC Wageningen. The Netherland 1989. Land for Development. ITC and Landbow Watenschapen. Ghent. Belgium1988. Fotogrammetry and Remoute Sensing. UNDP Project. ITB Bandung.1987. Penataran Peneliti Bidang Sains dan Teknologi. Lembaga Penelitian USU Medan.1987 Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. USU. Medan. 1987Pra-Departure Training English Course. PPS IKIP Malang 1986. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi: Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Ikatan Penginderaan Jauh (INDRAJA),Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI), International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS). Asian Wetlands Society (AWS) Japan Society for the Promotion Science (JSPS)